

LAPORAN TAHUNAN 2021



PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA
PENGAMBENGAN

KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan Tahun 2021 disusun untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan tugas PPN Pengambengan selama tahun 2021.

Ruang lingkup Laporan Tahunan ini meliputi hasil-hasil yang dicapai sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang merupakan penjabaran rencana strategis meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan PPN Pengambengan. Selain itu juga dilengkapi dengan perkembangan capaian tingkat operasional, perkembangan investasi, permasalahan-permasalahan yang menghambat dan upaya pemecahannya serta program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022.

Laporan Tahunan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pengembangan dan pembangunan PPN Pengambengan dimasa mendatang dan menjadi sumber data maupun informasi bagi yang membutuhkan.

Akhir kata, semoga Laporan Tahunan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, sebagai bahan evaluasi dan rencana pengembangan sektor perikanan dan kelautan pada umumnya dan khususnya bagi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan di masa mendatang.

Pengambengan, Januari 2022

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
Pengambengan



Mannojengi, S.St.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
 LAPORAN TAHUNAN PPN PENGAMBENGAN	
I. PENDAHULUAN	1
II. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM.....	3
2.1. Perkembangan Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2021	3
2.1.1. Pagu Anggaran	3
2.1.2. Realisasi Anggaran.....	4
2.1.3. Capaian Kinerja Tahun 2021	6
III. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN.....	7
3.1. Dasar Hukum.....	7
3.2. Struktur Organisasi.....	7
3.3. Komposisi Pegawai.....	10
3.4. Pembinaan dan Pengembangan Pegawai.....	12
3.5. Hubungan Kelembagaan.....	13
IV. KERAGAAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL.....	15
4.1. Pelaksanaan Sistem Informasi Pelabuhan Perikanan (SIPP)	15
4.2. Pelayanan Jasa Pelabuhan.....	16
4.3. Pelayanan Perizinan/rekomendasi.....	17
4.4. Frekuensi Kunjungan Kapal	17
4.5. Pendaratan Ikan	18
4.6. Perbekalan.....	23
a. Penyaluran Es	23
b. Penyaluran Bahan Bakar Minyak	24
c. Penyaluran garam	25

4.7.	Pemasaran	26
4.8.	Kesyahbandaran	27
4.9.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	31
4.10.	Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan.....	33
	a. Rapat Koordinasi Terkait Keselamatan dan Keamanan Pendistribusian BBM	33
	b. Sosialisasi PP. No.85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan tarif PNBP Yang Berlaku Pada KKP.....	35
	c. Kegiatan Rapat Koordinasi Keamanan Terpadu maupun Stake Holder	36
	d. Kegiatan Pelaksanaan Kebersihan Di PPN Pengembangan.....	37
	e. Kegiatan Kehum.....	38
4.11.	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	38
4.12.	Penyerapan Tenaga Kerja.....	39
4.13.	Investasi	40
4.14	Kegiatan Sarana dan Prasarana.....	41
V.	PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA.....	44
5.1.	Permasalahan	44
	A. Kelompok Kesyahbandaran.....	44
	B. Kelompok Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	45
	C. Kelompok Operasional Pelabuhan	48
	D. Kelompok Tata Usaha.....	48
5.2.	Pemecahan Masalah.....	49
	A. Kelompok Kesyahbandaran.....	49
	B. Kelompok Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	50
	C. Kelompok Operasional Pelabuhan	51
	D. Kelompok Tata Usaha.....	51
VI.	PROGRAM KERJA DAN RENCANA PENGEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGEMBANGAN TAHUN 2022	52
VII.	KESIMPULAN DAN SARAN	54
7.1.	Kesimpulan	54
7.2.	Saran.....	56
VIII.	PENUTUP	57

**LAPORAN TAHUNAN POS PELAYANAN PPN PENGAMBENGAN
DI BENOA**

I. PENDAHULUAN	58
II. KERAGAAN POS PELAYANAN KAPAL PERIKANAN DI BENOA	61
2.1 Dasar Hukum.....	61
2.2 Sejarah Pembentukan Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa	62
2.3 Komposisi Pegawai.....	64
2.4 Tugas dan Fungsi.....	64
2.4.1 Pelayanan Penerimaan dan Verifikasi Data Logbook Penangkapan Ikan	65
2.4.2 Pelayanan Aktivasi dan Verifikasi E-Logbook Penangkapan Ikan	67
2.4.3 Pelayanan Inspeksi Pembongkaran Ikan dan Penerbitan Surat Keterangan Hasil Inspeksi Pembongkaran Ikan (SKH-IPI)	69
2.4.4 Pelayanan Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)	74
2.4.5 Pelayanan Penerbitan Catch Documentation Scheme of The Commision for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CDS CCSBT)	81
2.4.6 Pelayanan Penerbitan The Indian Ocean Tuna Commission (CDS IOTC) Statistical Document for Big Eye Tuna dan The International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna (CDS ICCAT) Statistical Document for Swordfish	84
2.4.7 Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Berpangkalan dan Pendaratan Ikan dan Surat Kepatuhan Kapal (Pendaftaran Kapal di RFMO)	86
2.4.8 Pelaksanaan Entri Data dan Informasi Kepelabuhan di PIPP	88
2.4.9 Kegiatan Enumerasi Sampling Tuna Longline di PU. Benoa.....	89
2.4.10 Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan	
a. Bimbingan Teknis Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan	94
b. Sosialisasi Penerapan E-Logbook Penangkapan Ikan di Benoa	95
III. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA	98
3.1 Permasalahan	98
3.1.1 Kelompok Kesyahbandaran.....	98

3.1.2 Kelompok Operasional Pelabuhan 99

3.2 Pemecahan Masalah..... 100

3.2.1 Seksi Kesyahbandara 100

3.2.2 Seksi Operasional Pelabuhan 100

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 102

4.1 Kesimpulan..... 102

4.2 Saran 104

V. PENUTUP 105

DAFTAR TABEL

LAPORAN TAHUNAN PPN PENGAMBENGAN

	Halaman
Tabel 1.	Pagu Anggaran DIPA TA 2021 setelah Revisi 4
Tabel 2.	Pagu dan Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2021 6
Tabel 3.	Komposisi Pegawai PPN Pengambengan berdasarkan Tingkat Golongan dan Pendidikan 10
Tabel 4.	Rekapitulasi pegawai PPN Pengambengan menurut golongan / ruang dan kelompok umur 11
Tabel 5.	Rekapitulasi pegawai PPN Pengambengan menurut Jenis Kelamin 11
Tabel 6.	Jumlah surat masuk dan keluar di PPN Pengambengan Tahun 2021 14
Tabel 7.	Data Kunjungan Kapal pada tahun 2021 18
Tabel 8.	Pendaratan Ikan Tahun 2021 19
Tabel 9.	Frekuensi Pendaratan Ikan di PPN Pengambengan 2016-2021 20
Tabel 10.	Jumlah Ikan Yang Didaratkan Tahun 2021 21
Tabel 11.	Penyaluran Es Tahun 2021 23
Tabel 12.	Volume penyaluran BBM Solar Oleh PT. Dua Berjaya Tahun 2021 25
Tabel 13.	Penyaluran Garam Tahun 2021 26
Tabel 14.	Data Distribusi Hasil Tangkapan Di PPN Pengambengan Tahun 2021 27
Tabel 15.	Data Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Tahun 2021 28
Tabel 16.	Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) Kapal Perikanan 29
Tabel 17.	Logbook Penangkapan Ikan di PPN Pengambengan Tahun 2021 30
Tabel 18.	Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNPB Tahun 2020 dan 2021 32
Tabel 19.	Realisasi PNPB Tahun 2021 33
Tabel 20.	Penyerapan Tenaga Kerja pada Tahun 2021 39
Tabel 21.	Investor yang sudah masuk PPN Pengambengan 41
Tabel 22.	Keragaan sarana dan prasarana 41
Tabel 23.	Program/Kegiatan serta Anggaran Tahun 2022 53

LAPORAN TAHUNAN POS PELAYANAN PPN PENGAMBENGAN DI BENOA

Tabel 1.	Jumlah Logbook Penangkapan Ikan yang Diterima 66
Tabel 2.	Jumlah Produksi Tangkapan Ikan Berdasarkan Logbook Penangkapan Ikan 66
Tabel 3.	Aktivasi-Verifikasi E-Logbook Penangkapan Ikan 68
Tabel 4.	Jumlah Penerbitan Dokumen IPI, SKH-IPI dan S-CPIB 71

Tabel 5.	Jumlah Sertifikat CPIB yang telah Diterbitkan	73
Tabel 6.	Data Penerbitan SHTI	76
Tabel 7.	Negara Tujuan Ekspor Ikan Hasil Tangkapan Berdasarkan SHTI ..	79
Tabel 8.	Data Penerbitan CDS CCSBT	83
Tabel 9.	Data Penerbitan IOTC dan ICCAT Statistical Document.....	85
Tabel 10.	Data Penerbitan surat Berpangkalan dan Pendaratan Ikan serta Surat Kepatuhan	88
Tabel 11.	Input Data Produksi Perikanan di PIPP	89
Tabel 12.	Data Produksi Sampling Tuna Longline Tahun 2019-2021 di PU. Bena.....	91
Tabel 13.	Data Prosentase Kapal yang Disampling Tahun 2021 di PU. Bena.....	91
Tabel 14.	Data Produksi Sampling Tuna Longline Tahun 2013-2021 di PU. Bena	92
Tabel 15.	Data Prosentase Kapal yang Disampling Tahun 2013-2021 di PU. Bena	93

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Daftar Nama Pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2021	106
Lampiran 2. Daftar Nama Pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengembangan Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021	108
Lampiran 3. Daftar Nama Pegawai PPN Pengembangan Yang Memperoleh Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala pada Tahun 2021	111
1. Kenaikan Pangkat	111
2. Kenaikan Gaji Berkala	111
Lampiran 4. Lay Out Master Plan PPN Pengembangan	112
Lampiran 5. Gambar Foto Udara Kawasan PPN Pengembangan	114
Lampiran 6. Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang	115
Lampiran 7. Dokumentasi Kegiatan-Kegiatan PPN Pengembangan	119

DAFTAR GAMBAR

LAPORAN TAHUNAN PPN PENGAMBENGAN

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi PPN Pengambengan	9
Gambar 2. Grafik Trend Produksi 2011 – 2021	20
Gambar 3. Grafik Frekuensi Pendaratan Ikan Tahun 2017-2021	21
Gambar 4. Grafik Pendaratan Ikan Tahun 2021.....	22
Gambar 5. Jenis ikan dominan yang didaratkan di PPN Pengambengan Tahun 2021	22
Gambar 6. Kegiatan Apel Pagi	119
Gambar 7. Pelatihan SKPI.....	120
Gambar 8. Diseminasi Pelayanan Publik Sistem Digital	120
Gambar 9. Kunjungan MKP di PPN Pengambengan.....	121
Gambar 10. Vaksinasi kepada 500 nelayan dan pemberian paket bantuan dalam rangka bulan bakti nelayan.....	122
Gambar 11. Kunjungan MKP di Pos Pelayanan Kapal Perikanan Benoa.....	123
Gambar 12. Penandatanganan MoU dengan Kejaksaan Negeri Jembrana	124
Gambar 13. Kunjungan Kerja DPR RI Komisi 4 dalam rangka bulan bakti nelayan	125
Gambar 14. Penandatanganan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan	126
Gambar 15. Menghadiri Upacara Hari Sumpah Pemuda ke 39 di Perancak	127
Gambar 16. Kegiatan Dharma wanita.....	128
Gambar 17. Kegiatan Pameran	129
Gambar 18. Rapat Koordinasi Terkait Keselamatan dan Keamanan Pendistribusian BBM.....	130
Gambar 19. Sosialisasi PP No. 85 Th. 2021 Tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku Pada Kementrian Kelautan dan Perikanan	131
Gambar 20. Rapat Stake Holder	133
Gambar 21. Kegiatan Rapat Koordinasi Keamanan Terpadu	135
Gambar 22. Kegiatan Pelaksanaan Kebersihan Di PPN Pengambengan	137

**LAPORAN TAHUNAN POS PELAYANAN PPN PENGAMBENGAN
DI BENOA**

Gambar 1.	Sosialisasi Penggunaan Aplikasi E-Logbook Penangkapan Ikan kepada Nakhoda dan Pengurus kapal	67
Gambar 2.	Jumlah Penerbitan Dokumen IPI, SKH-IPI dan S-CPIB.....	71
Gambar 3.	Data Penerbitan SHTI	77
Gambar 4.	Negara- Negara Tujuan Ekspor Utama Ikan Hasil Tangkapan.....	80
Gambar 5.	Data Penangkapan dan Ekspor SBT	84
Gambar 6.	Data Ekspor Bigeye Tuna dan Swordfish	86
Gambar 7.	Grafik Prosentase Kapal yang Disampling Tahun 2021.....	92
Gambar 8.	Grafik Prosentase Kapal yang Disampling Tahun 2013-2021.....	93
Gambar 9.	Bimbingan Teknis Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI)	94
Gambar 10.	Sosialisasi Penerapan E-Logbook Penangkapan Ikan di Benoa	96



LAPORAN TAHUNAN PPN PENGAMBENGAN 2021



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

Perairan Bali merupakan salah satu wilayah perairan Indonesia di bagian tengah dengan luas perairan ± 9.500 km² memiliki potensi perikanan laut yang cukup besar terdiri dari Perairan di Bali Utara, Timur dan Barat. Potensi perikanan laut di wilayah Bali Barat dapat dilihat perkembangannya melalui aktivitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan yang terletak di Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali.

Kegiatan Perikanan di Pengambengan telah dimulai sejak Empat puluhan tahun yang lalu. Pada mulanya berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang dibangun pada tahun 1976/1977. Secara bertahap dikembangkan dan oleh Fisheries Infrastructure Sector Project, dilakukan studi kelayakan melalui Roger Consulting Marine Gmbh pada tahun 1988.

Berdasarkan hasil study tersebut, dilakukan pembangunan beberapa fasilitas pada tahun 2000 sampai tahun 2003 antara lain : Break Water, Jetty, Jalan, Tempat Pelelangan Ikan. Sedangkan sampai dengan tahun 2014 terdapat penambahan fasilitas berupa Dermaga, Turap, Groin.

Gubernur Bali, melalui surat Nomor 523.2/0211/Prod/DKP tanggal 28 Pebruari 2005 mengusulkan peningkatan status pelabuhan dengan pertimbangan agar pengelolaannya menjadi lebih terarah dalam rangka menuju pelabuhan perikanan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat serta karena untuk mengoperasikan pelabuhan perikanan diperlukan jumlah personil dan biaya operasional yang cukup besar, padahal kemampuan keuangan daerah terbatas untuk membiayai operasional dan pemeliharaan pelabuhan.

Selanjutnya berdasarkan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. B/2712/M.PAN/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 dilakukan peningkatan kelas, dari Pangkalan Pendaratan Ikan Pengambengan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai Pengambengan.

Berdasarkan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. B.2672/M.PAN/9/2008 tanggal 11 September 2008, peningkatan status kelas dari

Pelabuhan Perikanan Pantai menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara dan diresmikan menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan pada tanggal 6 Pebruari 2009.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan terletak pada posisi $08^{\circ} 23' 46''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ} 34' 47''$ Bujur Timur, terletak di desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali. Berjarak 9 Km dari Kota Negara dan 105 Km dari Kota Denpasar, menghadap ke Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 573 Samudera Hindia(Selatan Pulau Jawa) dan Selat Bali.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan didukung oleh industri pengolahan ikan yang ada di kompleks maupun yang ada di luar kompleks pelabuhan; yaitu saat ini industri pengalengan ikan dan penepungan ikan berjumlah 9 unit (diluar kompleks pelabuhan) yang masih beroperasi, serta 1 unit industri di dalam kompleks pelabuhan yaitu PT. Cilacap Samudra Fishing Industry yang kegiatannya bergerak di bidang cold storage dan galangan kapal yang saat ini tidak beroperasi.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam hal ini tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

A. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dengan kegiatan :

1. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan;
2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
3. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan;
4. Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

B. Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan :

1. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.



BAB II

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM

BAB II

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM

2.1. Perkembangan Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2021

Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diberi mandat untuk melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia. Visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional. Adapun Visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan melakukan kegiatan peningkatan fasilitas pelabuhan yang diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan untuk meningkatkan pelayanan publik.

2.1.1 Pagu Anggaran

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan Tahun Anggaran 2021 melalui DIPA APBN, DIPA Nomor : SP DIPA – 032.03.2.633693/2021 tanggal 23 November 2020, memperoleh anggaran dana sebesar Rp. 18.849.587.000,- (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah). DIPA APBN tersebut mengalami 4 (Empat) kali revisi pada nilai anggaran. Perubahan-perubahan anggaran selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Perubahan pertama pada tanggal 2 Juni 2021, disebabkan adanya program pemerintah pusat Refocusing Anggaran untuk program penanganan wabah COVID-19 sebesar Rp. 281.596.000,- sehingga nilai anggaran berubah menjadi Rp. 18.567.991.000,- .
- 2) Perubahan kedua pada tanggal 26 Juli 2021, disebabkan adanya program pemerintah pusat Refocusing Anggaran untuk program penanganan wabah COVID-19 dengan melakukan pemotongan anggaran yang berkaitan dengan pekerjaan fisik yang belum dilakukan Tender dan sisa anggaran dari sisa

Tender. Nilai pemotongan anggaran sebesar Rp. 2.948.400.000,- sehingga nilai anggaran berubah menjadi Rp. 15.619.591.000,- .

- 3) Perubahan ketiga pada tanggal 12 Agustus 2021, disebabkan adanya program pemerintah pusat Refocusing Anggaran untuk program penanganan wabah COVID-19 dengan melakukan pemotongan anggaran yang berkaitan dengan kelebihan belanja gaji dan tunjangan. Nilai pemotongan anggaran sebesar Rp. 211.000.000,- sehingga nilai anggaran berubah menjadi Rp. 15.408.591.000,- .
- 4) Perubahan jumlah anggaran keempat tanggal 2 November 2021, terjadi penambahan dari dana PNBPN sebesar Rp. 162.850.000,- Sehingga total pagu anggaran sampai akhir 2021 sebesar Rp. 15.571.441.000,-.

Alokasi anggaran mengalami peningkatan dibandingkan dengan TA 2020 (Pagu = Rp. 9.311.524.000,-) sebesar Rp. 6.259.917.000,- atau mengalami peningkatan sebesar 67 %.

Tabel 1. Pagu Anggaran DIPA TA 2021 setelah Revisi

	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	JUMLAH BIAYA
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	7.165.508.000
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	16.500.000
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	7.055.650.000
2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	59.318.000
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	34.040.000
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen	8.405.933.000
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	8.405.933.000

2.1.2. Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja instansi pada TA 2021 adalah sebesar Rp 15.305.325.117,- atau 98.29% dari anggaran belanja sebesar Rp 15.571.441.000,-. Sedangkan yang

tidak terealisasi (sisa dana) yaitu Rp. 266.115.883,- atau sebesar 1,7 % dari pagu anggaran, hal ini dikarenakan :

- Sisa Belanja Pegawai Sebesar Rp. 87.003.600,-
- Sisa Belanja Barang sebesar Rp. 104.061.609,-
- Sisa Belanja Modal sebesar Rp. 75.050.674,-

Dibandingkan dengan TA 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 177,5 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

**Laporan Realisasi Anggaran
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**

URAIAN	TA 2021		%THD ANGGARAN	TA 2020 REALISASI
	ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	380.022.000	526.047.055	138,43%	417.365.691
JUMLAH PENDAPATAN	380.022.000	526.047.055	138,43%	417.365.691
BELANJA				
Belanja Pegawai	4.086.933.000	3.999.929.400	97,87%	3.519.975.960
Belanja Barang	5.054.222.000	4.950.160.391	97,94%	4.746.207.162
Belanja Modal	6.430.286.000	6.355.235.326	98,83%	354.973.507
JUMLAH BELANJA	15.571.441.000	15.305.325.117	98,29%	8.621.156.629

Secara rinci hubungan antara anggaran dan realisasi dapat disajikan pada tabel 2 sbb :

Tabel 2. Pagu dan Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2021

	PROGRAM / KEGIATAN /OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	JUMLAH BIAYA	REALISASI sd 31 DESEMBER	SISA PAGU
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	7.165.508.000	7.058.257.075	107.250.925
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	16.500.000	16.500.000	0
2337.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	16.500.000	16.500.000	0
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	7.055.650.000	6.957.633.950	98.016.050
2338.ADC	Sertifikasi Produk	18.990.000	18.939.700	50.300
2338.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	589.160.000	569.434.518	19.725.482
2338.BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	200.900.000	196.941.906	3.958.094
2338.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	6.246.600.000	6.172.317.826	74.282.174
2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	59.318.000	50.288.000	9.030.000
2339.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	8.000.000	8.000.000	0
2339.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	51.318.000	42.288.000	9.030.000
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	34.040.000	33.835.125	204.875
2341.QKB	Pemantauan produk	34.040.000	33.835.125	204.875
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen	8.405.933.000	8.247.068.042	158.864.958
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	8.405.933.000	8.247.068.042	158.864.958
2342.EAA	Layanan Perkantoran	8.162.613.000	8.010.689.600	151.923.400
2342.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	66.600.000	66.116.642	483.358
2342.EAF	Layanan SDM	28.700.000	28.561.011	138.989
2342.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	29.000.000	24.296.610	4.703.390
2342.EAJ(22.02)	Layanan Data dan Informasi	11.400.000	11.282.190	117.810
2342.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	107.620.000	106.121.989	1.498.011

2.1.3. Capaian Kinerja Tahun 2021

Di tahun anggaran 2021, capaian PPN Pengambengan sebagai berikut :

1. Penghargaan Satker terbaik pengguna Marketplace wilayah Bali dari KPPN Singaraja.
2. Mendapatkan penilaian IKPA sebesar 95,03 dan capaian SMART DJA 92,29.
3. Capaian Kinerja IKU Pelabuhan berdasarkan Aplikasi Kinerjaku dengan NPSS sebesar 112,04.



BAB III

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PPN PENGAMBENGAN

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN

3.1 DASAR HUKUM

- a. Undang – Undang No. 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Undang – Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-undang 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- c. Undang – Undang No. 17 Tahun 2008, tentang Pelayaran;
- d. Undang – Undang No. 18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah;
- e. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut;
- f. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2002, tentang Usaha Perikanan;
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 26/PERMEN-KP/2019. Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.08/MEN/2012. Tanggal 20 April Tahun 2012 Tentang Kepelabuhanan;
- j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.20/PERMEN-KP/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan.
- k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 66/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
- l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.
- m. Persetujuan MENPAN No: B-2672/M.PAN/9/2008 untuk Peningkatan Status PPN Pengambengan.

3.2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN-KP/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 20/PERMEN-KP/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pelabuhan perikanan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sesuai dengan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 20/PERMEN-KP/2014, Pelabuhan Perikanan bertugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, pelabuhan perikanan menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelabuhan perikanan;
- Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
- Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan *Log Book*;
- Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat Persetujuan Berlayar;
- Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
- Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
- Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- Pelayanan Jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
- Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
- Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
- Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;

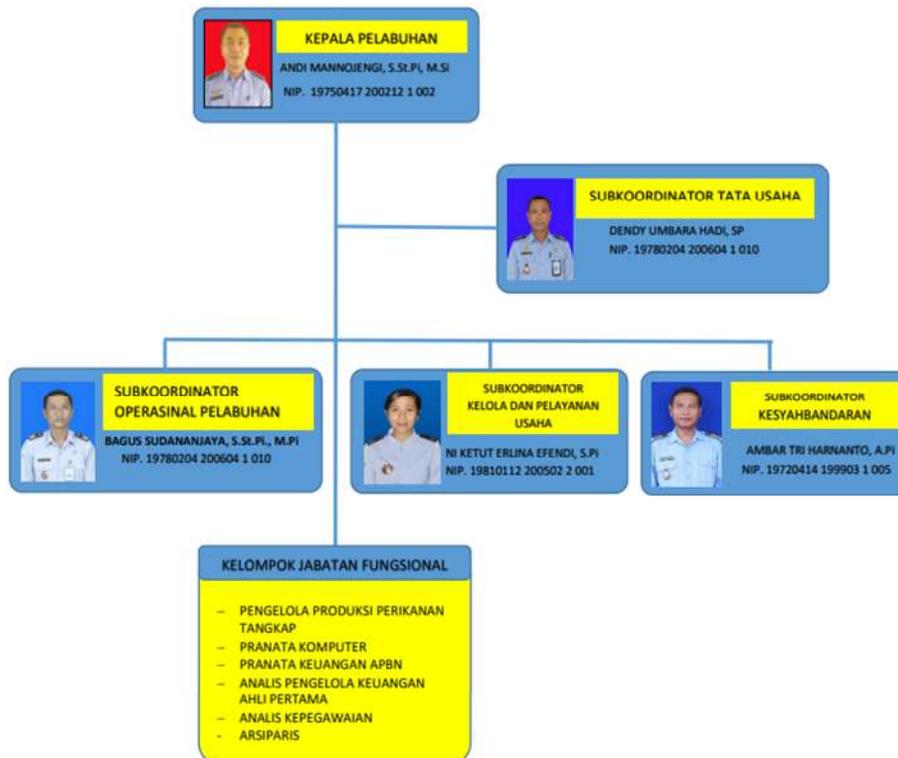
- Pelaksanaan fasilitasi pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari.
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Struktur Organisasi di PPN Pengambengan terdiri dari :

- Kepala Pelabuhan
- Subkoordinator Kelompok Tata Usaha
- Subkoordinator Kelompok Operasional Pelabuhan
- Subkoordinator Kelompok Tata Kelola dan Pelayanan Usaha
- Subkoordinator Kelompok Kesyahbandaran

Secara singkat struktur organisasi PPN Pengambengan dapat disajikan pada gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi PPN Pengambengan



Sejak tanggal 22 Oktober 2020 seluruh jajaran eselon IV diangkat menjadi Jabatan Fungsional melalui mekanisme Penyetaraan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 149/KP.930/PNY-JF/IX/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas ke Dalam Jabatan fungsional dan masih melaksanakan tugas-tugas yang selama ini dilaksanakan dalam tugas fungsi Subbag/Seksi sebagai Subkoordinator

berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 192/KP.900/PNY-JF/X/2020 tanggal 22 oktober 2020 tentang Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional.

3.3. Komposisi Pegawai

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di PPN Pengambengan dari bulan Januari sampai Desember 2021 terdiri dari 30 PNS, 3 CPNS dan 34 PPNPN untuk jelasnya komposisi pegawai berdasarkan golongan dan pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Komposisi Pegawai PPN Pengambengan berdasarkan Tingkat Golongan dan Pendidikan.

NO	BAGIAN /BIDANG	GOLONGAN				JMLH	PENDIDIKAN						JMLH
		I	II	III	IV		S2	S1&DIV	DI&DIII	SLTA	SLTP	SD&Tdk SD	
1	Kepala Pelabuhan				1	1	1						1
2	Sub Koordinator Kelompok Tata Usaha			1		1		1					1
	Tata Usaha		1	3		4		3		1			4
3	Sub Koordinator Kelompok Operasional Pelabuhan			1		1	1						1
	Operasional Pelabuhan			1		1		1					1
4	Sub Koordinator Kelompok Tata Kelola dan Pelayanan Usaha			1		1		1					1
	Tata Kelola dan Pelayanan Usaha												-
5	Sub Koordinator Kesyahbandaran			1		1		1					1
	Kesyahbandaran			2		2		1		1			2
6	Jabatan Fungsional		4	14		18	1	13		4			18

7	CPNS	2	1				1	2			3	
8	PPNPN					1	16	4	12		1	34
JUMLAH		7	25	1	33	4	38	6	18		1	67

Tabel 4. Rekapitulasi pegawai PPN Pengambengan menurut golongan/ruang dan kelompok umur.

No	Golongan Ruang	< 20 Tahun	20-25 Tahun	26-30 Tahun	31-35 Tahun	36-40 Tahun	41-45 Tahun	46-50 Tahun	51-60 Tahun	Jumlah
1	IV b							1		1
2	IV a									-
3	III d					2	2	1		5
4	III c				1	2	2			5
5	III b				3	1	1	1		6
6	III a		1	3		2	3			9
7	II d				1	1	1			3
8	II c			2			1			3
9	II b									-
10	II a			1						1
Jumlah		-	1	6	5	8	10	3	-	33

Tabel 5. Rekapitulasi pegawai PPN Pengambengan menurut jenis kelamin

No	Bagian/Bidang	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Kepala Pelabuhan	1	1	
2	Kasubbag Tata Usaha	1	1	
	Subbag Tata Usaha	6	2	4
3	Kasi Operasional Pelabuhan	1	1	-
	<i>Seksi Operasional Pelabuhan</i>	2	-	2
4	Kasi Kesyahbandaran	1	1	-
	<i>Seksi Kesyahbandaran</i>	3	3	-
5	Kasi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	1	-	1
	<i>Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha</i>	1	1	-

6	Jabatan Fungsional	13	8	5
7	CPNS	-	-	-
8	PPNPN	34	22	12
Total Jumlah Pegawai		64	40	24
Presentase Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin		100%	63%	37%

Sepanjang tahun 2021 terdapat CPNS sebanyak 3 orang yakni 3 orang perempuan a.n Nurul Lady Choirunisa, S.Psi jabatan Analis Kepegawaian Pertama, Elvana Anandha Adian, A.Md.A.B. jabatan Analis Kepegawaian Pelaksana dan Meldiany Ramadhona, A.Md jabatan Arsiparis Pelaksana.

Jumlah pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan sebanyak 67 (Enam puluh tujuh) orang untuk pelaksanaan operasional pelabuhan baik di Pengambengan ataupun di Pos Pelayanan PPN Pengambengan di Benoa. Selain itu terdapat tenaga kerja yang berasal dari rekrutmen perusahaan (*outsourcing*) sejumlah 27 orang yang terdiri dari 15 orang tenaga keamanan dan 12 orang tenaga kebersihan. Penanganan kebersihan dilaksanakan oleh tim kebersihan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan untuk menangani areal pelabuhan seluas 13,5 ha dan fasilitas-fasilitas yang ada di pelabuhan.

3.4. Pembinaan dan Pengembangan Pegawai

Pembinaan dan pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparat pelabuhan perikanan terus dilakukan melalui kegiatan Bimbingan teknis/pelatihan/kursus, sosialisasi, diklat baik yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan maupun yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Daftar kegiatan pelatihan, sosialisasi, workshop yang telah diikuti oleh pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan dapat dilihat pada lampiran 2. Kegiatan pembinaan dan pengembangan pegawai juga dilakukan dengan pelaksanaan apel pagi setiap hari kerja dengan tujuan meningkatkan disiplin pegawai. Selain itu juga diadakan rapat pembinaan pegawai yang diikuti oleh seluruh pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan untuk mengevaluasi tugas, fungsi dan kedisiplinan pegawai.

Demikian juga dengan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pengangkatan PNS diberikan pada pegawai yang telah memenuhi syarat. Pegawai-pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pengangkatan PNS dapat dilihat pada lampiran 3.

3.5. Hubungan Kelembagaan

Tata hubungan kerja pelabuhan perikanan dengan instansi terkait yang ada di lingkungan pelabuhan dilakukan dengan prinsip koordinasi dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing instansi. Instansi terkait yang telah melakukan pelayanan dan mempunyai kantor kerja di pelabuhan adalah :

- 1) Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pengambengan
- 2) Pos Polisi Perairan
- 3) Pos TNI Angkatan Laut
- 4) Kantor Pelabuhan Gilimanuk Satuan Kerja Pengambengan
- 5) Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang bertugas memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pengguna fasilitas pelabuhan selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan dengan melakukan perbaikan dan pengembangan berbagai fasilitas yang ada di pelabuhan dan peningkatan pelayanan di bidang administrasi.

Sebagai tindak lanjut dan perwujudan adanya komunikasi dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait baik di lingkungan PPN Pengambengan maupun dengan pihak lain di luar kawasan diadakan rapat stakeholder serta sosialisasi yang mengundang instansi terkait (Pemda/Pemprov, Kementerian, Pelabuhan Perikanan lain dan tingkat pusat, TNI AL, Pollair).

Sebagai pendukung pelayanan prima, pelayanan administrasi mendapat perhatian, gambaran mengenai tingkat pelayanan administrasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan dalam Tahun Anggaran 2021 disajikan pada tabel 6.

Tabel 6. Jumlah Surat Masuk dan Keluar di PPN Pengambengan Tahun 2021

No.	Bulan	Surat Masuk	Surat Keluar	Jumlah
1.	Januari	63	164	227
2.	Februari	61	138	199
3.	Maret	80	164	244
4.	April	60	242	302
5.	Mei	52	120	172
6.	Juni	71	181	252
7.	Juli	55	134	189
8.	Agustus	53	266	319
9.	September	74	139	213
10.	Oktober	77	208	285
11.	Nopember	70	224	294
12.	Desember	78	203	281
Total		794	2183	2977



BAB IV

KERAGAAN

PEMBANGUNAN

DAN OPERASIONAL

BAB IV

KERAGAAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL

4.1 Pelaksanaan Sistem Informasi Pelabuhan Perikanan (SIPP)

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan dan untuk mewujudkan misi pelabuhan perikanan sebagai penyedia informasi, IPTEK dan data kelautan dan perikanan, sangat diperlukan adanya peningkatan Sistem Informasi Pelabuhan Perikanan (SIPP). Pelaksanaan informasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan selama ini sudah dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan sebagai berikut :

1. Pembuatan Laporan Harian Pelabuhan Perikanan;
2. Pembuatan Laporan Mingguan Pelabuhan Perikanan;
3. Pembuatan Laporan Bulanan Monitoring Pelabuhan;
4. Pembuatan Laporan SL-3;
5. Pembuatan Laporan Kapal <30 GT;
6. Pembuatan Laporan Produktifitas Kapal;
7. Laporan Catatan Produksi Harian Kapal;
8. Laporan Pusat informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP);
9. Laporan Revitalisasi Tuna cakalang Tongkol;
10. Pembuatan Laporan Bulanan dan Tahunan Penerbitan SPB;
11. Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal;
12. Laporan Operasional Kapal Syahbandar;
13. Laporan Pengawasan Pengisian Bahan Bakar;
14. Pembuatan Laporan Log Book;
15. Pembuatan Laporan Statistik Pelabuhan;
16. Pembuatan Laporan SHTI;
17. Pembuatan Laporan IOTC, CDS-CCSBT;
18. Pembuatan Laporan Tahunan Pelabuhan;
19. Pembuatan Laporan Kinerja;
20. Pembuatan RKA-K/L;
21. Pembuatan Laporan SIMPEG;

22. Pembuatan Laporan Bulanan Realisasi DIPA;
23. Pembuatan Laporan Bulanan PNBP;
24. Pembuatan Laporan Bulanan dan Semester SAKPA dan SIMAK-BMN;

Untuk mendapatkan informasi yang cepat dan akurat dari setiap Pelabuhan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyediakan Aplikasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) yang berisi tentang berbagai informasi meliputi produksi dan nilai produksi hasil tangkapan, pemasaran ikan keluar masuk pelabuhan, harga ikan di tingkat pedagang, operasional kapal keluar, informasi terkait lahan dan fasilitas pelabuhan, realisasi PNBP, realisasi anggaran. Selain data produksi di pelabuhan dilakukan juga entry data pelabuhan yang lain seperti data fasilitas-fasilitas di pelabuhan seperti fasilitas pokok, fungsional dan penunjang.

Untuk menyebarkan informasi kepada nelayan, investor dan pengguna fasilitas pelabuhan lainnya, PPN Pengambengan membuat pameran terkait potensi PPN Pengambengan dan aktifitas di pelabuhan. PPN Pengambengan juga bekerjasama dengan Balai Penelitian dan Observasi Laut (BPOL) Perancak Bali dalam menyediakan informasi daerah penangkapan ikan di Selat Bali dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Negara, Bali dalam penyediaan informasi cuaca dan iklim melalui Display Informasi Cuaca yang dipasang di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan dan juga melalui Grup Nelayan Cerdas.

4.2 Pelayanan Jasa Pelabuhan

Pelayanan Jasa Pelabuhan yang merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi :

- a) Jasa Tambat Labuh;
- b) Jasa Pengadaan Es/Ice Flake Machine(IFM);
- c) Jasa Penggunaan Air;
- d) Jasa Penggunaan Forklift, Dump Truck;
- e) Jasa Penggunaan Listrik;
- f) Jasa Penggunaan Tanah dan Bangunan;
- g) Jasa Pas masuk Pelabuhan;

- h) Jasa Kebersihan kendaraan Bongkar muat, Kios, Bangunan dan kolam pelabuhan;
- i) Jasa Penggunaan *Cold Storage*.

4.3 Pelayanan Perizinan/Rekomendasi

Pelayanan Perijinan yang dilaksanakan di PPN Pengambengan meliputi :

- a) Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
- b) Ijin Bongkar/Muat Ikan dan Perbekalan
- c) Ijin Masuk/Keluar Kapal Perikanan
- d) Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)
- e) Surat Keterangan Berpangkalan dan Pendaratan Ikan
- f) Surat Keterangan Kepatuhan Kapal untuk Pendaftaran RFMO;
- g) Rekomendasi Inspeksi Pembongkaran Ikan
- h) Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)
- i) Penerbitan Sertifikat CDS-CCSBT
- j) Penerbitan Sertifikat IOTC Big Eye Tuna Statistical Document
- k) Penerbitan ICCAT Swordfish Statistical Document
- l) Pelayanan Cek Fisik Kapal dan Alat Penangkapan Ikan.
- m) Pelayanan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan.

4.4 Frekuensi Kunjungan Kapal

Kapal yang berkunjung ke PPN Pengambengan adalah kapal lokal milik perorangan/nelayan Kabupaten Jembrana serta kapal dari Kabupaten Banyuwangi/Jawa Timur. Kapal nelayan ini beroperasi di Selat Bali serta menggunakan alat tangkap *Purse Seine* dan juga kapal fiber berukuran < 5 GT dengan alat tangkap *gillnet* atau pancing. Ikan hasil tangkapan dominan yaitu ikan lemuru, layang, tongkol, tembang, dll. Data kunjungan kapal pada Tahun 2021 disajikan pada Tabel di bawah ini (tabel 7).

Tabel 7. Data Kunjungan Kapal pada Tahun 2021

No.	Bulan	Jumlah Kunjungan Kapal (Kali)	Keterangan
1	Januari	225	
2	Februari	421	
3	Maret	520	
4	April	617	
5	Mei	460	
6	Juni	397	
7	Juli	444	
8	Agustus	215	
9	September	520	
10	Oktober	941	
11	Nopember	1.084	
12	Desember	1.058	
Jumlah		6.902	

Dari tabel 7 dapat dilihat bahwa kunjungan kapal pada tahun 2021 sebanyak 6.902 kali. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah kunjungan kapal sebanyak 7.316 kali.

Kegiatan bongkar muat dilakukan oleh kapal yang berasal dari PPN Pengambengan sendiri. Pada tahun 2021 jumlah kunjungan kapal mengalami penurunan sebanyak 5,66% dibandingkan tahun 2020, hal ini dikarenakan adanya kondisi cuaca buruk di beberapa bulan sehingga kapal-kapal fiber dan *purse seine* tidak banyak melaut.

4.5 Pendaratan Ikan

Pendaratan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan pada tahun 2021 mencapai 14.764 Ton, jika hari kerja dalam tahun 2021 sebanyak 298 hari, maka rata-rata produksi 49,54 Ton/hari atau mengalami penurunan sebesar 23,94 % apabila di bandingkan dengan pendaratan ikan pada tahun 2020 mencapai 19.410 Ton dengan rata-rata produksi 63,64 ton/hari. Sedangkan frekuensi

pendaratan ikan dari tahun 2016 – 2017 menurun dan meningkat pada tahun 2018 dan 2020, sedangkan pada tahun 2021 produksi hasil tangkapan menurun. Pendaratan ikan pada 2021 mengalami penurunan jika dibanding tahun 2020. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan produksi di PPN Pengambengan, yakni :

1. Faktor cuaca

Jika dilihat produksi pada bulan April 2021 mulai meningkat yakni dari angka 1.168 Ton pada bulan Maret menjadi 1.506 Ton pada bulan April 2021. Kemudian terjadi fluktuasi jumlah produksi sampai dengan bulan September 2021 hingga menjadi 1.492 Ton karena terjadi cuaca buruk sehingga nelayan tidak secara rutin melakukan aktivitas di Laut. Kemudian pada bulan Oktober 2021 mengalami kenaikan menjadi 3.598 Ton. Adapun produksi ikan yang didaratkan di PPN Pengambengan Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 8. Pendaratan Ikan di PPN Pengambengan Tahun 2021

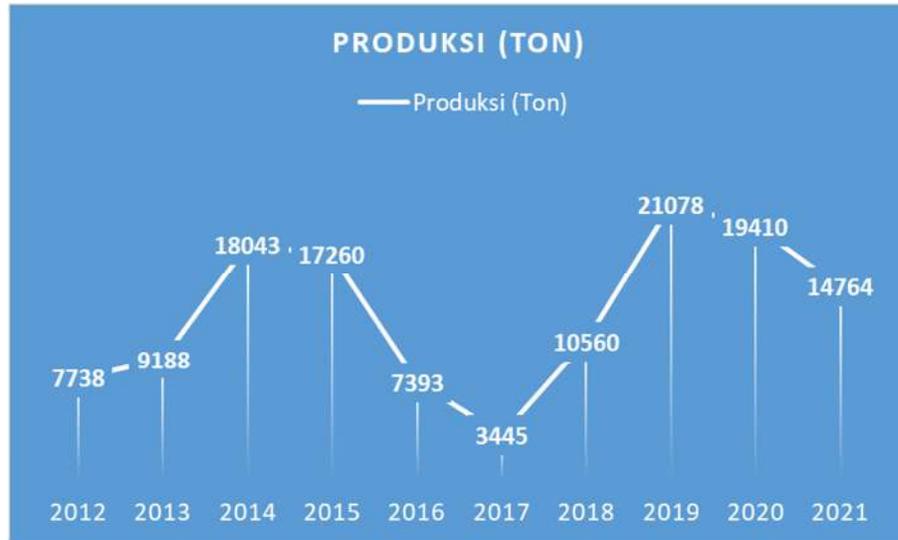
No	Bulan	Jumlah Ikan Yang Didaratkan (ton)	Nilai Produksi (Rp.1000)
1	Januari	561	2.887.059
2	Februari	779	4.601.968
3	Maret	1.168	5.499.221
4	April	1.506	8.280.093
5	Mei	1.004	5.043.056
6	Juni	552	3.373.188
7	Juli	1.005	6.065.223
8	Agustus	196	1.350.294
9	September	1.490	9.701.210
10	Oktober	3.598	14.540.216
11	Nopember	1.492	5.817.845
12	Desember	1.413	8.864.254
	Total	14.764	76.023.624

2. Tren Produksi Tangkapan Ikan

Tren Produksi tangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan dalam periode 10 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Produksi

mencapai puncak tertinggi pada tahun 2019 dan jumlah nilai produksi terendah pada tahun 2017.

Gambar.2 Grafik Trend Produksi 2011 - 2021



Perkembangan frekuensi pendaratan ikan dalam 5 tahun terakhir disajikan pada tabel 9 dan gambar 3.

Tabel 9. Frekuensi Pendaratan Ikan di PPN Pengambengan Tahun 2016 – 2021

No.	Bulan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Januari	6	21	308	258	185
2.	Februari	7	31	365	478	280
3.	Maret	67	204	658	515	418
4.	April	145	341	435	857	507
5.	Mei	113	373	426	415	376
6.	Juni	32	244	356	769	288
7.	Juli	115	349	453	525	346
8.	Agustus	211	295	629	432	155
9.	September	258	533	600	473	454
10.	Oktober	171	642	763	516	675
11.	Nopember	68	722	556	592	493
12.	Desember	31	431	592	472	332
Total		1.224	4.186	6.141	6.302	4.509

Gambar 3. Grafik Frekuensi Pendaratan ikan tahun 2017 – 2021



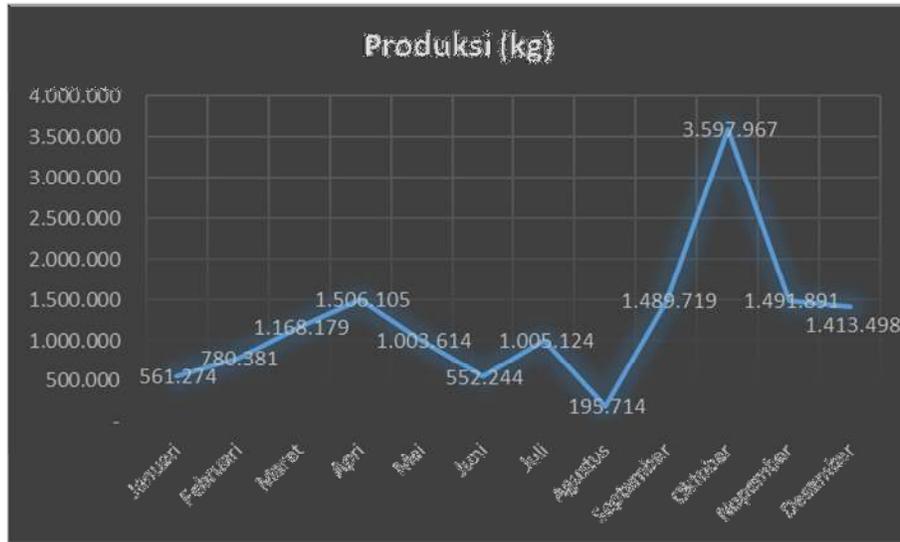
Jenis-jenis ikan yang didaratkan di PPN Pengambengan adalah lemuru, tongkol, layang, tembang dan jenis ikan lainnya. Ikan yang didaratkan di PPN Pengambengan digunakan sebagai bahan baku ikan kaleng dan tepung ikan di pabrik-pabrik pengolahan yang ada di sekitar PPN Pengambengan dan dikirim keluar daerah sebagai bahan baku industri pengolahan ikan. Jumlah ikan yang didaratkan dan dominan di PPN Pengambengan pada Tahun 2021 disajikan pada tabel 10 dan Gambar 4 serta Gambar 5.

Tabel 10. Jumlah Ikan Yang Didaratkan Tahun 2021 (Per jenis Ikan)

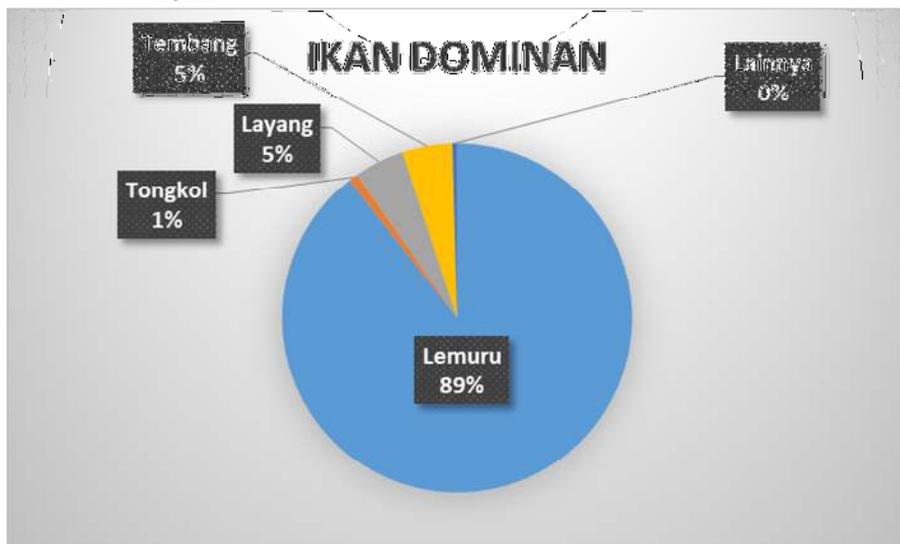
Bulan	Volume dan Nilai Produksi Per Jenis Ikan										Total Produksi	Total Nilai Prod
	Lemuru		Tongkol		Layang		Tembang		Lainnya			
	Prod (ton)	Nilai Prod (Rp.1000)	Prod (ton)	Nilai Prod (Rp.1000)	Prod (ton)	Nilai Prod (Rp.1000)	Prod (ton)	Nilai Prod (Rp.1000)	Prod (ton)	Nilai Prod (Rp.1000)		
Januari	551	2.770.497	7	79.926	1	7.476	0,1	305	1	28.855	561	2.887.059
Februari	774	4.511.155	1	12.985	2	25.953			2	51.874	779	4.601.967
Maret	1.154	5.256.394	6	63.897	3	35.820	1	4.896	4	138.214	1.168	5.499.221
April	1.492	7.911.096	1	23.030	3	31.682	0,2	1.100	9	313.184	1.506	8.280.092
Mei	992	4.606.102	0,1	2.764					11	434.120	1.004	5.043.055
Juni	528	3.021.385	10	154.034	4	32.695	2	6.656	9	158.417	552	3.373.187
Juli	997	5.918.545	3	38.780					5	106.607	1.005	6.065.222
Agustus	184	1.135.632	4	51.606					3	93.215	198	1.350.293
September	1.225	7.109.914	47	576.940	203	1.755.542			14	258.813	1.490	9.701.210
Oktober	3.190	11.871.146	10	133.797	394	2.459.782			7	78.885	3.598	14.543.610

Nopember	1.352	4.524.702	38	457.616	99	782.274			3	53.252	1.492	5.817.844
Desember	1.308	7.369.382			5	52.622	2	8.075	100	1.434.174	1.413	8.864.254
Total	13.747	66.055.314	124	1.534.218	712	5.177.392	5	21.032	172	3.231.706	14.764	76.023.624

Gambar 4. Grafik Pendaratan Ikan Tahun 2021



Gambar 5. Jenis ikan dominan yang di daratkan di PPN Pengambengan Tahun 2021



Jenis ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan pada 2021 yakni lemuru sebesar 89%, layang 5% , tongkol 1% dan tembang 5% dari total hasil tangkapan. Namun dari jenis ikan di atas yang paling dominan untuk tahun 2021 adalah ikan lemuru. Hal ini menurun dari tahun sebelumnya yakni tahun 2020, produksi lemuru sebagai hasil tangkapan tertinggi yakni sebesar 93% dari total hasil tangkapan. Keberadaan lemuru yang didaratkan di PPN Pengambengan untuk tahun 2021 dengan jumlah hasil tangkapan sebesar 13.747 ton atau sekitar 89% dari total hasil tangkapan.

4.6. Perbekalan

a. Penyaluran Es

Ikan merupakan komoditas yang mudah busuk jika tidak dilakukan penanganan dengan cepat dan tepat. Penanganan produk perikanan dengan sistem rantai dingin yang menggunakan es untuk mempertahankan mutu ikan dalam proses penangkapan dan distribusi harus mendapat perhatian, mengingat terbatasnya pengetahuan nelayan dan masyarakat perikanan tentang penanganan produk hasil perikanan yang baik. Jika es yang digunakan tidak sesuai standar mutu, maka akan berakibat pada menurunnya mutu ikan. Dengan menurunnya mutu, maka akan berpengaruh pada distribusi ikan pada perusahaan pengalengan yang ada di sekitar PPN Pengambengan. Karena saat ini nelayan masih berorientasi pada kuantitas hasil tangkapan bukan pada kualitas hasil tangkapan sehingga sangat merugikan nelayan dan pendistribusi ikan itu sendiri.

Penyaluran es di PPN Pengambengan dilakukan oleh penyuplai - penyuplai es di sekitar PPN Pengambengan dan dari luar daerah. Selain itu PPN Pengambengan sendiri memproduksi es melalui Ice Flake Machine (IFM). Penyaluran es pada Tahun 2021 disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Penyaluran Es Tahun 2021

No.	Bulan	Jumlah Penyaluran Es (Ton)
1	Januari	294
2	Februari	511
3	Maret	613

4	April	807
5	Mei	486
6	Juni	572
7	Juli	426
8	Agustus	423
9	September	1.264
10	Oktober	1.684
11	Nopember	1.295
12	Desember	1.771
Jumlah		10.146

Berdasarkan Tabel 11 dapat dilihat bahwa penyaluran es tahun 2021 sebanyak 10.146 ton, mengalami kenaikan 1.454 ton dari penyaluran Es tahun 2020 sebesar 8.692 ton. Jika dipersentasekan jumlah penyaluran es mengalami kenaikan sebesar 17% dari tahun sebelumnya. Sedikit kenaikan pada kegiatan penyaluran es di PPN Pengambengan disebabkan adanya peningkatan minat nelayan dalam menjaga kualitas/mutu ikan hasil tangkapan. Dengan sedikit peningkatan ini diharapkan ke depan nelayan lebih dapat meningkatkan kualitas mutu hasil ikan tangkapannya dengan membawa jumlah es yang sesuai dengan jumlah hasil tangkapan maksimal. Sosialisasi terkait penanganan ikan yang baik perlu tetap dilaksanakan untuk nelayan sehingga nelayan semakin memahami tentang pentingnya kualitas/mutu ikan.

b. Penyaluran Bahan Bakar Minyak

Ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar dalam jumlah yang cukup dan memadai untuk kegiatan operasional kapal perikanan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kelancaran usaha perikanan. Penyaluran BBM Solar di PPN Pengambengan dilakukan oleh PT. Dua Berjaya yang berada di kawasan PPN Pengambengan. pada tahun 2020 penyaluran BBM Solar sebanyak 2.032 ton/Tahun atau 169 ton/bulan sedangkan pada tahun 2021 penyaluran BBM Solar sebanyak 1.602.43 ton/Tahun atau 133,54 ton/bulan.

Volume BBM Solar yang disalurkan oleh PT. Dua Berjaya di PPN Pengambengan pada Tahun 2021 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Volume penyaluran BBM Solar oleh PT. Dua Berjaya Tahun 2021

No.	Bulan	Volume BBM Solar (Ton)
1	Januari	49.02
2	Februari	104.52
3	Maret	107.84
4	April	156.97
5	Mei	86.73
6	Juni	68.85
7	Juli	83.89
8	Agustus	48.36
9	September	163.60
10	Oktober	244.94
11	Nopember	317.63
12	Desember	170.08
Jumlah		1.602.43

Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan untuk Penyaluran BBM Solar hanya bisa mendata penyaluran dari SPBN PT. Dua Berjaya yang berada di kawasan PPN Pengambengan, sedangkan penyaluran melalui pembelian dari SPBU di luar PPN Pengambengan tidak terdata.

c. Penyaluran Garam

Produk perikanan yang didaratkan di PPN Pengambengan bukan hanya untuk bahan baku perusahaan pengalengan ikan di sekitar kawasan PPN Pengambengan karena jumlah produk yang melebihi kapasitas produksi perusahaan, sehingga banyak produk perikanan yang dikirim ke daerah lain seperti seluruh wilayah Bali, Jawa Timur (Banyuwangi), Jawa Tengah dan Lombok. Oleh karena itu selama proses distribusi selain menggunakan es ditambahkan juga garam untuk mengurangi kecepatan menurunnya kualitas ikan.

Jumlah kebutuhan garam yang digunakan nelayan dan distributor ikan dapat di sajikan pada Tabel 13 berikut ini :

Tabel 13. Penyaluran Garam Tahun 2021

No	Bulan	Penyaluran Garam (Ton)
1.	Januari	4
2.	Februari	5
3.	Maret	8
4.	April	11
5.	Mei	7
6.	Juni	4
7.	Juli	9
8.	Agustus	3
9.	September	10
10.	Oktober	19
11.	Nopember	11
12.	Desember	12
Jumlah		103

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa jumlah garam yang digunakan selama tahun 2021 adalah 103 ton, dimana jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 27 ton dari penggunaan garam pada tahun 2020 sebesar 130 ton atau mengalami penurunan sebesar 20,76%.

4.7. Pemasaran

Distribusi hasil tangkapan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan dilakukan di Dalam Propinsi maupun di Luar Propinsi yakni Lokal (Jembrana), Denpasar, Singaraja, Tabanan, Pulau Jawa (Jatim, Jateng). Adapun jumlah hasil tangkapan yang didistribusikan di dalam Propinsi sebesar 13.685 Ton sedangkan yang di Luar Propinsi sebesar 1.073 Ton. Untuk Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14. Data Distribusi Hasil Tangkapan Di PPN Pengambengan Tahun 2021

No	Bulan	Distribusi		Tujuan
		Dalam Propinsi (Ton)	Luar Propinsi (Ton)	
1.	Januari	513	48	Jembrana, Singaraja, Tabanan, Denpasar, dan Jawa Timur
2.	Februari	779	-	Jembrana
3.	Maret	1.169	-	Jembrana
4.	April	1.506	-	Jembrana
5.	Mei	666	151	Jembrana, Singaraja, Tabanan, Denpasar, Jawa Tengah dan Jawa Timur
6.	Juni	498	54	Jembrana, Singaraja, Tabanan, Denpasar, Jawa Tengah dan Jawa Timur
7.	Juli	901	104	Jembrana, Tabanan, Denpasar, Jawa Tengah dan Jawa Timur
8.	Agustus	183	14	Jembrana, Tabanan, Denpasar dan Jawa Timur
9.	September	1.334	150	Jembrana, Tabanan, Denpasar, Jawa Tengah dan Jawa Timur
10.	Oktober	3.462	320	Jembrana, Tabanan, Denpasar, Jawa Tengah dan Jawa Timur
11.	Nopember	1.344	148	Jembrana, Tabanan, Denpasar, Jawa Tengah dan Jawa Timur
12.	Desember	1.330	84	Jembrana, Tabanan, Denpasar, Jawa Tengah dan Jawa Timur
Jumlah		13.685	1.073	

4.8. Kesyahbandaran

Sesuai Undang-undang Nomor 27 tahun 2021 tentang bidang perikanan, Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di Pelabuhan Perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional Kapal Perikanan dan membantu pengendalian sumber daya ikan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 03 Tahun 2013 Tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, bagi kapal perikanan yang akan berlayar dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. Persetujuan Berlayar adalah dokumen

negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan kepada setiap Kapal Perikanan yang akan berlayar meninggalkan Pelabuhan Perikanan dan pelabuhan lain yang ditunjuk setelah Kapal Perikanan telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan. Kapal perikanan yang berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan yang berukuran < 5 GT tidak wajib di terbitkan SPB nya, sedangkan yang berukuran > 5 GT s/d 30 GT wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal perikanan yang akan bertolak dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan. Berikut jumlah kapal yang berpangkalan di PPN Pengambengan sejumlah 388 Unit

NO	KATEGORI	ALAT TANGKAP	JUMLAH
1	< 5 GT	Gillnet, Pancing Ulur dll	288
2	6 - 10 GT	Purse Siene Dua Kapal	2
3	11 - 20 GT	Purse Siene Dua Kapal	18
4	21 - 30 GT	Purse Siene Dua Kapal	49
5	31 - 40 GT	Purse Siene Dua Kapal	39
			388

Jumlah Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan Syahbandar Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan pada tahun 2020 telah diterbitkan SPB sebanyak 3 dokumen kemudian Tahun 2021 sejumlah 32 dokumen. Pada awal bulan Desember telah terbit Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 59 Tahun 2020 sebagai pengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa kapal *purse seine* dua kapal yang sebelumnya tidak terakomodir pada permen 71 tahun 2016 akhirnya dapat terakomodir pada Permen 59 Tahun 2020 sehingga kapal *purse seine* yang ada di PPN Pengambengan dapat beroperasi di WPP 573. Saat ini proses perizinan dari kapal-kapal di PPN Pengambengan masih berjalan untuk bisa dikeluarkan SIPI sehingga nantinya penerbitan SPB bisa dilakukan. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada tabel 15 berikut ini:

Tabel 15. Data Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Tahun 2021

No	Bulan	Penerbitan SPB		Keterangan
		2020	2021	
1	Januari	0	0	Kapal Kapal dalam Proses Perizinan
2	Februari	1	0	Kapal Kapal dalam Proses Perizinan
3	Maret	2	0	Kapal Kapal dalam Proses Perizinan
4	April	0	0	Kapal Kapal dalam Proses Perizinan
5	Mei	0	8	Kapal Kapal dalam Proses Perizinan

6	Juni	0	12	Kapal Kapal dalam Proses Perizinan
7	Juli	0	0	Kapal Kapal dalam Proses Perizinan
8	Agustus	0	0	Kapal Kapal dalam Proses Perizinan
9	September	0	0	Kapal Kapal dalam Proses Perizinan
10	Oktober	0	0	Kapal Kapal dalam Proses Perizinan
11	November	0	0	Kapal Kapal dalam Proses Perizinan
12	Desember	0	12	Kapal Kapal dalam Proses Perizinan
Jumlah		3	32	

Selain penerbitan SPB kegiatan kesyahbandaran juga menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan yang merupakan kegiatan kapal pada saat melakukan aktifitas tambat, labuh dan bongkar di Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan. Berikut data penerbitan Tanda Bukti Lapor (STBL) Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan pada tabel dibawah ini.

Tabel 16. Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) Kapal Perikanan

No	Bulan	Kedatangan		Keberangkatan	
		2020	2021	2020	2021
1	Januari	110	863	115	856
2	Februari	214	962	220	970
3	Maret	244	962	273	963
4	April	655	974	665	993
5	Mei	363	924	363	922
6	Juni	415	918	429	899
7	Juli	293	1030	293	1023
8	Agustus	458	496	458	527
9	September	575	766	575	785
10	Oktober	120	1256	110	1257
11	November	97	820	113	770
12	Desember	44	791	58	786
Jumlah		3.588	10.762	3.672	10.751

Pada tahun 2021 penerbitan STBLK Kedatangan mengalami peningkatan dari tahun 2020 sekitar 200 % dan STBLK keberangkatan mengalami peningkatan

dari tahun 2020 sekitar 200 % dimana jumlah kapal tersebut diatas merupakan kapal yang melakukan aktifitas tambat, labuh dan bongkar di Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan. Selain itu kegiatan di Kesyahbandaran juga memeriksa *Log Book* Penangkapan Ikan dimana *Log Book* Penangkapan Ikan adalah laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian kapal penangkapan ikan. Setiap kapal perikanan yang memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan melakukan operasi penangkapan ikan dengan ukuran di atas 5 GT wajib melaksanakan logbook penangkapan ikan. Berikut data Logbook penangkapan ikan yang sudah diverifikasi dapat dilihat pada tabel 17 dibawah ini.

Tabel 17. Logbook Penangkapan Ikan di PPN Pengambengan Tahun 2021

No	Bulan	Logbook	
		2020	2021
1	Januari	71	103
2	Februari	152	169
3	Maret	160	215
4	April	454	16
5	Mei	252	6
6	Juni	265	9
7	Juli	206	2
8	Agustus	251	2
9	September	261	8
10	Oktober	245	8
11	November	251	14
12	Desember	296	14
Jumlah		2.864	566

Jumlah Logbook penangkapan ikan yang telah diperiksa/diverifikasi oleh petugas Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan pada tahun 2020 berjumlah 2.864 Logbook, pada tahun 2021 berjumlah 566 Logbook, mengalami penurunan sebesar 246 %. Penurunan ini disebabkan karena hanya 4 kapal yang sudah mempunyai ijin penangkapan yang lengkap karena kapal lain masih dalam proses perizinan.

Kegiatan kesyahbandaran juga mengakomodir kegiatan operasional KN.Lumba-lumba-18, dimana kapal syahbandar ini berlayar 1 (satu) kali dalam sebulan dengan jumlah personil 5 (lima) orang dalam rangka pemantauan lingkungan maritim dan pemantauan pencemaran limbah di WKOPP PPN Pengambengan. kegiatan kapal kesyahbandaran dalam mendukung tugas dan fungsi syahbandar yaitu :

1. Pemantauan aktifitas kapal kapal kolam pelabuhan serta lingkungan WKOPP PPN Pengambengan.
2. Pemantauan serta perlindungan lingkungan maritim serta pencemaran air laut di WKOPP PPN Pengambengan.
3. Melaksanakan pengukuran kedalaman secara berkala dikarenakan kolam pelabuhan PPN Pengambengan mengalami sedimentasi yang ekstrim.
4. Pengawasan kapal kapal dari luar pangkalan PPN Pengambengan yang akan melakukan aktifitas dikolam pelabuhan.

4.9 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pendapatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berpedoman pada PP Nomor 75 Tahun 2015 yang telah diubah dalam PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PPN Pengambengan pada tahun 2021 tercapai sebesar Rp. 536.936.054,- (*Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Puluh Empat Rupiah*) yang terdiri dari PNBP Umum sebesar Rp. 10.888.999,- dan PNBP Fungsional sebesar Rp. 526.047.055,-. Jika dibandingkan dengan target PNBP Fungsional sebesar Rp. 380.022.858,- sehingga capaian PNBP Fungsional sebesar 138,43%.

Pendapatan ini berasal dari pendapatan dari pengelolaan BMN (pendapatan penggunaan tanah, gedung, bangunan dan kendaraan, *cold storage*) serta pendapatan dari penjualan dan Pendapatan Jasa berupa jasa tambat labuh, jasa pas masuk, jasa kebersihan, listrik, es dan air. Jika dibandingkan dengan

penerimaan PNBP tahun 2020 sebesar Rp. 350.976.721,- maka penerimaan PNBP di tahun 2021 meningkat. Peningkatan PNBP ini dipengaruhi oleh adanya penerimaan dari penggunaan tanah oleh PT. Sarana Tani Pratama dan adanya perubahan aturan dari PP 75 tahun 2015 menjadi PP 85 tahun 2021 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga terdapat beberapa kenaikan pada tarif tersebut yang berpengaruh pada peningkatan PNBP pada tahun 2021. Selain itu adanya himbauan untuk membayar jasa pelabuhan sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak baik melalui media cetak maupun suara mampu meningkatkan PNBP. Perbandingan PNBP tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan pada tabel 18 berikut :

Tabel 18. Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNBP Tahun 2020 dan 2021.

No	Uraian	Target (Rp)		Realisasi (Rp)	
		2020	2021	2020	2021
A.	PNBP Umum	-	-	-	10.888.999
B.	PNBP Fungsional	289.737.604	380.022.858	350.976.721	526.047.056
1.	Jasa Kebersihan Pelabuhan	16.954.920	16.504.296	19.142.968	29.716.540
2.	Jasa Tambat labuh	23.213.000	26.010.500	32.450.000	53.149.912
3.	Jasa Pas Masuk	31.169.000	20.838.500	35.455.000	42.396.500
4.	Jasa Pengadaan Es	75.859.711	50.747.992	100.256.943	59.827.984
5.	Jasa pengadaan Air	6.448.475	9.782.625	10.794.975	14.283.125
6.	Jasa Penggunaan Listrik	19.641.584	17.628.750	24.178.584	21.826.350
7.	Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana	44.385.950	202.125.245	44.385.950	268.461.695
8.	Jasa Penggunaan Cold Storage	72.859.711	36.384.950	84.312.301	36.384.950
	Jumlah	289.737.604	380.022.858	350.976.721	536.936.054

Sedangkan jumlah Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) pada Tahun 2021 dapat dilihat di tabel 19.

Tabel. 19. Realisasi PNBP Tahun 2021

No	Uraian	Target	Realisasi
A	PNBP Umum	-	<u>10.888.999</u>
B	PNBP Fungsional		<u>526.047.056</u>
	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	<u>160.716.858</u>	<u>235.759.011</u>
1	Kebersihan	16.504.296	29.716.540
	- Kios/Los	1.615.600	1.669.600
	- Kendaraan bongkar/muat	4.274.000	4.274.000
	- Tanah	10.614.696	18.010.440
	- Kolam Pelabuhan	-	5.762.500
2	Pas Masuk	20.838.500	42.396.500
	- Kendaraan Roda 4	7.156.000	11.818.000
	- Kendaraan Roda 2	13.592.500	24.338.500
	- Kendaraan Roda 6	90.000	5.580.000
	- Kendaraan Roda 10	-	660.000
3	Tambat labuh < 30 GT	26.010.500	53.149.912
4	Air	9.782.625	14.283.125
5	Es	51.195.987	59.827.984
6	Cold Storage	36.384.950	36.384.950
	Pendapatan Jasa Lainnya	<u>17.628.750</u>	<u>21.826.350</u>
1	Listrik	17.628.750	21.826.350
	Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana	<u>201.677.250</u>	<u>268.461.695</u>
1	- Penggunaan tanah Pengembangan	178.434.000	178.621.500
	- Pemeliharaan Prasarana	22.490.750	88.268.875
2	Sewa Bangunan Semi Permanen	-	300.000
3	Sewa Dump Truck	-	74.820
4	Lapangan	752.500	1.196.500
	Jumlah	380.022.858	536.936.054

4.10 Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan

a. Rapat Koordinasi Terkait Keselamatan dan Keamanan Pendistribusian BBM

PPN Pengambengan mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Terkait Keselamatan dan Keamanan Pendistribusian BBM kegiatan ini diikuti oleh instansi terkait Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan, Satwas PSDKP Pengambengan, DanPos TNI AL Pengambengan, Pengelola SPBN serta nelayan pemilik kapal. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Pertemuan Nelayan PPN Pengambengan tanggal 24 November 2021. Salah satu kegiatan rutin kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan adalah melakukan *bunkering*, istilah khusus

yang dipakai untuk mengisi BBM. Kegiatan tersebut diatur dalam Marpol (*Marine Polution*) Bab 1- 6 yang menjelaskan soal polusi kelaut dengan berbagai aspeknya. Khusus mengenai pengisian BBM ke dalam kapal, IMO dan badan dunia yang kompeten lainnya juga membuat analisa terhadap kejadian oil spill (tumpahan minyak) akibat aktivitas bunkering sebagai berikut : (1) Kesalahan pelaksanaan tentang *loading rate* yang disepakati antara kapal dengan pengisi BBM (barge maupun truk tangka (2) Kesalahan pihak pengisi BBM yang merubah *loading rate* yang disepakati (3) Kesalahan pihak kapal tidak memeriksa secara berkala apakah *loading rate* yang mereka terima sesuai dengan yang sudah disepakati. (4) Kesalahan pihak kapal tidak memeriksa tangki mana yang diisi atau akan diisi. (5) Keterlambatan merespons alarm saat tangki mendekati penuh. Seperti umum diketahui di dunia pelayaran, tata cara dan lokasi pengisian BBM juga memiliki tingkat kesulitan dan resiko sesuai dengan lokasi pengisian BBM itu sendiri. Selain itu kasus pencemaran laut menjadi salah satu fokus untuk kelanjutan sumber daya perikanan di Indonesia. Maka dari itu pendistribusian BBM yang baik akan mencegah pencemaran maupun resiko kebakaran di kapal. Diharapkan setelah nelayan maupun pengurus kapal mengikuti sosialisasi ini dapat menerapkan cara pendistribusian BBM yang baik dan benar.





b. Sosialisasi PP No. 85 Th. 2021 Tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka adanya perubahan peraturan dari PP. 75 Tahun 2015 menjadi PP. 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di dalam PP 85 tahun 2021 terdapat beberapa perubahan/kenaikan tarif sehingga harus disosialisasikan kepada pengguna jasa. Peserta kegiatan Sosialisasi PNBP sebanyak 36 orang, terdiri dari instansi terkait, pelaku usaha dan nelayan di PPN Pengambengan. Melalui kegiatan ini diharapkan pengguna jasa dapat memahami dan melaksanakan kegiatan di PPN Pengambengan sesuai dengan aturan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021.





c. Kegiatan Rapat Koordinasi Keamanan Terpadu maupun Rapat Stake Holder

Demi menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan PPN Pengambengan dilaksanakan rapat-rapat baik rapat koordinasi tim keamanan terpadu maupun rapat stake holder. Rapat koordinasi tim keamanan terpadu dilaksanakan dalam rangka menjaga sinergitas antar instansi. Dalam hal ini dari instansi yang terlibat antara lain; Satpolair Jembrana, TNI – AL, Perbekel Desa Pengambengan, Perbekel Desa Tegalbadeng Barat, Babinsa Pengambengan, Bhabinkamtibmas Pengambengan, Satwas PSDKP Jembrana. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan keamanan dan ketertiban di PPN Pengambengan. Dengan adanya para pelaku usaha yang melakukan investasi khususnya para pedagang los pasar maupun pedagang musiman di PPN Pengambengan maka perlu diterapkan suatu aturan sehingga kegiatan di pelabuhan dapat berjalan tertib dan lancar. Selain itu dengan adanya tanah pelabuhan yang masih belum digunakan, maka dilakukan promosi terkait penggunaan tanah di PPN Pengambengan. Untuk mendukung kegiatan tersebut, PPN Pengambengan secara rutin melaksanakan kegiatan rapat stake holder untuk para pengguna jasa yang ada di kawasan PPN Pengambengan maupun investor yang akan berinvestasi di PPN Pengambengan.



Kegiatan Rapat Keamanan Terpadu



Kegiatan Rapat Stake Holder

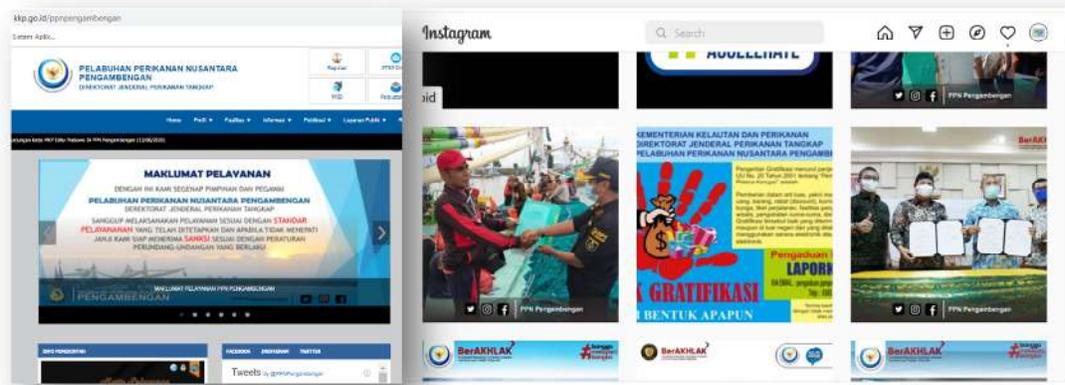
d. Kegiatan Pelaksanaan Kebersihan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan

Pelaksanaan Kebersihan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan dilaksanakan oleh tenaga outsourcing sebanyak 12 orang. Petugas kebersihan menangani areal pelabuhan seluas 13,5 ha dan fasilitas-fasilitas yang ada di pelabuhan. Kegiatan kebersihan rutin dilakukan setiap hari dan direkap dalam laporan bulanan K5.



e. Kegiatan Kehumasan

Dalam rangka meningkatkan citra PPN Pengambengan, Kegiatan kehumasan telah dilakukan oleh Tim Kehumasan PPN Pengambengan meliputi semua kegiatan yang dilaksanakan baik di PPN Pengambengan maupun di Pos Pelayanan PPN Pengambengan di Benoa. Dari hasil liputan tersebut Tim kehumasan menyampaikan kepada publik/masyarakat melalui twitter, instagram, facebook, website PPN Pengambengan. Dengan dipublikasikan semua kegiatan, maka masyarakat akan mengetahui kegiatan maupun perkembangan dari PPN Pengambengan.



4.11 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana PPN Pengambengan dalam rangka penyediaan fasilitas yang memadai untuk aktifitas perikanan yang efektif dan efisien dilakukan secara bertahap sejalan dengan Rencana Strategis yang telah disusun sebagai acuan dalam menetapkan program dan kegiatan. Pada tahun 2021 telah dilakukan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Tahap I dan Pembangunan Los Pasar melalui DIPA PPN Pengambengan. Saat ini di PPN Pengambengan perlu dibangun tempat docking kapal/pemeliharaan kapal karena selama ini pemilik kapal menggunakan lokasi tambat labuh sebagai tempat perbaikan kapal sehingga dapat mengganggu aktivitas bongkar ikan dan mengganggu aktivitas tambat labuh kapal.

Selain itu fasilitas dermaga utama PPN Pengambengan perlu dilakukan perbaikan karena kondisinya sudah mengalami korosif dan perlu segera dilakukan grouting agar dermaga dapat berfungsi dengan baik.

4.12 Penyerapan Tenaga Kerja

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan sebagai Unit pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan yang salah satu misinya adalah meningkatkan kualitas SDM Perikanan, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perikanan. Dalam rangka mewujudkan misi tersebut PPN Pengambengan berupaya membangun fasilitas dan sarana prasarana di pelabuhan yang dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan.

Jumlah tenaga kerja yang terserap di PPN Pengambengan terdiri dari instansi terkait dan para pelaku usaha sebanyak 6.108 orang dapat di sajikan pada Tabel 20 berikut ini :

Tabel 20. Penyerapan Tenaga Kerja pada Tahun 2021

No.	Unit Kerja	Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)	Keterangan
1.	UPT PPN Pengambengan	94	PNS 33 orang, ASN 3 orang, Tenaga kontrak 31 orang, Outsourcing 27 orang
2.	Dinas Perikanan (TPI)	14	
3.	POLAIR	14	
4.	TNI – AL	0	
5.	Satwas PSDKP	5	
6.	Adpel Perhubungan	2	
7.	Babinsa	1	
8.	Linmas	1	
9.	Nelayan/ABK Kapal	3.607	
10.	Pengurus Kapal	415	
11.	Panol/Buruh Pikul	1.250	

12.	Belantik (Penjual ikan)	125	
13.	Pedagang (Kios nelayan) dan Los Pasar Terbuka	150	
14.	PT. Dua Berjaya (SPBN)	10	
15.	Pengemudi Truk Angkut Ikan	154	
16.	Tukang Ojek	25	
17.	Montir/Tukang Las	4	
18.	Supplier Es dan pekerja	20	
19.	PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Pengambengan	2	
21.	Pengurus Perahu	84	
22.	Gudang penyimpanan peralatan perahu	6	
23.	Toko penyedia Sparepart	6	
24.	Pencari sisik ikan	4	
25.	Pengumpul minyak ikan	5	
26.	Armada pengangkut ABK perahu	40	Dari darat ke laut
27.	Armada pengangkut es dan garam	40	Dari darat ke laut
28.	Pedagang musiman	12	
29.	Crew Alat Penghancur Es	4	
30.	Pensuplai garam dengan truk	4	
31.	Pembeli dari pihak UPI	10	
Jumlah		6.108	

4.13 Investasi

Dalam rangka optimalisasi penggunaan tanah dan bangunan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan membutuhkan investor yang dapat mendorong peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan investasi. Untuk menunjang hal tersebut PPN Pengambengan telah

melakukan promosi melalui pameran terkait potensi yang ada di PPN Pengambengan sebagai stimulus untuk mendorong investasi di PPN Pengambengan. Selain itu untuk peningkatan investasi, PPN Pengambengan juga melaksanakan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana sebagai fungsi pelabuhan perikanan sebagai penyedia fasilitas – fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan peluang usaha yang sebesar-besarnya bagi investor baik pihak swasta, koperasi, KUB dan pelaku ekonomi lainnya.

Daftar nama investor yang masuk di Kawasan PPN Pengambengan Tahun 2021 dapat dilihat di tabel 21.

Tabel 21. Investor yang sudah masuk PPN Pengambengan

No	Nama	Usaha	Luas Areal	Jumlah Pengguna
1.	PT. Dua Berjaya	SPBN 16 ton/hari	838 m ²	1
2.	Pemkab Jembrana	Cold Storage, Pabrik Es, Dock/Slipway	6.100 m ²	1
3.	PT. Cilacap Samudra Fishing Industry	Cold Storage, Pabrik Es, Pengalengan Ikan, Galangan Kapal	25.000 m ²	1
4.	H. Ali Nuri	Gudang Peralatan	780 m ²	1
5.	Pertokoan	Penyedia Kebutuhan Nelayan	605 m ²	28
6.	Mina Boga Pengambengan	Penyedia Kebutuhan Nelayan	1.068 m ²	26

4.14 Kegiatan Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menunjang operasional PPN Pengambengan di butuhkan fasilitas / sarana yang meliputi Fasilitas Pokok, Fungsional dan Penunjang, seperti tersaji pada tabel 22 dibawah ini :

Tabel 22. Keragaan sarana dan prasarana

NO	NAMA FASILITAS	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
A	FASILITAS POKOK			
1	Areal Pelabuhan (Lahan)	13.5	Ha	12,1 Ha sudah sertifikasi, 1,4 Ha masih menjadi milik Provinsi.

2	Dermaga	181 X 7	m	Dermaga utama
3	Jetty (2 buah)	65 X 4	m	Dermaga
4	Penahan Gelombang (Break water)	1.627	m	Sisi Kanan 743 ; Sisi Kiri 884
5	Kolam Pelabuhan (Alur Pelayaran)	15,5	Ha	-
6	Jalan Lingkungan	13.815	m ²	Lebar 7 M
7	Drainase	1.738	m ²	-
8	Groin sisi kiri	350	m	-
9	Turap Beton	395	m	-
10	Groin sisi kanan	26	M2	-
B FASILITAS FUNGSIONAL				
1	Gedung TPI	1.361	m ²	320 M ² TPI 1, 72 M ² TPI 2, 80 M ² TPI 3, TPI Higienis 889 M ² (dibangun oleh Dit.Pelabuhan Perikanan Ditjen Perikanan)
2	Kantor Pelabuhan	240	m ²	-
3	Gedung Pelayanan Terpadu	585	m ²	
4	Kantor Bina mutu	100	m ²	-
5	Menara air	74,5	m ³	-
6	Bangsai perbaikan jaring	400	m ²	-
7	Guest House	110	m ²	-
8	Gudang	30	m ²	-
9	SPBN	16	Ton/hari	-
10	Instalasi Listrik	427	Kva	-
11	Cold Storage	126.8	m ²	Dibangun oleh Ditjen Penguatan Daya Saing KP
C	IFM	5	Ton/hari	
1 FASILITAS PENUNJANG				
2	Mess Operator	246	m ²	3 Unit
3	Balai pertemuan nelayan	250	m ²	-
4	WC. Umum	19.5	m ²	-
5	Tempat ibadah (pura)	145	m ²	-
6	Pertokoan	605	m ²	-
7	Musholla	98	m ²	Areal PPN Pengambengan

Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pemeliharaan rutin fasilitas yang ada di Pelabuhan, dengan mengedepankan fasilitas yang benar-benar rusak

hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran pemeliharaan tahun 2021 di PPN Pengambengan. Pada tahun 2021 di PPN Pengambengan dilakukan pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu dan Pertokoan Akomodasi Nelayan dimana alokasi anggaran dari DIPA Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.



Gedung Pelayanan Terpadu



Pertokoan Akomodasi Nelayan



BAB V

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA

BAB V

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA

5.1. Permasalahan

Pelabuhan Perikanan sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang Prasarana yang memiliki tugas pokok dan fungsi serta operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan lebih mengutamakan Pelayanan Masyarakat (Public Service), menggerakkan perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Memperhatikan capaian Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan yang secara substansi sudah berjalan dengan baik meskipun belum mencapai sasaran yang maksimal, semua itu tidak terlepas dari berbagai permasalahan teknis maupun non teknis yang dihadapi unit kerja dalam mempertahankan eksistensi kesinambungannya.

Dalam pelaksanaan tugasnya ada beberapa permasalahan operasional yang dihadapi dan seringkali menjadi penghambat bagi kelancaran operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan antara lain :

A. Kelompok Kesyahbandaran

1. Fasilitas gedung pelayanan kesyahbandaran belum memenuhi standar untuk pelayanan publik sehingga:
 - a. Standar Operasional Prosedur Pelayanan tidak berjalan optimal.
 - b. Tingkat kepuasan pengguna jasa dalam menerima pelayanan kurang baik.
2. Kapal Penangkap Ikan *Purse seine* (slerek) di PPN Pengembangan yang menggunakan 2 (dua) kapal yang masih belum berizin terkendala masalah peraturan terkait perizinan sehingga:
 - a. Kapal belum memiliki dokumen perizinan (SIUP/SIPI)
 - b. Tidak dapat diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) serta berdampak pula pada produk layanan kesyahbandaran lainnya.

3. Kedalaman kolam labuh sudah mengalami pendangkalan yang signifikan yang mengakibatkan:
 - a. Kapal dengan ukuran > 30 GT kesulitan untuk melakukan aktivitas bongkar muat.
 - b. Armada kapal dari PU. Benoa mengalami kesulitan masuk ke kolam labuh PPN Pengambengan.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat nelayan akan kepemilikan Asuransi untuk perlindungan kerja dan jaminan sosial yang dapat memberikan jaminan dan perlindungan apabila terjadi kecelakaan bagi nelayan.
5. Terbatasnya jumlah syahbandar dan petugas kesyahbandaran guna mendukung kegiatan pelayanan kesyahbandaran sehingga berakibat pelayanan baik administrasi maupun di lapangan kurang optimal.
6. Belum adanya fasilitas perbaikan kapal yang memadai sehingga mengakibatkan:
 - a. Nelayan melakukan perbaikan di areal bongkar muat kapal.
 - b. Terganggunya aktivitas operasional pelabuhan.

B. Kelompok Tata Kelola dan Pelayanan Usaha

1. Kapasitas garasi kendaraan dinas kurang mencukupi mengakibatkan :
 - a. Sebagian kendaraan dinas tidak mempunyai tempat parkir yang layak.
 - b. Perawatan kendaraan akan meningkat.
 - c. Umur ekonomis kendaraan akan lebih pendek dari yang semestinya.
2. Kondisi jalan lingkungan di pelabuhan saat ini sudah mulai rusak yang mengakibatkan keamanan dan kenyamanan berlalu lintas di areal pelabuhan terganggu.
3. Fasilitas perbaikan kapal yang sudah tersedia (milik Pemda Jembrana) tidak dapat dimanfaatkan sehingga :
 - a. Fasilitas yang dibangun mengalami kerusakan.
 - b. Hilangnya potensi PNBP dari tanah yang seharusnya bisa dipergunakan untuk kegiatan yang lain.
4. Belum tersedianya Gedung Pelayanan Terpadu sehingga :

- a. pelayanan pada pengguna jasa tidak melewati satu pintu.
- b. Pelabuhan belum bisa melakukan pelayanan publik secara prima.
5. Belum adanya pagar kawasan pelabuhan yang mengakibatkan :
 - a. Resiko ketidakamanan di pelabuhan meningkat.
 - b. Optimalisasi PNBP menurun karena saat ini masih banyak pintu masuk/jalan tikus menuju pelabuhan sehingga pas masuk banyak yang tidak terpungut.
 - c. Batas-batas wilayah pengelolaan pelabuhan menjadi tidak jelas.
 - d. Pengawasan K5 di WKOPP PPN Pengambengan kurang optimal.
6. Kapasitas mesin produksi IFM kurang dan dengan meningkatnya nilai faktor X sehingga harga es menjadi lebih mahal dari Rp. 340,-/kg menjadi Rp. 662,-/kg, sehingga permintaan konsumen menurun hal ini berpengaruh pada potensi penerimaan PNBP menjadi tidak optimal.
7. Kondisi Los Pasar PPN Pengambengan sudah tidak representative sehingga :
 - a. Lingkungan los pasar menjadi kumuh yang mengakibatkan timbulnya resiko penyakit dan mengganggu kemandirian, ketertiban, kebersihan, keindahan lingkungan.
 - b. Meningkatnya potensi penyalahgunaan fungsi fasilitas pelabuhan.
 - c. Kenyamanan pengguna jasa dan pengunjung los pasar terganggu.
8. Kondisi dermaga yang mengalami kerusakan pada titik-titik tertentu sehingga dapat membahayakan kegiatan operasional pelabuhan.
9. Fasilitas penerangan pelabuhan yang belum optimal, karena :
 - a. Solar cell banyak yang rusak dan biaya perawatan terlalu tinggi sehingga tidak terakomodir pada anggaran perawatan jaringan.
 - b. Belum adanya lampu navigasi kolam pelabuhan sehingga saat ini nelayan hanya mengandalkan lampu dermaga sebagai tanda masuk kolam pelabuhan.
 - c. Meningkatnya resiko keamanan pada saat malam hari.
 - d. Perlu adanya penambahan *crane* untuk penunjang kegiatan perbaikan jaringan listrik, operasional bongkar muat, pemangkasan tanaman/pohon.

10. Kedalaman Kolam Labuh belum memenuhi standar operasional untuk PPN yakni minus 3 meter, sedangkan kedalaman kolam labuh saat ini minus 0,5 meter berdasarkan hasil pengukuran secara mandiri dan manual pada tahun 2018 yang mengakibatkan :
 - a. Akses masuk dan olah gerak kapal terganggu.
 - b. Kapal tidak dapat melakukan tambat dan bongkar di beberapa titik dermaga sehingga kegiatan bongkar muat tidak optimal.
11. Belum optimalnya penggunaan tanah industri Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan, yakni dengan adanya tanah pelabuhan yang belum digunakan yakni sekitar 2,6 Ha yang berpotensi meningkatkan PNBK.
12. Adanya tanah milik PPN Pengambengan yang masih dikelola dan disewakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yakni SPBN PT. Dua Berjaya, hal ini dikarenakan masa perjanjian sewa tanah oleh PT. Dua Berjaya dan Pemerintah Propinsi Bali tahun 2005-2025 dimana pada saat penandatanganan kontrak status PPN Pengambengan masih milik Pemerintah Provinsi Bali.
13. Penggunaan tanah oleh PT. Cilacap Samudera Fishing Industry seluas 2,5 Ha tidak optimal dikarenakan :
 - a. Sesuai dengan perjanjian kontrak jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah processing pembekuan ikan, Cold Storage, Pabrik pengalengan ikan, fish mill dan galangan kapal serta docking kapal, namun dalam perjalanan kegiatan yang dilaksanakan adalah processing pembekuan ikan, Cold Storage, galangan kapal serta docking kapal.
 - b. Sejak tahun 2015 PT. Cilacap Samudera Fishing Industry sudah tidak beroperasi dikarenakan adanya pembenahan kebijakan pemerintah terkait perikanan tangkap.
14. Kurangnya koordinasi antara petugas syahbandar dan petugas tambat labuh dalam sinkronisasi data sehingga sering terjadi perubahan tagihan tambat labuh.

C. Kelompok Operasional Pelabuhan

1. Masih kurangnya kesadaran nelayan/pengusaha penangkap ikan untuk melakukan penanganan ikan diatas kapal baik saat penangkapan maupun pada saat bongkar secara baik sehingga mutu ikan tidak terjaga dengan baik.
2. Belum sesuai perbandingan jumlah kapal yang mendaratkan Hasil tangkapan dengan jumlah petugas enumerator dan petugas inspeksi sehingga perlu adanya penambahan SDM dari segi kualitas maupun kuantitas mengingat pada tahun 2023 diberlakukannya pemungutan PNBP Pasca Produksi.
3. Belum tersedianya alokasi anggaran yang cukup untuk biaya lembur enumerator dan petugas inspeksi pembongkaran ikan di hari libur.
4. Kegiatan pendistribusian hasil tangkapan dari TPI ke UPI (Unit Pengolahan Ikan) yang berada disekitar pelabuhan belum menerapkan metode yang higienis sehingga :
 - a. Sistem rantai dingin tidak terlaksana dengan baik.
 - b. Banyak ikan yang berjatuhan dan limbah penanganan ikan yang berjatuhan di sepanjang jalur distribusi sehingga mengakibatkan bau yang menyengat dan jalanan menjadi licin.
 - c. Ikan terkena sinar matahari langsung.
5. Belum tersedianya server sebagai bank data yang memadai untuk keperluan penyimpanan data pelabuhan berbentuk file elektronik.

D. Kelompok Tata Usaha

1. Belum adanya gudang arsip mengakibatkan :
 - a. pengarsipan dokumen tidak optimal karena tempat penyimpanan arsip belum memenuhi SOP.
 - b. Pengklasifikasian arsip belum sistematis.
2. Adanya tanah/kawasan Pelabuhan yang masih menjadi milik Pemerintah Provinsi Bali (belum dihibahkan ke KKP) seluas 1,4 Ha yang mengakibatkan :
 - a. Proses pengawasan kegiatan K5 tidak berjalan dengan optimal.

- b. Pelabuhan tidak dapat memungut PNBPN sehingga penerimaan PNBPN tidak maksimal.
 - c. Tidak dapat melakukan pemeliharaan gedung/bangunan diatas tanah tersebut.
 - d. Pengelolaan kawasan pada tanah tersebut tidak dapat masuk dalam perencanaan program pelabuhan baik pembangunan fasilitas maupun prasarana diatasnya.
3. Kurangnya SDM Satpam dan kebersihan yang mengakibatkan kegiatan keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan keselamatan kerja (K5) tidak berjalan dengan efektif.
 4. Kurangnya SDM Pengelola Keuangan yang mengakibatkan kelebihan beban kerja di satu jabatan.
 5. Kurang SDM Teknik Sipil, Arsitek dan Hukum mengakibatkan perlu pendampingan teknis dalam menyusun perencanaan Konstruksi.

5.2 Pemecahan Masalah

A. Kelompok Kesyahbandaran

1. Pada TA. 2021 telah dibangun gedung pelayanan terpadu yang lebih representative untuk pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan yang lebih cepat, nyaman dan mudah.
2. Berkoordinasi dan bersinergi dengan Direktorat terkait di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap maupun Dinas Perikanan Provinsi Bali terkait kendala penerbitan buku kapal yang mengakibatkan SIPI tidak bisa diterbitkan
3. Berkoordinasi dengan Direktorat Pelabuhan terkait permasalahan pendangkalan kolam pelabuhan yang massif dan menginformasikan kepada pemilik kapal informasi pasang surut setiap hari di kolam pelabuhan serta titik titik rawan kandas di kolam pelabuhan.
4. Memberikan sosialisasi tentang fungsi dan manfaat asuransi kepada nelayan serta meneruskan Perjanjian Kerjasama yang sudah dibuat antara PPN Pengambengan dan BPJS Ketenagakerjaan tentang program jaminan asuransi untuk nelayan.

5. Pada tahun 2021 terdapat petugas syahbandar yang telah mengikuti Diklat dasar-dasar Kesyahbandaran dan telah dilantik menjadi Syahbandar, namun demikian masih diperlukan lagi diklat kesyahbandaran untuk petugas syahbandar yang belum mengikuti sebagai upaya untuk optimalisasi pelayanan Kesyahbandaran di PPN Pengambengan.
6. Memberikan sosialisasi dan himbauan kepada nelayan tentang zonasi yang telah dibuat kepada nelayan agar mematuhi aturan yang telah dibuat.

B. Kelompok Tata Kelola dan Pelayanan Usaha

1. Mengusulkan kegiatan untuk pembuatan garasi kendaraan roda empat.
2. Mengusulkan peningkatan kualitas jalan lingkungan pelabuhan dengan menggunakan beton.
3. Mengusulkan pembangunan docking/ tempat perbaikan kapal pada zona yang telah ditentukan.
4. Pada TA. 2021 dilakukan pembangunan kantor pelayanan terpadu sehingga bisa mengakomodir semua pegawai dan pelayanan dapat berjalan dengan lancar.
5. Mengusulkan pembangunan pagar kawasan pelabuhan.
6. Mengusulkan peningkatan kapasitas mesin IFM dari 5 ton/hari menjadi 10 ton/hari.
7. Pada TA. 2021 dilakukan renovasi Los Pasar di PPN Pengambengan.
8. Melakukan pengecekan pada titik-titik dermaga yang mengalami kerusakan dan segera mengusulkan anggaran untuk perbaikan dermaga.
9. Mengusulkan pemasangan jaringan/instalasi penerangan jalan dan dermaga dan penambahan fasilitas *crane* untuk kegiatan operasional di pelabuhan.
10. Mengusulkan pengerukan kolam labuh.
11. Melakukan promosi terkait tanah industri yang bisa digunakan oleh investor di PPN Pengambengan melalui pameran.
12. PT. Dua Berjaya telah melakukan perjanjian penggunaan tanah dengan PPN Pengambengan sehingga penerimaan PNBP dari penggunaan tanah oleh PT Dua Berjaya dapat diterima oleh PPN Pengambengan.

13. Melakukan evaluasi terhadap penggunaan tanah industry oleh PT. Cilacap Samudera Fishing Industry.

C. Kelompok Operasional Pelabuhan

1. Mengusulkan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) kepada nelayan/pengusaha penangkap ikan pentingnya menjaga mutu hasil perikanan.
2. Mengusulkan penambahan petugas enumerator di PPN Pengambengan.
3. Mengusulkan alokasi anggaran untuk biaya lembur enumerator dan petugas inspeksi pembongkaran ikan.
4. Mengusulkan kegiatan Sosialisasi system rantai dingin kepada Sopir Truck pengangkut ikan dan Unit Pengolah Ikan.
5. Mengusulkan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana keperluan Penyimpanan data.

D. Kelompok Tata Usaha

1. Pada TA. 2021 telah dibangun Gedung Pelayanan Terpadu dimana didalamnya telah terakomodir untuk ruang arsip.
2. Melaksanakan koordinasi dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dan Badan Pengelolaam Keuangan dan asset Daerah Provinsi Bali untuk proses hibah dari Pemerintah Provinsi Bali ke Kementerian Kelautan dan Perikanan agar pengelolaan lahan seluas 1,4 Ha lebih optimal.
3. Penambahan jumlah SDM Pengelola keuangan, kebersihan dan satpam.
4. Perlu adanya penambahan Sumber Daya Manusia yang mengisi jabatan Teknik Sipil, Arsitek dan Hukum sehingga kegiatan penyusunan perencanaan konstruksi di PPN Pengambengan dapat lebih optimal.



BAB VI

PROGRAM KERJA DAN RENCANA PENGEMBANGAN PPN PENGAMBENGAN TA. 2022

BAB VI
PROGRAM KERJA DAN RENCANA PENGEMBANGAN
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGEMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

PPN Pengambengan diharapkan dapat mendukung program KKP yang merujuk pada Visi Misi Presiden RI 2019-2024. Khususnya mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur di bidang Perikanan serta melakukan reformasi Birokrasi.

Fasilitas Pokok, Fasilitas Fungsional maupun Fasilitas Penunjang masih perlu dikembangkan serta dilakukan pemeliharanya, antara lain pengerukan kolam labuh, peningkatan kualitas jalan pelabuhan, Pengadaan alat-alat laboratorium. Untuk itu, ketersediaan anggaran pembangunan untuk kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi masih sangat dibutuhkan setiap tahunnya.

Pada tahun 2022, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 14.434.635.000,- (*Empat Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*) yang terdiri dari 2 (dua) program yaitu

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
2. Program Dukungan Manajemen

Tabel 23. Program/Kegiatan serta Anggaran Tahun 2022

**RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE	JENIS PENGELUARAN	Anggaran
		(Rp)
1	2	4
		14.434.635.000
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	5.375.458.000
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	126.000.000
2337.ACA	Perizinan Produk	100.000.000
2337.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	13.000.000
2337.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	13.000.000
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	5.183.138.000
2338.BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	1.234.800.000
2338.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	3.948.338.000
2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	8.000.000
2339.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	8.000.000
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	58.320.000
2341.QKB	Pemantauan produk	58.320.000
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen	9.059.177.000
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	9.059.177.000
2342.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8.768.037.000
2342.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	52.000.000
2342.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	239.140.000



BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian dan pembahasan tentang realisasi kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan selama tahun 2021, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

7.1. Kesimpulan

- a. Pendaratan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan pada tahun 2021 mencapai 14.764 Ton, atau rata-rata produksi sebesar 49,54 Ton/hari atau mengalami penurunan sebesar 23,94 % apabila di bandingkan dengan pendaratan ikan pada tahun 2020 mencapai 19.410 Ton dengan rata-rata produksi 63,64 ton/hari. Penurunan produksi ini disebabkan karena adanya kondisi cuaca buruk di beberapa bulan sehingga kapal-kapal fiber dan *purse seine* tidak banyak melaut.
- b. Kunjungan kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan pada tahun 2021 adalah sebanyak 6.902 kali. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 7.316 kali, maka mengalami penurunan sebesar 5,66%.
- c. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di PPN Pengambengan belum dapat diterbitkan untuk semua kapal yang beraktifitas berangkat, hal ini dikarenakan perizinan kapal slerek masih terhambat aturan terkait penerbitan buku kapal terkait jumlah mesin yang bisa terakomodir dalam buku kapal maksimal 2 unit sedangkan rata rata jumlah mesin kapal *purse seine* 2 kapal yaitu $\pm 2 - 4$ unit sehingga masih menunggu regulasi terkait.
- d. Jumlah pengusaha yang menggunakan tanah dan/bangunan di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan adalah sebanyak 31 pelaku usaha.
- e. Realisasi penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 536.936.054,- dimana dari PNBP Umum sebesar Rp. 10.888.999,- dan PNBP Fungsional sebesar Rp. 526.047.056,- atau tercapai

- sebesar 138,43% dari target PNBPN Fungsional yang ditetapkan sebesar Rp. 380.022.858,-. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan PNBPN Fungsional sebesar Rp. 350.976.721,- maka mengalami peningkatan sebesar 49,88%.
- f. Dengan adanya perubahan nilai faktor X atas pelayanan pengadaan es mengakibatkan harga es naik dari Rp. 340,-/kg menjadi Rp. 662,-/kg sehingga berpengaruh pada menurunnya penjualan es di IFM. Penerimaan PNBPN hasil penjualan es pada tahun 2021 sebesar Rp. 59.827.984,- atau menurun sebesar 40,32% dari penerimaan tahun 2020 sebesar Rp. 100.256.943,-. Penyediaan es dari IFM ini hanya dapat melayani konsumen untuk pedagang ikan dan kapal-kapal kecil karena keterbatasan daya mesin untuk memproduksi es sehingga diperlukan penambahan kapasitas mesin untuk produksi es di IFM agar dapat melayani seluruh konsumen di PPN Pengambengan.
 - g. Penerimaan PNBPN dari jasa penggunaan *cold storage* sebesar Rp. 36.384.950,- atau memberikan kontribusi 9,57% dari target PNBPN yang telah ditentukan. Jika dibandingkan dengan penerimaan *cold storage* tahun 2020 sebesar Rp. 84.312.301,- maka pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 56,84%.
 - h. Perlu pengembangan/perbaikan fasilitas yang dibutuhkan antara lain ; (1) Pagar kawasan, (2) tempat pemeliharaan kapal/docking kapal, (3) Pengerukan kolam labuh sehingga operasional pelabuhan dapat berjalan lancar.
 - i. Realisasi Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan pada tahun 2021 sebesar Rp 15.305.325.117,- dari pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 15.571.441.000 atau mencapai 98,29% namun realisasi fisik sebesar 100 %.
 - j. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat telah dibangun Kantor Pelayanan Terpadu yang dilakukan secara bertahap dimana saat ini telah siap digunakan pada lantai 1 sedangkan lantai 2 masih menunggu pembangunan.
 - k. Telah dilakukan pembangunan kios pasar pada TA. 2021 sehingga fasilitas los pasar semakin lebih baik dari sebelumnya.
 - l. Telah dilakukan koordinasi dengan Pusat terkait dokumen pinjam pakai atas aset Pemerintah Propinsi Bali yang digunakan oleh PPN Pengambengan, namun sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjut dari Pusat.

7.2. Saran

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Tahun 2021 kami dapat memberikan saran sebagai berikut :

- a. Kegiatan yang perlu dilaksanakan berdasarkan rencana prioritas adalah sebagai berikut : pembangunan pagar kawasan, pengerukan kolam labuh, peningkatan kualitas jalan pelabuhan, unit pengolahan air bersih, pengelolaan IPAL di wilayah pelabuhan.
- b. Telah dibangun Gedung Pelayanan Terpadu dan Pertokoan/Kios Penyedia Akomodasi Nelayan dalam rangka peningkatan fasilitas di pelabuhan.
- c. Perlu adanya publikasi tentang PPN Pengambengan yang dapat menarik investor untuk membuka usaha di kawasan PPN Pengambengan karena adanya peluang investasi yang sangat besar pada pengoperasian pabrik es, cold storage, perusahaan pengolahan dan perusahaan penangkapan.
- d. Pemanfaatan anggaran seoptimal mungkin, apabila ada sisa anggaran dari suatu kegiatan supaya dapat di revisi sehingga bisa untuk menjadi anggaran dari kegiatan yang lain/baru yang lebih bermanfaat bagi stakeholder.
- e. Koordinasi secara intensif terkait proses serah terima lahan seluas 1,4 Ha dari Pemerintah Provinsi Bali kepada pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan.



BAB VIII

PENUTUP

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Tahun 2021 Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan ini disusun sebagai bahan informasi, evaluasi dan pertimbangan dalam memberikan petunjuk pelaksanaan tugas serta mengambil kebijakan, pengembangan dan operasional yang lebih baik di waktu yang akan datang.

Harapan kami, melalui Laporan Tahunan Tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan menjadi perhatian dalam mengambil keputusan di tingkat Pusat dan Daerah.



**LAPORAN TAHUNAN
POS PELAYANAN
KAPAL PERIKANAN
DI BENOA
2021**



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia yakni 17.504 pulau dan memiliki garis pantai terpanjang nomor 2 (dua) di dunia dengan panjang 99.093 km, oleh karena itu Indonesia dikenal dengan negara kepulauan. Selain itu secara geo-politik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis karena berada di antara benua Asia dan Australia, serta diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam konteks perdagangan global (*the global supply chain system*) yang menghubungkan kawasan Asia Pasifik dengan Australia.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki perairan laut seluas 5,8 juta km². Begitu banyak dan beragam potensi sumber daya dari perairan laut yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia seperti usaha perikanan tangkap, pariwisata bahari, jasa kelautan, industri maritim, dan benda berharga peninggalan sejarah di laut. Potensi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12.541.438 ton yang tersebar di perairan wilayah Indonesia. Dari seluruh potensi sumberdaya ikan tersebut, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 10.033.183 ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sebesar 8.155.233 ton pada tahun 2016 atau baru 81% dari JTB (Kepmen KP, 2017).

Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diberi mandat untuk melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia. Visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Adapun Visi KKP 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera, dan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan riset Kelautan dan Perikanan;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Merujuk pada bisnis proses perikanan tangkap yang terdiri dari ; kelestarian sumberdaya ikan, sarana, prasarana, dan pelaku usaha, maka Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) harus dapat mengelola keempat unsur tersebut agar dapat membantu pencapaian visi KKP. Untuk itu DJPT perlu melakukan pembentukan UPT Pelabuhan Perikanan sebagai perpanjangan tangan dalam mengelola keempat unsur tersebut di sentra kegiatan perikanan tangkap. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan dijelaskan bahwa pelabuhan perikanan memiliki 2 (dua) fungsi yaitu: pemerintahan dan pengusahaan. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan sebagai salah satu UPT pelabuhan perikanan merupakan upaya untuk melindungi bangsa Indonesia khususnya nelayan agar merasa aman dalam melaksanakan usaha perikanan di lingkungan UPT pelabuhan perikanan.

Saat ini di Pelabuhan Umum Benoa, terdapat sebagian kapal perikanan yang melakukan bisnis proses perikanan tangkap di pelabuhan umum yang bukan kewenangan KKP. Ukuran kapal perikanan yang melakukan bisnis proses di

pelabuhan umum tersebut terbilang cukup besar sampai dengan 200 GT, dengan jenis hasil tangkapan ekonomis tinggi dan jumlah hasil tangkapan yang besar. Sampai saat ini, pendataan, pelayanan dan pengelolaan usaha perikanan tangkap masih belum berjalan optimal di pelabuhan umum. Oleh karena itu, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan mendirikan Pos Pelayanan Kapal Perikanan sebagai upaya untuk mengoptimalkan kegiatan pendataan, pelayanan dan pengelolaan usaha perikanan tangkap di Pelabuhan Umum Benoa.



BAB II

KERAGAAN POS PELAYANAN KAPAL PERIKANAN DI BENOA

BAB II

KERAGAAN POS PELAYANAN KAPAL PERIKANAN DI BENOA

2.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan.
5. Peraturan Menteri KP Nomor. 33/PERMEN-KP/2017 tentang Pelayanan Publik.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terbaru PER.13/MEN/2012 yang merevisi PER. 28/MEN/2009 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas.
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2014 tentang Logbook Penangkapan Ikan.
10. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 11/PER-DJPT/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Logbook Penangkapan Ikan
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. PER. 019/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.

13. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No.18/KEP-DJPT/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Inspeksi Pembongkaran Ikan di Pelabuhan Perikanan.
14. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor:84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan.
15. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor KEP.08/KEP-DJPT/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Skema Dokumentasi Hasil Tangkapan (*Catch Documentation Scheme*) Tuna Sirip Biru Selatan (*Southern Bluefin Tuna*).
16. Dokumen sewa tanah dan gedung
Surat CEO Regional Banyuwangi, Bali, Nusra Nomor PJ.06/97/RBNT-2018 tentang Persetujuan Penggunaan Baru Bagian Tanah HPL Pelabuhan Benoa, tertanggal 09 November 2018.

2.2 Sejarah Pembentukan Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa

Pada awalnya dibentuk Unit Pelayanan SHTI UPT PPN Pengambengan sebagai pelaksanaan dari terbitnya *European Council (EC) Regulation No. 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing* yang diadopsi ke dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER. 28/MEN/2009 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan, sehingga dalam waktu sesegera mungkin produk perikanan yang didaratkan di Pelabuhan Umum Benoa khususnya yang memiliki tujuan ekspor Uni Eropa harus dilengkapi dengan Dokumen Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI).

Pelayanan SHTI sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terbaru PER.13/MEN/2012 yang merevisi PER. 28/MEN/2009 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan, merupakan kegiatan dalam rangka memenuhi persyaratan perdagangan hasil perikanan ke Uni Eropa dan dalam rangka mencegah, mengurangi, dan memberantas kegiatan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, perlu meningkatkan penelusuran hasil tangkapan ikan oleh kapal penangkap ikan Indonesia dan kapal penangkap ikan asing.

Pelaksanaan pelayanan SHTI untuk wilayah Pelabuhan Umum Benoa, berlangsung dari awal tahun 2010. Kepala PPN Pengambengan (Ir. A.H. Tampubolon) sekaligus ditunjuk sebagai Otoritas Kompeten Lokal PPN Pengambengan untuk Pelayanan Benoa berdasarkan Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap. Unit Pelayanan SHTI dilaksanakan secara bergiliran dengan jadwal piket mingguan diantara Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Seksi Tata Operasional. Seiring berjalan waktu, mengingat keterbatasan anggaran dan efisiensi kinerja yang dilaksanakan, ditetapkan 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil untuk secara tetap menjalankan pelayanan yang ada, namun tetap dibantu beberapa pegawai yang secara bergiliran membantu pelayanan setiap minggu.

Kantor awal Unit Pelayanan SHTI bertempat di rumah yang disewa di Jl. Pendidikan, Sidakarya, selama kurang lebih 1 tahun. Mengingat tingkat urgensi penerbitan SHTI yang menuntut jarak yang lebih dekat bagi Pelaku Usaha Perikanan di Pelabuhan Umum Benoa, maka di tahun 2011 kantor Unit Pelayanan SHTI berpindah ke Mess Pegawai Pelindo III Pelabuhan Umum Benoa, hingga 2012. Munculnya peraturan baru di internal Pelindo terkait pemanfaatan mess pegawai, mengakibatkan Kantor Unit Pelayanan SHTI berpindah lagi dengan menggunakan salah satu gedung di dalam area Satker PSDKP Pelabuhan Umum Benoa dari tahun 2013 hingga pertengahan 2014.

Mengingat jenis dan volume pelayanan yang diberikan kian bertambah sehingga memerlukan ruang yang lebih besar, serta adanya usulan kerjasama dari Loka Penelitian Tuna Benoa untuk meminjamkan sebagian ruangan kantornya karena pihak Loka Penelitian Tuna Benoa telah memiliki kantor baru, akhirnya kantor pelayanan berpindah lagi menempati sebagian ruangan kantor milik Loka Penelitian Tuna Benoa, yang ternyata hanya bisa dipergunakan hingga akhir Desember 2014.

Semakin pentingnya layanan terkait perikanan tangkap bagi pelaku usaha Perikanan di Pelabuhan Umum Benoa, maka diperlukan tempat yang dapat mengakomodir beragam jenis layanan dan jumlah pegawai serta fasilitas yang memerlukan ruang kerja memadai dan tetap (tidak berpindah-pindah) di lingkungan Pelabuhan Umum Benoa. Pada awal tahun 2015 kantor Unit Pelayanan

SHTI berpindah ke gedung baru yang diberi nama Pos Pelayanan UPT PPN Pengambengan dengan sistem sewa kepada Perusahaan Pelayanan Nusa Tenggara sebagai pemilik gedung. Pada akhir tahun 2017 gedung Pos Pelayanan UPT PPN Pengambengan telah resmi menjadi milik Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan saat ini Pos Pelayanan UPT PPN Pengambengan berganti nama menjadi “Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa”.

2.3 Komposisi Pegawai

Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa sejak dibangun tahun 2010 sampai saat ini dikelola oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan di Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa saat ini sebanyak 5 orang dan dibantu dengan tenaga kerja kontrak 10 orang, sehingga total pegawai PPN Pengambengan yang ditugaskan di Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa berjumlah 15 orang. Tim pelaksana kegiatan pelayanan kapal perikanan di Benoa dikoordinatori oleh salah seorang PNS di bawah seksi Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan.

2.4 Tugas dan Fungsi

Tugas dan tanggung jawab Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa adalah untuk melayani pengguna jasa pelabuhan perikanan (nelayan dan *stakeholder* lainnya) sebagai berikut :

1. Logbook dan e-logbook Penangkapan Ikan
Aktivasi, penerimaan, *entry data*, dan verifikasi Logbook dan e-logbook Penangkapan Ikan
2. Inspeksi Pembongkaran Ikan
 - a. Penerbitan Surat Keterangan Hasil Inspeksi Pembongkaran Ikan (SKH IPI)
 - b. Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)
3. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)
 - a. Penerbitan SHTI Lembar Awal (LA)
 - b. Penerbitan SHTI Lembar Turunan (LT)

- c. Penerbitan SHTI Lembar Turunan Disederhanakan (LTS)
4. Catch Documentation Scheme (CDS) CCSBT
 - a. Penerbitan *Catch Tagging Form* (CTF)
 - b. Penerbitan *Catch Monitoring Form* (CMF)
 - c. Penerbitan *Re-export or Export after Landing of Domestic Product Form* (REEF)
5. Penerbitan IOTC *Bigeye Statistical Document*
6. Penerbitan ICCAT *Swordfish Statistical Document*
7. Penerbitan Surat Keterangan Berpangkalan Dan Pendaratan Ikan
8. Penerbitan Surat Keterangan Kepatuhan Untuk Pendaftaran RFMO CCSBT dan IOTC
9. Input Data Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)
10. Enumerasi Sampling Tuna IOTC

2.4.1 Pelayanan Penerimaan dan Verifikasi Data Logbook Penangkapan Ikan

Logbook penangkapan ikan adalah laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan penangkapan ikan. Setiap kapal perikanan yang memiliki SIPI wajib mengisi logbook penangkapan ikan. Pengisian logbook penangkapan ikan dilakukan pada setiap operasi penangkapan ikan. Logbook penangkapan ikan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar internasional yang diterima secara umum yang disusun berdasarkan jenis alat penangkapan ikan.

Logbook penangkapan ikan terdiri atas:

- 1) Logbook rawai tuna dan pancing ulur (*long line and hand line*);
- 2) Logbook pukot cincin, huhate, dan pancing tonda (*purse seine, pole and line, and trolling line*); dan
- 3) Logbook alat penangkapan ikan lainnya.

Beberapa tujuan penting dari penerapan logbook antara lain :

- 1) Logbook penangkapan ikan sebagai *landing declaration* dari nakhoda, atau surat pernyataan mengenai ikan yang dibawa ke pelabuhan perikanan;

- 2) Logbook penangkapan ikan mendukung pendataan statistik perikanan (wilayah penangkapan, jenis ikan, volume);
- 3) Logbook penangkapan ikan mencatat data ijin penangkapan (alat tangkap), data registrasi kapal, pelabuhan pangkalan kapal tersebut dan 4) Mendukung evaluasi dan analisa pengelolaan SDI (*fishing capacity, efficiency fishing*, musim penangkapan kaitannya dengan *open and close session*, dan konservasi).

Tabel 1. Jumlah Logbook yang Diterima di Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa.

Bulan	Dokumen Logbook yang Diterima							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	333	142	103	73	59	85	98	96
Februari	282	103	72	53	46	33	60	114
Maret	301	116	116	64	72	57	77	116
April	401	162	130	93	92	55	105	127
Mei	343	93	136	100	69	36	57	63
Juni	365	108	154	108	60	36	65	58
Juli	389	107	69	55	66	24	61	60
Agustus	363	94	77	49	39	29	52	61
September	345	106	93	64	49	50	52	47
Oktober	293	109	101	72	63	62	53	52
November	219	79	51	80	49	63	52	54
Desember	125	130	79	54	63	119	99	69
Total	3.759	1.349	1.181	865	727	649	831	917

Tabel 2. Jumlah Produksi Tangkapan Ikan Berdasarkan Logbook Penangkapan Ikan.

Bulan	Jumlah Hasil Tangkapan yang Didaratkan (Ton)							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	2.243	1.334	2.049	1.048	1.363	1.849	1.980	3.234
Februari	2.126	1.164	1.063	782	1.035	799	1.389	3.318
Maret	1.906	1.608	1.791	1.271	1.506	1.648	1.472	4.228
April	3.400	2.899	3.872	1.991	2.075	1.681	2.572	4.643
Mei	3.106	1.412	2.881	2.137	1.661	1.160	955	1.526
Juni	3.836	1.242	2.538	1.886	1.291	684	1.759	2.032
Juli	3.273	1.522	944	1.162	1,451	669	1.569	2.041
Agustus	2.882	1.087	1.388	1.167	930	1.623	1.923	2.597
September	2.840	1.212	1.656	2.103	1.551	1.785	1.319	2.137
Oktober	2.109	1.269	2.379	1.343	1.295	1.638	1.318	1.804
November	1.620	1.191	829	1.347	1.355	1.426	2.389	2.033
Desember	902	2.560	1.559	1.218	2.423	2.522	2.516	2.441
Total	30.243	18.500	22.949	17.455	17.936	17.484	21.160	32.034

2.4.2 Pelayanan Aktivasi dan Verifikasi E-Logbook Penangkapan Ikan

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pendataan aktifitas penangkapan ikan dan hasil tangkapan di atas kapal perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memanfaatkan kemajuan teknologi berbasis *android* dengan menerapkan *e-logbook* penangkapan ikan melalui aplikasi *mobile* untuk nahkoda kapal dan aplikasi *website* bagi admin dalam melakukan aktivasi dan verifikasi.

Alasan adanya *e-logbook* ini adalah :

1. Efisiensi dalam penggunaan kertas (*less paper*);
2. Penyampaian data log book yang tidak langsung pada saat operasi penangkapan, dikarenakan masih menggunakan kertas;
3. Kepatuhan nelayan/pelaku usaha yang masih rendah;
4. Data yang disampaikan belum tersaji secara akurat dan objektif;
5. Format laporan log book untuk nelayan kecil yang tidak sederhana;
6. Belum adanya mekanisme verifikasi dan validasi data log bok yang mudah dan cepat.

Aplikasi ini cukup mudah untuk diisi oleh nahkoda kapal, karena beberapa data seperti data identitas kapal dan jenis hasil tangkapan telah tersedia di dalam aplikasi, sedangkan data waktu dan koordinat daerah penangkapan telah otomatis terdata oleh aplikasi melalui *Global Positioning System* (GPS) yang tersedia di dalam aplikasi saat pendataan dilakukan. Kelebihan aplikasi ini adalah dapat melakukan pendataan dalam *mode offline*, jaringan online hanya dibutuhkan pada saat login pertama kali saat keberangkatan dari pelabuhan dan pengiriman data setelah kapal sampai kembali di pelabuhan.



Gambar 1. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi E-Logbook Penangkapan Ikan Kepada Para Nahkoda dan Pengurus Kapal Perikanan

Aplikasi ini mulai dilakukan *launching* pada bulan Oktober 2018 dan dilanjutkan dengan Sosialisasi Syahbandar / petugas logbook kepada para nahkoda / pengurus kapal. Pada tahun 2021 petugas logbook di Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa telah melakukan aktivasi terhadap 323 kapal penangkap ikan yang berpangkalan di Pelabuhan Umum Benoa.

Tabel 3. Aktivasi-Verifikasi E-logbook Penangkapan Ikan di Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa Tahun 2021

Bulan	Aktivasi (Unit)	Pelaporan (Lembar)	Produksi (Ton)
Januari	18	96	3.234
Februari	15	114	3.318
Maret	37	116	4.228
April	56	127	4.643
Mei	43	63	1.526
Juni	39	58	2.032
Juli	30	60	2.041
Agustus	25	61	2.597
September	27	47	2.137
Oktober	8	52	1.804
November	15	54	2.033
Desember	10	69	2.441
Total	323	917	32.034

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 11/PER-DJPT/2018 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Log Book Penangkapan Ikan, yang menyatakan bahwa setiap kapal perikanan berukuran >30 GT melaporkan log book penangkapan ikan melalui aplikasi e-log book yang dapat diunduh melalui *playstore* pada masing-masing perangkat sesuai dengan alur proses. Pelaksanaan e-logbook penangkapan ikan sudah mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2019.

Kapal yang aktivasi dan pergantian dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 1.365 unit kapal. Penggunaan e-logbook ini merupakan salah satu inovasi yang dapat mempermudah verifikasi logbook hasil tangkapan ikan dan data yang diperoleh adalah data real time dari nahkoda kapal itu sendiri.

Tantangan dan permasalahan dalam penerapan *e-logbook*, antara lain :

1. Aplikasi *e-logbook* sering *error* pada saat akan digunakan di tengah laut;

2. Petugas *logbook* kurang mendapatkan akses lebih dalam pengaturan aplikasi *e-logbook* terutama untuk penghapusan data *e-logbook* yang tidak digunakan seperti data *e-logbook* untuk uji coba pada nakhoda yang baru belajar menggunakan aplikasi *e-logbook*;
3. Belum adanya fitur informasi khusus mengenai jumlah kapal yang telah melaporkan data *e-logbook* di setiap pelabuhan pangkalan. Sehingga petugas *logbook* kesulitan dalam mencari data jumlah kapal yang telah melaporkan data *e-logbook* dalam aplikasi;
4. Banyak nahkoda yang hingga saat ini belum memahami teknologi sehingga kesulitan dalam penggunaan aplikasi *e-logbook*;
5. Jenis *gadget* yang digunakan kurang *compatible* terhadap aplikasi *e-logbook*;
6. Masih ada beberapa kapal penangkap ikan yang belum melakukan aktivasi *e-logbook*, terutama kapal penangkap ikan izin daerah.

Dari permasalahan tersebut perlu adanya solusi atau perbaikan yang dilakukan seperti:

1. Perlu dilakukan perbaikan sistem aplikasi *e-logbook* oleh petugas admin pusat;
2. Adanya akses lebih yang diberikan kepada petugas *logbook* di Pelabuhan Perikanan terutama dalam hal penghapusan data *e-logbook* yang tidak dipakai;
3. Melakukan sosialisasi intensif kepada nakhoda dan pengurus kapal tentang pentingnya pelaporan dan aktivasi *e-logbook*.

2.4.3 Pelayanan Inspeksi Pembongkaran Ikan dan Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (SCPIB)

Ikan merupakan bahan makanan yang sangat mudah rusak. Perubahan biokimia pada tubuh ikan dimulai segera setelah ikan mati dan pada akhirnya akan menyebabkan pembusukan dan penurunan kualitas. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menjaga kualitas ikan sesegera mungkin setelah ikan ditangkap. Salah satu tahapan kritis yang menyebabkan penurunan kualitas dan pembusukan ikan adalah tahapan antara penangkapan sampai pendaratan ikan. Teknik penangkapan ikan di atas kapal dan penanganan pada tahapan kritis tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas ikan yang akan sampai

di konsumen akhir. Apabila kualitas ikan hasil tangkapan dapat dijaga sebelum didaratkan, maka :

- (1) ikan hasil tangkapan akan memperoleh harga yang lebih baik ketika dipasarkan;
- (2) waktu penyimpanan akan lebih lama sehingga ikan dapat dijual ke lokasi yang lebih jauh yang menjanjikan nilai jual lebih tinggi; dan
- (3) terjaminnya keamanan pangan bagi ikan untuk dikonsumsi.

Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghambat proses pembusukan dan menjaga kualitas ikan segar setelah proses penangkapan dan sebelum pendaratan. Intinya adalah menjaga agar kapal, alat tangkap serta peralatan lainnya dalam keadaan bersih, menghindari kontaminasi ikan, mendinginkan ikan secepat mungkin setelah proses penangkapan, teknik penanganan ikan dengan hati-hati dan membuang sumber bakteri dengan cara mencuci ikan dan membuang isi perut ikan.

Kepmen 01/MEN/2007 tentang persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada proses produksi, pengolahan dan distribusi, menjelaskan bahwa kapal penangkap dan pengangkut ikan yang digunakan untuk melakukan penangkapan dan penanganan ikan diatas kapal harus memenuhi persyaratan ketentuan *sanitasi* dan *hygiene* di kapal perikanan. Implementasinya adalah penerapan Penyimpanan Ikan di

Kapal Penangkap dan Pengangkut ikan (SKP Kapal) untuk seluruh kapal-kapal perikanan serta Inspeksi Pembongkaran di Pelabuhan Perikanan yang dilakukan oleh petugas pelabuhan perikanan untuk setiap kapal. Sebagai mandat tersebut, maka Dirjen Perikanan Tangkap mengeluarkan Nomor 264/DPT.0/PI.540.S4/I/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Kelaikan Penanganan dan Penyimpanan Ikan di Kapal Penangkap/Pengangkut Ikan dan Inspeksi Pembongkaran Ikan di Pelabuhan dan nomor 265/DPT.0/PI.540.S4/I/2009 tentang pembentukan tim pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

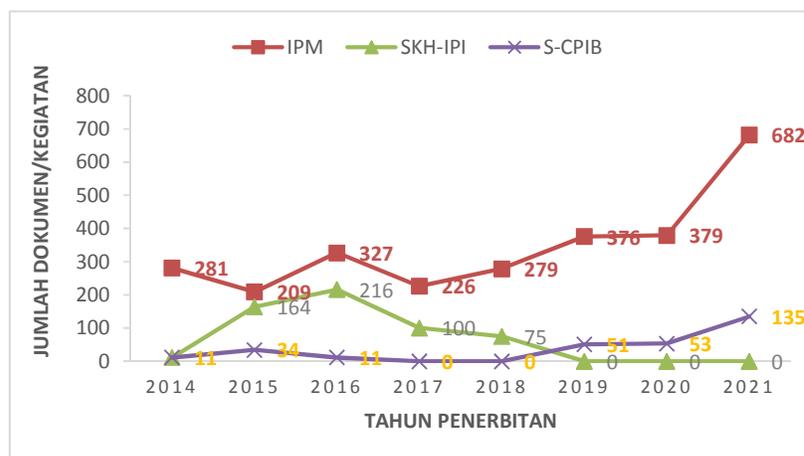
Hal ini terkait juga dengan salah satu fungsi pelabuhan perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai “Pusat Pelayanan Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan”. Namun

sebagian besar pelabuhan perikanan masih belum optimal dalam melaksanakan fungsi tersebut. Dalam rangka mewujudkan fungsi pelabuhan perikanan sebagai pusat pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas hasil tangkapan, diantaranya dengan melaksanakan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui Inspeksi Pembongkaran Ikan

Peraturan Menteri KP Nomor 7/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik mengamanatkan bahwa kegiatan inspeksi pembongkaran ikan merupakan salah satu point utama dari inspeksi pengendalian mutu pada kegiatan penangkapan ikan (Laporan Hasil Inspeksi Pengendalian Mutu pada Kegiatan Penangkapan Ikan merupakan salah satu persyaratan untuk penerbitan S-CPIB).

Tabel 4. Jumlah Penerbitan Dokumen IPI, SKH-IPI dan S-CPIB

Tahun	IPI	SKH-IPI	S-CPIB
2014	281	11	11
2015	209	164	34
2016	327	216	11
2017	226	100	0
2018	279	75	0
2019	376	0	51
2020	379	0	53
2021	682	0	135



Gambar 2. Jumlah Penerbitan Dokumen IPI, SKH-IPI dan S-CPIB

Pelaksanaan kegiatan inspeksi pembongkaran ikan sudah mulai dicanangkan dan disosialisasikan sejak tahun 2012, namun pelaksanaannya di Pelabuhan Umum Benoa baru berjalan tahun 2014. Saat ini ada 3 (tiga) orang petugas inspeksi pembongkaran ikan Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa. Namun hingga saat ini pelaksanaan Inspeksi Pembongkaran Ikan belum bisa dilaksanakan terhadap seluruh kapal yang melakukan pembongkaran ikan di Pelabuhan Umum Benoa.

Kembali lagi, hal ini disebabkan kurangnya perhatian dari pihak stakeholder terhadap pentingnya dilakukan inspeksi pembongkaran ikan di atas kapal dan di area bongkar ikan (dermaga). Selain itu, tidak adanya reward dan punishment pada peraturan/kebijakan yang mengatur pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan, menyebabkan keengganan pihak pemilik kapal/nahkoda/pengurus kapal untuk melaporkan proses pembongkaran ikannya kepada petugas.

Surat Keterangan Hasil Inspeksi Pembongkaran Ikan (SKH-IPI) sudah tidak diterbitkan mulai tahun 2019. Hal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri KP Nomor 7/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik, dimana Surat Keterangan Hasil Inspeksi Pembongkaran Ikan (SKH-IPI) sudah tidak menjadi syarat dalam penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (S-CPIB).

Adapun beberapa temuan yang sering terjadi selama proses inspeksi pembongkaran ikan di Pelabuhan Umum Benoa, antara lain :

1. Proses pembongkaran dilakukan dengan cepat terkadang kurang hati-hati, ada beberapa ikan yang terjatuh. Namun karena ikan hasil tangkapannya berupa ikan beku, maka tidak terlalu berpengaruh nyata terhadap penurunan kualitas ikan;
2. Permukaan kapal yang bersentuhan langsung dengan ikan masih terbuat dari bahan yang tidak kedap air (bahan terbuat dari kayu) sehingga dapat merusak suhu ikan yang bersentuhan langsung dengan ikan;
3. Proses bongkar dilakukan pada siang hari dan tanpa menggunakan selasar, yang mengakibatkan ikan terpapar sinar matahari secara langsung dan menyebabkan terjadinya penurunan mutu pada hasil tangkapan;

4. Masih banyak ditemukan ABK ataupun petugas bongkar yang merokok, menginjak ikan, akan/minum dan/atau meludah pada saat proses bongkar ikan dilakukan.

Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (S-CPIB) merupakan sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap dan/atau kapal pengangkut ikan yang telah memenuhi persyaratan pengendalian mutu pada kegiatan penangkapan, penanganan dan penyimpanan ikan di atas kapal. Kapal penangkap dan pengangkut ikan memperoleh sertifikat CPIB setelah memenuhi persyaratan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 7/PER-DJPT/2019 tentang Persyaratan Pengendalian Mutu dan Tata Cara Inspeksi Pengendalian Mutu Pada Kegiatan Penangkapan Ikan adalah sebagai berikut :

1. Pemilik kapal perikanan dan kapal pengangkut ikan mengajukan permohonan Sertifikasi CPIB kepada Kepala Pelabuhan Perikanan, menggunakan formulir permohonan Sertifikasi CPIB dan dilengkapi dengan persyaratan dokumen sebagai berikut :
 - a. Fotocopy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan dan Pengangkutan Ikan (SIPI/SIKPI)
 - b. Sertifikat Kelayakan fasilitas;
 - c. Sertifikat awak kapal
 - d. Hasil Inspeksi pembongkaran ikan dengan nilai baik.
2. Tim verifikasi memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah dokumen diterima.
3. Apabila persyaratan dokumen belum lengkap, maka pemilik kapal penangkap dan kapal pengangkut ikan diberitahu melalui surat untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
4. Kepala Pelabuhan Perikanan menerbitkan sertifikat CPIB paling lama 3 (tiga) hari setelah dokumen dinyatakan lengkap.

Tabel 5. Jumlah Sertifikat CPIB yang telah diterbitkan di Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa

Tahun	Jumlah S-CPIB
2014	11
2015	34

2016	11
2017	0
2018	0
2019	51
2020	53
2021	135
Jumlah	295

Hingga saat ini, Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa telah menerbitkan 295 lembar Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (S-CPIB) di atas kapal penangkap dan pengangkut ikan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian lebih, mengingat bahwa S-CPIB merupakan suatu jaminan mutu terhadap ikan yang ditangkap oleh kapal perikanan dan tentunya dengan jaminan mutu tersebut akan meningkatkan nilai jual ikan. Namun kurang sadarnya stakeholder terhadap pentingnya sertifikat ini menyebabkan jumlah sertifikat yang diterbitkan sangat sedikit. Selain itu, adanya permasalahan dalam bidang kebijakan juga menyebabkan terhambatnya penerbitan sertifikat CPIB ini. Oleh sebab itu peraturan dan kebijakan yang mengatur penerbitan sertifikat CPIB ini perlu dikaji ulang.

2.4.4 Pelayanan Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)

Dalam rangka memastikan efektifitas perdagangan ekspor produk perikanan Indonesia ke Uni Eropa (UE) dengan mendasarkan pada telah diterbitkannya *EC Regulation 1005/2008 to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, maka Indonesia mengembangkan suatu kebijakan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor PER.13/MEN/2013, pengertian Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten Lokal yang menyatakan bahwa hasil tangkapan ikan bukan berasal dari kegiatan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*.

SHTI diterapkan terhadap semua perdagangan produk hasil tangkapan ikan, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, berasal dari kapal penangkap ikan

negara berbendera dan diekspor melalui/tidak melalui negara ketiga ke negara-negara Uni Eropa.

Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap selaku Otoritas Kompeten (*Competent Authority*) dan divalidasi oleh unit kerja yang ditunjuk oleh Otoritas Kompeten, dalam hal ini PPN Pengambengan ditunjuk sebagai salah satu unit kerja yang dapat memvalidasi penerbitan SHTI. PPN Pengambengan sudah mulai melakukan penerbitan SHTI sejak bulan Februari 2010 untuk ikan hasil tangkapan laut yang ditangkap mulai tanggal 1 Januari 2010. Pelaksanaan penerbitan SHTI ini dilakukan oleh Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa (yang merupakan perpanjangan tangan dari PPN pengambengan) terhadap hasil tangkapan ikan kapal penangkapan ikan di Pelabuhan Umum Benoa.

Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan terdiri atas empat jenis lembar yaitu Lembar Awal (*Initial Sheet*), Lembar Turunan (*Derivative Sheet*), Lembar Turunan yang Disederhanakan (*Simplified Derivative Sheet*) serta SHTI impor. Lembar Awal adalah lembar sertifikat yang memuat seluruh hasil tangkapan yang dilakukan untuk setiap satu kali kegiatan bongkar untuk tujuan pencatatan bagi kapal penangkap dengan ukuran > 20 GT. Lembar awal ini berfungsi sebagai kontrol data awal yang diisi oleh nahkoda setelah pembongkaran.

Lembar Turunan adalah lembar yang memuat sebagian atau seluruh hasil tangkapan sesuai lembar awal dan berfungsi sebagai kelengkapan perdagangan untuk ekspor ke Uni Eropa, sedangkan Lembar Turunan Disederhanakan penyederhanaan bagi Lembar Awal dan Lembar Turunan SHTI yang diperuntukan untuk ekspor hasil tangkapan ikan dari kapal-kapal perikanan ukuran < 20 GT.

SHTI Import adalah sertifikat yang dikeluarkan apabila bahan bakunya berasal dari impor untuk kemudian diolah didalam negeri dan diekspor kembali. Hingga saat ini Pos Pelayanan UPT PPN Pengambengan belum pernah menerbitkan Lembar SHTI Impor. Adapun data penerbitan SHTI di Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa dapat dilihat pada tabel 6.

Pada Tabel 6 dapat kita lihat jumlah penerbitan SHTI di Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa mulai tahun 2010 hingga 2021. Sampai dengan akhir Desember

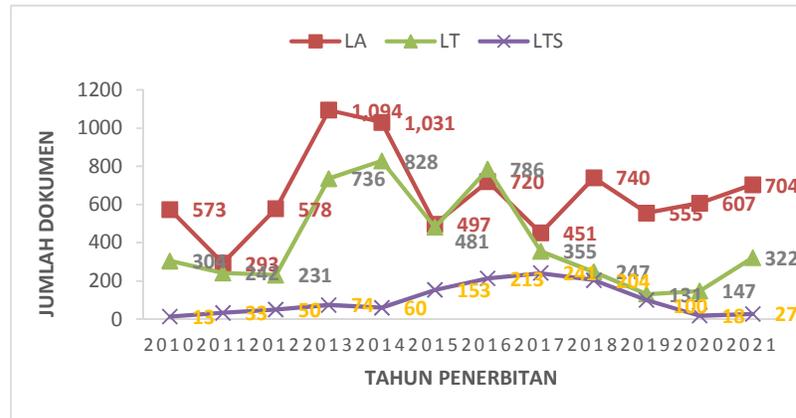
tahun 2021, Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa telah menerbitkan sebanyak 1.053 lembar sertifikat SHTI, yang terdiri dari 704 lembar SHTI LA, 322 lembar SHTI LT dan 27 lembar SHTI LTS.

Penerbitan SHTI ini masih di dominasi oleh penerbitan SHTI Lembar Awal. Penerbitan SHTI hingga saat ini masih tergantung dari permohonan penerbitan oleh pihak pemohon (pemilik kapal/nahkoda/Unit Pengolahan Ikan/Eksportir Ikan). Oleh sebab itu walaupun data dalam Lembar Awal dianggap sebagai control data hasil tangkapan ikan, namun hasilnya dianggap belum cukup maksimal, karena masih banyak kapal-kapal perikanan yang mendaratkan ikan di Pelabuhan Umum Benoa tidak mengajukan permohonan untuk menerbitkan SHTI Lembar Awal.

Tabel 6. Data Penerbitan SHTI di Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa

Tahun	Jumlah Penerbitan SHTI			Total
	LA	LT	LTS	
2010	573	304	13	890
2011	293	242	33	568
2012	578	231	50	859
2013	1,094	736	74	1.904
2014	1,031	828	60	1.919
2015	497	481	153	1.131
2016	720	786	213	1.719
2017	451	355	241	1.047
2018	740	247	204	1.191
2019	555	131	100	786
2020	607	147	18	772
2021	704	322	27	1.053

Bila dilihat dari data pada gambar 3 dapat kita lihat terjadinya fluktuasi penerbitan SHTI di Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa. Pada tiga tahun pertama SHTI mulai diterapkan, lembaran SHTI yang diterbitkan masih kurang dari 1.000 lembar per tahun. Hal ini dikarenakan masih banyak stakeholder yang belum mengetahui mengenai SHTI, sehingga petugas juga melakukan sosialisasi kepada para pengguna jasa di wilayah Pelabuhan Umum Benoa.



Gambar 3. Data Penerbitan SHTI di Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa

Pada tahun ke-empat (2013), penerbitan SHTI melonjak cukup tajam. Kenaikan jumlah penerbitan SHTI LA mencapai 122%. Hal ini memperlihatkan bahwa sosialisasi mengenai SHTI kepada stakeholder berhasil. Selain itu juga meningkatnya permintaan ekspor ikan dari negara Uni Eropa menyebabkan peningkatan jumlah SHTI LT yang diterbitkan, tercatat kenaikan jumlah SHTI LT mencapai 219%.

Namun kenaikan jumlah penerbitan SHTI ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 2015 terjadi penurunan penerbitan SHTI hingga 41% dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan salah satu dampak dari moratorium usaha perikanan yang mulai diberlakukan pada tanggal 3 November 2014.

Diberlakukannya Peraturan Menteri KP Nomor PER.56/MEN/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia menyebabkan kapal-kapal eks asing tidak boleh melakukan perpanjangan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Pelabuhan Umum Benoa merupakan salah satu pelabuhan dengan jumlah kapal eks asing terbanyak di Indonesia. Pada saat itu tercatat ada 142 kapal eks asing yang dilarang beroperasi karena dilarang melakukan perpanjangan SIPI/SIKPI. Hal ini sangat mempengaruhi jumlah SHTI yang diterbitkan, terutama SHTI Lembar Awal. Dari data diketahui penurunan penerbitan SHTI LA mencapai 52%.

Penurunan ini juga disebabkan oleh diberlakukannya Peraturan Menteri KP Nomor PER.57/MEN/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (penghentian alih muat/*transshipment* di laut). Hal ini disebabkan karena sebagian besar kapal penangkap ikan di Pelabuhan Umum Benoa merupakan kapal long line yang beroperasi di Laut Lepas Samudera Hindia sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk operasional (operasi kapal penangkap bisa mencapai 11 bulan lebih). Sehingga untuk menjaga mutu hasil tangkapannya, kapal-kapal penangkap ini menitipkan hasil tangkapannya (*transshipment*) kepada kapal pengangkut di tengah laut. Kapal-kapal pengangkut inilah yang akan mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan pangkalannya, sementara kapal penangkap ikannya tetap melakukan penangkapan hingga masa berlaku SIPI kapal habis. Menurut beberapa pemilik kapal, selain dapat menjaga mutu hasil tangkapan, proses alih muat/penitipan ikan ini juga dapat menghemat biaya operasional kapal-kapal perikanan mereka. Dan dengan dilarangnya alih muat ikan di tengah laut ini, menyebabkan sebagian besar kapal pengangkut dan kapal penangkap ikan tidak beroperasi dan berkurangnya permohonan penerbitan SHTI LA yang diajukan ke Pos Pelayanan UPT PPN Pengambengan.

Apabila SHTI LA dan LT pada tahun 2015 menurun signifikan, namun jumlah penerbitan SHTI Lembar Turunan yang disederhanakan (LTS) mengalami peningkatan hingga 155% dari tahun sebelumnya. Dan peningkatan jumlah penerbitan SHTI LTS ini terus mengalami kenaikan pada tahun-tahun selanjutnya. Hal ini merupakan dampak positif yang bisa terlihat dari moratorium usaha perikanan tersebut. Dengan dilarangnya kapal-kapal eks asing yang notabene merupakan kapal berukuran besar dan mempunyai teknologi penangkapan yang modern, memberikan kesempatan kapal-kapal dalam negeri yang ukurannya kecil (< 20 GT) untuk memperoleh hasil tangkapan yang lebih baik, baik dari kuantitas maupun kualitas.

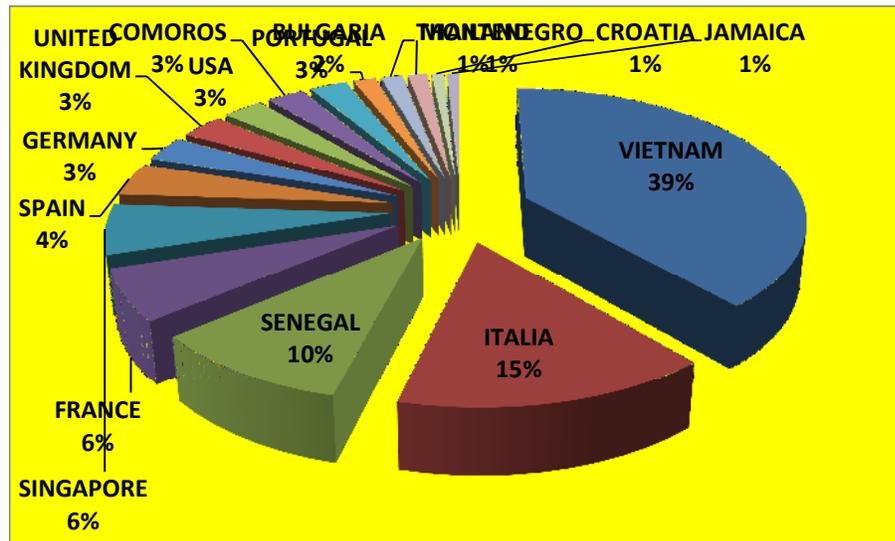
Pada tahun 2017 s.d 2021 terjadi fluktuasi jumlah penerbitan SHTI di Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa. Pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah SHTI yang diterbitkan, terutama pada penerbitan SHTI Lembar Turunan (LT) dan SHTI Lembar Turunan yang Disederhanakan (LTS). Hal ini dipengaruhi oleh

pandemi Covid 19 yang terjadi di awal tahun 2020. Pembatasan kegiatan dan beberapa negara menerapkan *lockdown* selama masa pandemi berpengaruh pada kegiatan ekspor produk ikan dari Pelabuhan Benoa. Pada tahun 2021 mulai mengalami peningkatan jumlah penerbitan SHTI sebesar 36,40% dari tahun 2020. Hal ini dipengaruhi oleh mulai dibukanya beberapa negara tujuan ekspor yang sebelumnya menerapkan *lockdown* selama masa pandemi covid 19.

Tabel 7. Negara Tujuan Ekspor Ikan Hasil Tangkapan Berdasarkan SHTI

Negara	Jumlah Ekspor Ikan Hasil Tangkapan Berdasarkan SHTI (Ton)								Total
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Belgium	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Bulgaria	-	-	-	-	-	-	-	25,7	25,7
China	658,0	571,1	777,7	180,7	52,0	0,1	50,5	-	2.290,1
Comoros	-	-	-	-	-	-	-	42,97	42,97
Croatia	-	-	-	-	-	-	-	14,2	14,2
Equador	-	-	-	50,7	-	-	-	-	50,7
France	59,4	112,4	173,8	279,5	301,6	160,9	127,8	105,34	1.320,74
Germany	144,2	86,5	203,9	118,4	79,4	38,4	5,1	51,6	727,5
Greece	-	-	-	-	10,2	-	-	-	10,2
Hongkong	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Italy	232,5	154,9	70,7	53,0	87,2	83,3	102,0	254,86	1.038,46
Jamaica	-	-	-	-	-	-	-	14,04	14,04
Japan	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Lebanon	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Montenegro	-	-	-	-	-	-	-	22,6	22,6
Netherland	31,6	148,1	262	40,3	8	-	-	-	490
Philippine	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Portugal	2,6	309,9	100,7	36,2	49,2	-	24,6	42,6	565,8
Russia	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Senegal	-	-	-	-	-	-	-	166,76	166,76
Singapore	-	-	-	5,9	76,8	49,6	-	101,7	234
Spains	434	609,2	49,2	26	75,3	-	-	67,8	1.261,5
Srilanka	24,9	-	-	-	-	-	-	-	24,9
Swiss	4	-	-	-	-	0,5	-	-	4,5
Taiwan	159	-	-	-	-	-	-	-	159
Thailand	3.368,3	1.043	157,2	75,2	-	-	50,0	25,2	4.718,9
Turkey	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Uk	-	42,6	28,3	38,6	-	-	-	49,5	159
Ukraine	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Usa	269,7	-	-	-	-	9,1	18,4	46,5	343,7
Vietnam	97,7	-	-	-	-	-	54,7	653,07	805,47
TOTAL	5.485,9	3.077,7	1.823,5	904,5	739,7	341,9	433,1	1.684,44	14.490,74

Berdasarkan Tabel 7 kita dapat melihat data negara-negara tujuan ekspor yang tercatat pada SHTI LT dan LTS yang diterbitkan di Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa. Dari data tersebut terhitung jumlah ikan hasil tangkapan yang telah diekspor berjumlah 14.490,74 kg dengan tujuan 23 negara di wilayah Uni Eropa, Amerika dan Asia. Adapun negara tujuan ekspor tersebut antara lain Vietnam, Italy, Senegal, France, Singapore, Spain, Germany, United Kingdom, USA, China, Comoros, Equador, Greece, Netherland, Srilanka, Swiss, Taiwan, Portugal, Bulgaria, Thailand, Montenegro, Croatia, dan Jamaica (**Gambar 4**).



Gambar 4. Negara-negara Tujuan Ekspor Utama Ikan Hasil Tangkapan di Pelabuhan Benoa

Negara-negara Uni Eropa yang menjadi tujuan ekspor berdasarkan SHTI LT dan LTS yang diterbitkan OKL PPN Pengambengan antara lain Italy, France, Spain, Germany, United Kingdom, Portugal, Bulgaria, Montenegro dan Croatia. Adapun hasil perikanan yang diekspor ke Negara-negara tersebut beraneka ragam, seperti yellowfin tuna, albacore, bigeye tuna, gurita dan sarden yang diolah menjadi berbagai produk baik dalam bentuk beku ataupun ikan kaleng. Selain Negara-negara UE dan Negara tetangga (Vietnam, Singapura dan Thailand), produk hasil perikanan dari PU. Benoa juga diekspor ke New York (Amerika), Jamaica di Kepulauan Karibia, bahkan sampai ke Senegal yang ada di Africa Barat dan Negara Komoro yang terletak di Africa bagian Timur.

Adapun produk hasil perikanan yang dikirim ke Amerika dan Jamaica terdiri atas Yellowfin dan Bigeye Tuna, sedangkan produk yang dikirim ke Senegal berupa ikan Baracuda, Gulama, Kuro dan Cobia beku. Untuk Negara Komoro dikirim ikan sarden yang dikalengkan dan dikirim dalam bentuk beku.

2.4.5 Pelayanan Penerbitan *Catch Documentation Scheme of The Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CDS CCSBT)*

Salah satu tindakan pengelolaan berkelanjutan yang telah disepakati difokuskan pada pengumpulan data ikan hasil tangkapan tuna sirip biru selatan (*Southern Bluefin Tuna*). Untuk maksud tersebut, CCSBT telah menerbitkan *Resolution on the Implementation of a CDS to record all catch of SBT*, dimana CCSBT akan menerapkan *Catch Documentation Scheme (CDS)* dalam perdagangan Tuna Sirip Biru Selatan (*Thunnus maccoyii*).

Guna mewujudkan komitmen diatas, berbagai negara telah bersepakat membentuk organisasi internasional atau regional yang berkewajiban melakukan pengelolaan *straddling fish stock and highly migratory fish stock* di laut lepas, yang pembentukannya didasarkan pada UNCLOS 1982. Saat ini, terdapat 5 (lima) organisasi internasional dan regional untuk mengelola *straddling fish stock and highly migratory fish stock* di laut lepas, yaitu :

1. *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*
2. *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)*
3. *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*
4. *Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC)*
5. *International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT)*.

Berdasarkan adanya kebutuhan perluasan wilayah penangkapan ikan bagi armada perikanan Indonesia dan potensi sumberdaya ikan *straddling fish stock and highly migratory fish stock* di laut lepas, hingga saat ini, Indonesia telah menjadi peserta pada organisasi regional pengelola sumberdaya ikan (*Regional Fisheries Management Organisations*) sebagai berikut :

1. *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*, dengan status sebagai anggota tetap sejak 9 Juli 2007;

2. *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT) dengan status sebagai anggota tetap sejak 8 April 2008, dan
3. *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC), dengan status sebagai *Cooperating Non-Member* (CNM) sejak tahun 2006.

Salah satu tindakan pengelolaan berkelanjutan yang telah disepakati difokuskan pada pengumpulan data ikan hasil tangkapan tuna sirip biru selatan (*Southern Bluefin Tuna*). Untuk maksud tersebut, CCSBT telah menerbitkan *Resolution on the Implementation of a CDS to record all catch of SBT CCSBT* yang diadopsi pada CCSBT-12 tahun 2005 dan CCSBT-13 Tahun 2006, serta telah dimodifikasi tanggal 19 Oktober 2009, dimana CCSBT akan menerapkan *Catch Documentation Scheme* (CDS) dalam perdagangan Tuna Sirip Biru Selatan (*Southern Bluefin Tuna*). *Catch Documentation Scheme* (CDS) terdiri dari 3 (tiga) formulir yang wajib disertakan dalam setiap perdagangan *Southern Bluefin Tuna*, sebagai berikut :

- a. *Catch Tagging Form* yaitu Formulir Penandaan Ikan Hasil Tangkapan, yang harus diisi oleh Nakhoda Kapal Penangkap Ikan (*Fishing Master*) segera setelah ikan tertangkap.
- b. *Catch Monitoring Form* yaitu Formulir Pemantauan Ikan hasil Tangkapan, yang harus diisi oleh perusahaan penangkapan ikan/eksportir.
- c. *Re-Export/Export After Landing of Domestic Product Form* yaitu Formulir Ekspor Ulang/ Ekspor Setelah Pendaratan Produk Domestik, yang harus diisi oleh perusahaan penangkapan ikan/eksportir.

Kebijakan penerapan CDS diatas efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010, dengan kata lain bahwa setiap kegiatan ekspor atau impor SBT mulai tanggal 1 januari 2010, hanya dapat dilaksanakan bilamana telah dilengkapi dengan 3 (tiga) formulir tersebut. Khusus formulir *Catch Monitoring Form* dan *Re-Export/Export After Landing of Domestic Product* wajib disahkan (divalidasi) oleh Petugas Pemerintah pada instansi yang berwenang.

Untuk memperlancar aktifitas ekspor SBT ke negara tujuan, perlu diperhatikan bahwa *Catch Tagging Form* dan *Catch Monitoring Form* harus disertakan pada setiap ikan hasil tangkapan yang berasal dari 1 (satu) kapal

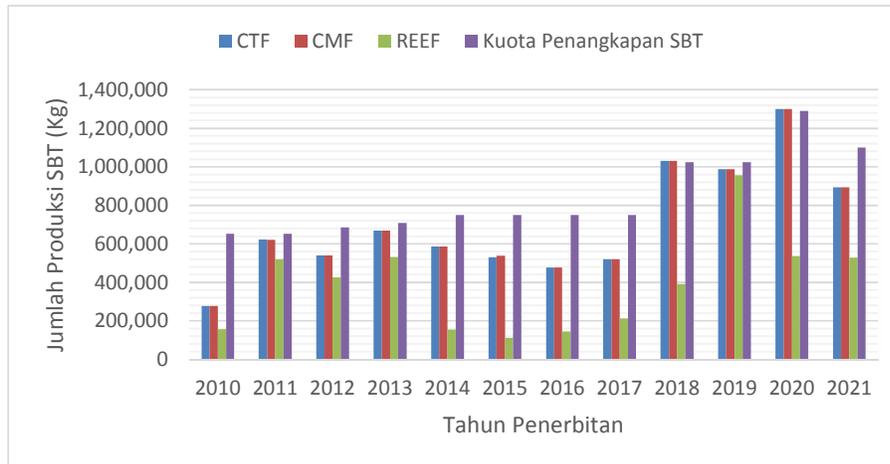
penangkap ikan.

Tabel 8. Data Penerbitan CDS CCSBT di Pos Pelayanan Kapal Perikanan Benoa

Tahun	CTF		CMF		REEF		Kuota Penangkapan SBT (Kg)
	Jumlah	Berat (Kg)	Jumlah	Berat (Kg)	Jumlah	Berat (kg)	
2010	251	277.039,00	251	276.384,40	198	157.100,80	651.000
2011	967	621.579,00	967	619.830,00	963	519.232,60	651.000
2012	916	540.325,00	916	540.325,00	916	426.594,00	685.000
2013	624	668.685,00	624	668.685,00	624	532.469,00	707.000
2014	800	586.945,35	800	586.945,35	154	155.783,67	750.000
2015	488	529.787,00	490	537.513,10	66	111.704,92	750.000
2016	375	477.445,00	375	477.111,00	64	143.783,02	750.000
2017	259	519.802,00	259	519.802,00	97	212.655,60	750.000
2018	312	1.029.274,00	312	1.029.274,00	173	391.488,30	1.023.000
2019	362	987.726,00	362	987.726,00	272	957.430,00	1.023.000
2020	392	1.300.052	398	1.300.052	303	536.367	1.290.000
2021	330	892.633	330	892.633	308	528.758,05	1.100.000

Southern Bluefin Tuna yang keberadaannya sudah mendekati tingkat kepunahan, maka setiap tahun forum *Scientific Committee* CCSBT melakukan rapat tahunan untuk menentukan tingkat kelestarian SBT dan menentukan jumlah SBT yang boleh ditangkap dalam tiap tahunnya. Jumlah penentuan kuota setiap negara dipertimbangkan dari laporan data statistik negara terkait dan laporan *Scientific Committee* CCSBT terkait dengan keadaan sediaan SBT. Kuota penangkapan SBT yang diperoleh Indonesia hanya sekitar 6-7% dari total alokasi kuota dunia. Jumlah kuota penangkapan SBT yang diperoleh Indonesia dapat dilihat pada **Tabel 8**.

Kuota penangkapan SBT didistribusikan oleh Direktorat Sumber Daya Ikan DJPT KKP kepada asosiasi-asosiasi penangkapan ikan di Indonesia yang hasil tangkapannya di dominasi oleh ikan-ikan pelagis besar. Pada tahun 2021 kuota SBT di Pelabuhan Umum Benoa dibagikan kepada 2 asosiasi yaitu Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) dan Asosiasi Perikanan Terpadu (ASPRTADU). Untuk pengawasan pemakaian kuota ini, pihak Direktorat SDI DJPT KKP mengembangkan aplikasi CDS CCSBT sehingga mempermudah petugas verifikator di Pelabuhan untuk pengawasannya.



Gambar 5. Data Penangkapan dan Ekspor SBT di Pos Pelayanan Kapal Perikanan Benoa

Apabila dilihat pada **Gambar 5** diketahui bahwa pada tahun 2021 jumlah SBT yang ditangkap dan dilaporkan melalui *Catch Tagging Form* (CTF) sebesar 892.633 kg. Dari sejumlah *Southern Bluefin Tuna* (SBT) yang dilaporkan melalui CTF, sejumlah 37.784 kg SBT dilaporkan diekspor dalam kondisi *fresh* dan untuk pasar domestik (*reject*) sejumlah 854.849 kg. Dari sejumlah SBT untuk pasar domestik tersebut sejumlah 528.758,05 kg diekspor dan dilaporkan melalui dokumen REEF. *Southern Bluefin Tuna* (SBT) diekspor melalui dokumen REEF dalam kondisi *frozen*. Sehingga total SBT yang diekspor sejumlah 566.542,05 kg. *Southern Bluefin Tuna* (SBT) yang diekspor dalam kondisi *fresh* ditujukan ke negara Jepang dan yang diekspor dalam kondisi *frozen* ditujukan ke negara USA, Philippines, Lebanon, Jordan, Vietnam dan Thailand.

2.4.6 Pelayanan Penerbitan *The Indian Ocean Tuna Commission* (CDS IOTC) *Statistical Document for Big Eye Tuna* dan *The International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna* (CDS ICCAT) *Statistical Document for Swordfish*

Sesuai dengan Resolusi *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC) Nomor 01/06 Concerning IOTC *Bigeye Tuna Statistical Document Program*, telah diterapkan formulir IOTC *Bigeye Tuna Statistical Document* dalam setiap perdagangan jenis ikan yang dikelola IOTC utamanya jenis tuna mata besar (*bigeye tuna*). Terdapat 2

(dua) jenis formulir yang harus disertakan dalam setiap kegiatan ekspor atau impor tuna mata besar (*bigeye tuna*) sebagai berikut :

1. IOTC *Bigeye Tuna Statistical Document (Export)* yaitu Dokumen Statistik Tuna Mata Besar yang harus diisi oleh perusahaan penangkapan ikan atau eksportir, dan
2. IOTC *Bigeye Tuna Re-Export Certificate* yaitu Sertifikat Ekspor Ulang (Re-Export) Tuna Mata Besar, yang harus diisi oleh perusahaan penangkapan ikan atau eksportir.

Dengan penerapan resolusi IOTC diatas, maka setiap kegiatan ekspor atau impor tuna mata besar (*bigeye tuna*), hanya dapat dilaksanakan bilamana telah dilengkapi dengan formulir tersebut dan masing-masing formulir wajib disahkan (divalidasi) oleh Petugas Pemerintah selaku Otoritas Kompeten (*Competent Authority*) pada instansi yang berwenang.

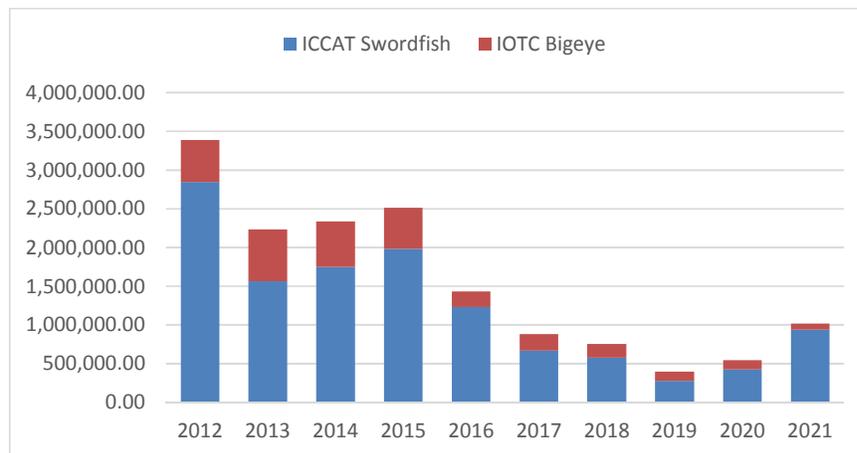
Dalam rangka pelaksanaan ekspor ikan jenis swordfish (ikan pedang) sesuai dengan resolusi International Commission for The Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) "*Recommendation by ICCAT establishing a Swordfish Statistical Document Program (Entered into force : September 21, 2002)*" menegaskan bahwa seluruh ekspor ikan jenis *Swordfish* ke Negara anggota ICCAT wajib dilengkapi dengan ICCAT *Swordfish Statistical Document*, mengacu pada paragraf 5 (lima) dan 6 (enam) *Recommendation by ICCAT Establishing a Swordfish Statistical Document Program*. Negara anggota tetap ICCAT maupun anggota tidak tetap ICCAT (termasuk Indonesia) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan ICCAT *Swordfish Statistical Document*.

Tabel 9. Data Penerbitan IOTC dan ICCAT *Statistical Document* di Pos Pelayanan Kapal Perikanan Benoa

Tahun	IOTC BET		ICCAT SWF	
	Jumlah	Berat (Kg)	Jumlah	Berat (kg)
2010	251	277.039,00	0	0
2011	967	621.579,00	0	0
2012	916	540.325,00	772	2.848.610,96
2013	624	668.685,00	804	1.562.527,51
2014	800	586.945,35	792	1.749.509,63
2015	488	529.787,00	429	1.985.924,00
2016	104	200.673,08	378	1.230.323,00

2017	115	211.042,51	276	669.872,00
2018	137	171.684,74	232	581.768,81
2019	82	117.311	152	279.778,12
2020	65	122.661	288	423.695,70
2021	56	78.489,67	457	938.198,13

Ikan *bigeye tuna* dan *swordfish* (meka) merupakan ikan pelagis besar yang olahannya cukup digemari. Dua jenis ikan ini cukup dinikmati sebagai ikan fresh di Jepang. Berdasarkan **Gambar 6** terlihat bahwa pada tahun 2012 – 2021 ekspor ikan *bigeye tuna* dan *swordfish* mengalami trend penurunan, jumlah ekspor terendah terjadi pada tahun 2019. Salah satu penyebab penurunan ini adalah adanya dampak pandemi Covid 19. Beberapa negara tujuan ekspor menutup sementara (*lockdown*) kegiatan ekspornya. Di tahun 2021 ini mulai mengalami peningkatan jumlah ekspor *swordfish* seiring mulai dibukanya kembali kegiatan ekspor.



Gambar 6. Data Ekspor *Bigeye Tuna* dan *Swordfish* di Pos Pelayanan Kapal Perikanan Benoa

Berdasarkan data yang tercatat di Pos Pelayanan Kapal Perikanan Benoa diketahui bahwa ekspor *Bigeye Tuna* dan *Swordfish* berupa ikan *fresh* dengan tujuan Negara Jepang, sedangkan dalam bentuk *frozen* dengan tujuan negara Jepang, USA, Italy, Vietnam, dan Philippines.

2.4.7 Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Berpangkalan dan Pendaratan Ikan dan Surat Kepatuhan Kapal (Pendaftaran kapal di RFMO)

Setiap orang per orang dan badan hukum yang akan melakukan usaha/kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia harus mempunyai Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP). Dalam SIUP ini tercantum nama pemilik kapal/badan hukum pemilik kapal, alamat pemilik, nomoer NPWP, Nomor telepon pemilik yang bisa dihubungi, nomer permohonan, foto pemilik, jumlah kapal yang dimiliki, jumlah gross tonnage kapal, lokasi penangkapan dan jenis kapal perikanan yang dimiliki.

Ada 2 (dua) jenis kapal komersial perikanan yang diizinkan beroperasi di Indonesia, yaitu kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan operasional *port-to-port*. Setiap kapal perikanan ini wajib memiliki surat izin penangkapan/pengangkutan ikan selama operasional. Proses permohonan penerbitan, perpanjangan dan/atau perubahan izin usaha dan izin operasional kapal perikanan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang "Usaha Perikanan Tangkap" pada pasal 128 ayat 2 dijelaskan bahwa Surat Keterangan Pendaratan Ikan dari Pelabuhan Pangkalan menjadi acuan bagi Direktur Jenderal dan Gubernur dalam melakukan evaluasi laporan kegiatan usaha dari pelaku usaha perikanan tangkap. Laporan kegiatan usaha tersebut dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sejak Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) diterbitkan. Sehingga dari penjelasan tersebut, surat keterangan berpangkalan dan pendaratan ikan sudah tidak menjadi syarat dalam perpanjangan SIPI dan SIKPI sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 30 Nopember 2020. Semenjak berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang "Usaha Perikanan Tangkap", pada tahun 2021 ini tidak ada penerbitan surat keterangan berpangkalan dan pendaratan ikan.

Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa juga menerbitkan Surat Kepatuhan Kapal untuk Pendaftaran RFMO (IOTC dan CCSBT). Berdasarkan Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, setiap kapal yang melakukan penangkapan ikan di wilayah Laut Lepas wajib terdaftar di RFMO. Untuk kapal-kapal perikanan yang berpangkalan di Pelabuhan Benoa yang melakukan penangkapan ikan di wilayah Samudera Hindia wajib mendaftarkan ikannya di IOTC dan bila kapal tersebut menangkap *Southern Bluefin Tuna* wajib terdaftar di CCSBT. Data mengenai penerbitan Surat Berpangkalan dan Pendaratan Ikan serta Surat Kepatuhan Kapal dapat dilihat pada **Tabel 10.**

Tabel 10. Data Penerbitan Surat Berpangkalan dan Pendaratan Ikan serta Surat Kepatuhan Kapal Untuk Pendaftaran RFMO

Tahun	Surat Berpangkalan dan Pendaratan	Surat Kepatuhan Kapal	
		IOTC	CCSBT
2015	225	287	285
2016	996	146	148
2017	1.033	216	214
2018	410	120	120
2019	452	130	130
2020	458	226	223
2021	0	182	183

2.4.8 Pelaksanaan Entri Data dan Informasi Kepelabuhan di Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)

Setiap pelabuhan perikanan merupakan pusat data dan informasi perikanan yang penting bagi masyarakat umum maupun civitas perikanan. Data dan informasi yang ada di pelabuhan perikanan antara lain data produksi hasil tangkapan ikan yang didaratkan di pelabuhan perikanan, data harga ikan, data distribusi ikan, distribusi BBM, data perbekalan nelayan, informasi mengenai pendapatan nelayan dan lokasi penangkapan ikan. Data dan informasi ini apabila tidak disebar luaskan maka tidak akan menjadi data yang bermanfaat untuk masyarakat. Oleh sebab itu, setiap data dan informasi perikanan yang ada di pelabuhan wajib diinput pada aplikasi PIPP online dan nantinya masyarakat umum dapat langsung mengaksesnya melalui website.

Benoa walaupun merupakan pelabuhan umum, namun sebagian besar kapal yang beroperasi di wilayah Benoa merupakan kapal perikanan yang mempunyai data dan informasi cukup penting. Oleh sebab itu sejak tahun 2018, setiap data produksi di pelabuhan benoa wajib dientri pada aplikasi PIPP. Adapun data input PIPP di Pos Pelayanan Kapal Perikanan Benoa dapat dilihat pada **Tabel 11**.

Tabel 11. Input Data Produksi Perikanan di PIPP oleh Pos Pelayanan Kapal Perikanan Benoa

Bulan	2019		2020		2021	
	Jumlah Kapal (Unit)	Produksi (Kg)	Jumlah Kapal (Unit)	Produksi (Kg)	Jumlah Kapal (Unit)	Produksi (Kg)
Januari	69	1.701.606	91	1.886.335	96	3.233.609
Februari	31	855.161	68	1.519.002	114	3.317.678
Maret	70	1.891.302	66	1.308.787	116	4.228.191
April	67	1.717.520	81	1.894.766	127	4.642.920
Mei	42	1.082.408	69	1.123.548	63	1.526.472
Juni	36	864.526	60	2.002.893	58	2.031.561
Juli	30	631.232	45	1.398.696	60	2.041.086
Agustus	59	1.628.507	48	1.794.278	61	2.597.186
September	56	1.292.936	47	1.069.818	47	2.137.325
Oktober	57	1.642.372	35	1.177.931	52	1.804.420
November	75	1.770.683	55	2.362.765	54	2.032.504
Desember	102	2.421.263	100	2.645.518	69	2.441.157
Total	694	17.499.516	765	20.184.337	917	32.034.109

2.4.9 Kegiatan Enumerasi Sampling Tuna Longline di Pelabuhan Umum Benoa

Indonesia memiliki tiga pelabuhan utama antara lain Benoa (Bali), Nizam Zachman (Jakarta) dan Cilacap (Jawa Tengah). Namun, kontribusi hasil tangkapan tertinggi diperoleh oleh Pelabuhan Umum Benoa yang mencapai 60% dari total hasil tangkapan rawai tuna skala industri. Oleh karena itu, perikanan rawai tuna skala industri di Pelabuhan Umum Benoa dapat dijadikan sebagai barometer utama dalam dinamika perkembangan perikanan rawai tuna skala industri yang berbasis di Samudera Hindia. Perkembangan armada rawai tuna di Pelabuhan Umum Benoa mengalami pasang-surut dan terkait langsung dengan kondisi

sumberdaya ikan dan kebijakan pemerintah terutama dengan kenaikan harga BBM, kebijakan terkait *illegal fishing* dan moratorium penangkapan kapal ikan eks asing.

Dalam perolehan data yang tepat dan akurat maka Indonesia dibawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, melalui Pos Pelayanan Kapal Perikanan yang bertempat di Pelabuhan Umum Benoa, melakukan kegiatan enumerasi sampling tuna *longline* yang dilaksanakan oleh enumerator sebagai petugas pengambilan data. Enumerasi atau pendataan hasil tangkapan merupakan hal yang penting untuk mengetahui berapa besar hasil tangkapan yang telah dikeluarkan dari suatu perairan dan berapa besar produksi suatu pelabuhan. Tujuan pengelolaan sumber daya ikan ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam keanggotaan IOTC dengan negara-negara lain dalam memanfaatkan sumber daya perikanan tuna di Samudera Hindia secara berkelanjutan dan meningkatkan upaya penanggulangan IUU *fishing*, terutama tuna di Samudera Hindia.

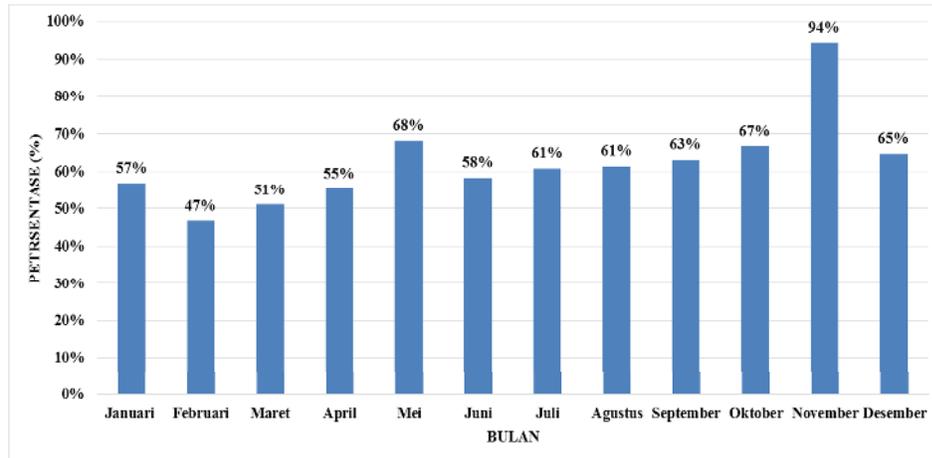
Data produksi hasil sampling tuna yang dilakukan di Pelabuhan Umum Benoa pada tahun 2021 diperoleh jumlah ikan yang disampling sebanyak 153.426 ekor dengan berat 5.012.086 kg. Data produksi sampling tuna tertinggi pada tahun 2021 terdapat pada bulan Desember (65%) yaitu dengan jumlah ikan yang disampling sebanyak 31.253 ekor dengan berat 674.752 kg. Dan data produksi sampling tuna terendah pada tahun 2021 terdapat bulan Februari (47%) yaitu dengan jumlah ikan yang disampling sebanyak 5.022 ekor dengan jumlah 231.398 kg. (**Tabel 12** dan **Tabel 13**).

Tabel 12. Data Produksi Sampling Tuna Longline di Pelabuhan Umum Benoa

Bulan	2019		2020		2021	
	Jumlah Ikan (Ekor)	Total Berat (Kg)	Jumlah Ikan (Ekor)	Total Berat (Kg)	Jumlah Ikan (Ekor)	Total Berat (Kg)
Januari	3.624	161.454	3.508	182.247	8.928	408.344
Februari	1.196	54.882	3.868	213.195	5.022	231.398
Maret	2.717	116.721	5.295	276.779	8.510	386.749
April	4.041	182.626	3.260	162.942	10.337	439.483
Mei	4.112	172.432	2.259	117.198	8.167	367.517
Juni	1.865	71.409	2.930	124.783	9.353	313.566
Juli	2.252	70.876	3.075	119.893	11.102	370.692
Agustus	4.055	147.204	7.784	260.086	7.019	263.306
September	4.377	187.649	8.315	283.663	9.379	331.492
Oktober	5.308	270.853	10.493	436.737	21.547	635.118
November	3.339	157.429	7.192	350.480	22.809	589.669
Desember	4.145	207.512	6.220	296.072	31.253	674.752
Total	41.031	1.801.047	64.199	2.824.075	153.426	5.012.086

Tabel 13. Data Persentase Kapal yang Disampling Pada Tahun 2021 di Pelabuhan Umum Benoa

Bulan	Jumlah Kapal Landing (L)	Jumlah Kapal Sampling (S)	Persentase $[(S*100)/L]$
Januari	58	33	57%
Februari	45	21	47%
Maret	49	25	51%
April	47	26	53%
Mei	47	32	68%
Juni	48	28	58%
Juli	46	28	61%
Agustus	44	27	61%
September	38	24	63%
Oktober	42	28	67%
November	35	33	94%
Desember	51	33	65%
Total	550	338	61%



Gambar 7. Grafik Persentase Kapal yang Disampling Pada Tahun 2021 di Pelabuhan Umum Benoa

Data produksi hasil sampling tuna yang dilakukan di Pelabuhan Umum Benoa pada tahun 2013 – 2021 diperoleh jumlah data produksi ikan yang disampling sebanyak 807.911 ekor dengan berat 30.367.788 kg. Pada tahun 2021 jumlah kapal yang disampling sebanyak 338 kapal dengan jumlah data produksi ikan sebanyak 153.426 ekor dengan berat 5.012.086 kg. Berdasarkan data tersebut jumlah kegiatan enumerasi sampling tuna IOTC mengalami kenaikan sebesar 57% dibandingkan pada tahun 2020 dan jumlah tuna yang disampling mengalami kenaikan sebesar 70% dibandingkan tahun 2020. Data produksi sampling tuna tertinggi pada tahun 2021 yaitu dengan jumlah ikan yang disampling sebanyak 153.426 ekor dengan berat 5.012.086 kg. Dan data produksi sampling tuna terendah pada tahun 2018 yaitu dengan jumlah ikan yang disampling sebanyak 26.068 ekor dengan jumlah 1.011.474 kg. (**Tabel 14** dan **Tabel 15**)

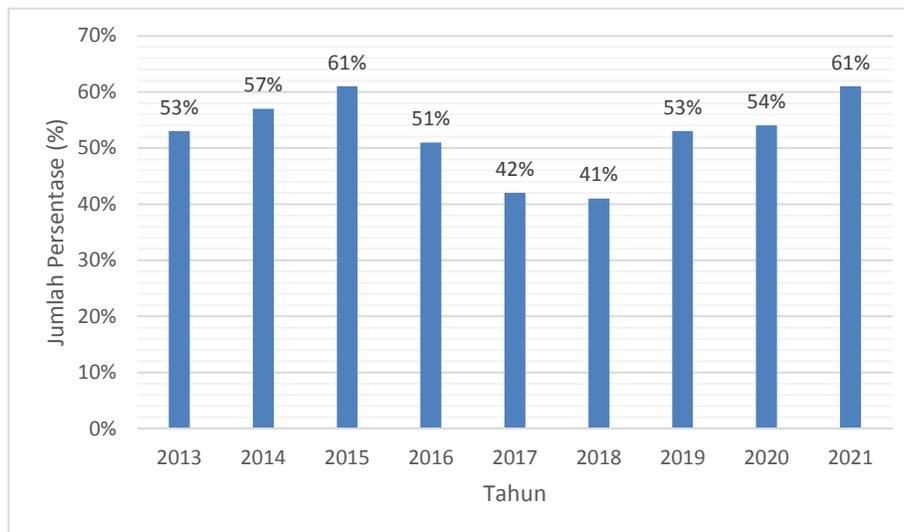
Tabel 14. Data Produksi Sampling Tuna Longline pada Tahun 2013 – 2021 di Pelabuhan Umum Benoa

Tahun	Jumlah Ikan (Ekor)	Total Berat (Kg)
2013	108.218	3.602.099
2014	136.110	5.013.998
2015	139.570	5.180.673
2016	92.347	3.667.671
2017	46.942	2.254.665
2018	26.068	1.011.474
2019	41.031	1.801.047

2020	64.199	2.824.075
2021	153.426	5.012.086
Jumlah	807.911	30.367.788

Tabel 15. Data Persentase Kapal yang Disampling Pada Tahun 2013 - 2021 di Pelabuhan Umum Benoa

Tahun	Jumlah Kapal Landing (L)	Jumlah Kapal Sampling (S)	Persentase $[(S*100)/L]$
2013	797	423	53%
2014	870	499	57%
2015	757	458	61%
2016	727	368	51%
2017	439	186	42%
2018	333	135	41%
2019	404	214	53%
2020	467	254	54%
2021	550	338	61%
Total	5.344	2.875	53%



Gambar 8. Grafik Persentase Kapal yang Disampling pada Tahun 2013 - 2021 di Pelabuhan Umum Benoa

2.4.10 Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan

a. Bimbingan Teknis Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan merupakan salah satu Pelabuhan UPT Pusat yang telah lulus *screening* kelembagaan untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan dengan nomor Registrasi 36-LK/AKP/XI/2019 sehingga mulai awal tahun 2020 PPN Pengambengan dapat melakukan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) secara berkelanjutan.

Pelaksanaan Bimtek Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan dilaksanakan pada bulan Januari. Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis adalah nakhoda dan ABK kapal perikanan yang berasal dari beberapa perusahaan yang beroperasi di PU. Benoa. Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) sebanyak 30 peserta.



Gambar 9. Bimbingan Teknis Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) di Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa tahun 2021

Dari hasil evaluasi terhadap 30 peserta yang hadir dinyatakan bahwa peserta yang lulus sebanyak 30 orang dan yang tidak lulus sebanyak 0 orang. Sehingga bisa dibuatkan rekomendasi untuk penerbitan Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) kepada pihak yang berwenang menerbitkannya, yaitu Bapak Direktur Kapal dan Alat Penangkap Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dengan diterbitkannya SKPI ini diharapkan lebih banyak lagi dokumen CPIB yang bisa diterbitkan sehingga dengan pelaksanaan SKPI dan penerbitan CPIB ini jaminan mutu dan keamanan hasil tangkapan ikan dapat lebih ditingkatkan lagi

dan tentunya dapat menaikkan kualitas produk ikani di wilayah Indonesia pada umumnya dan Bali pada khususnya.

b. Sosialisasi Penerapan *E-Logbook* Penangkapan Ikan di Benoa

Strategi pengumpulan data perikanan sudah seharusnya dikukuhkan sebagai sebuah program yang sifatnya rutin dan dalam jangka waktu panjang (*long-term observation*) salah satunya penggunaan *logbook*. *Logbook* penangkapan ikan adalah laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan penangkapan ikan. *Logbook* penangkapan ikan berisi informasi mengenai data kapal perikanan, data alat penangkapan ikan, data operasi penangkapan ikan dan data ikan hasil tangkapan. Setiap kapal perikanan yang memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) wajib mengisi *logbook* penangkapan ikan.

Beberapa tujuan penting dari *logbook* adalah 1) *Logbook* penangkapan ikan sebagai *landing declaration* dari nakhoda, atau surat pernyataan mengenai ikan yang dibawa ke pelabuhan perikanan; 2) *Logbook* penangkapan ikan mendukung pendataan statistik perikanan (wilayah penangkapan, jenis ikan, volume); 3) *Logbook* penangkapan ikan mencatat data ijin penangkapan (alat tangkap), data registrasi kapal, pelabuhan pangkalan kapal tersebut dan 4) Mendukung evaluasi dan analisa pengelolaan SDI (*fishing capacity, efficiency fishing, musim penangkapan kaitannya dengan open and close session, dan konservasi*).

Pemerintah telah menyiapkan Sumberdaya Manusia (SDM), sarana dan prasarana agar pengisian dan pengumpulan data *logbook* penangkapan ikan terlaksana dengan baik. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan verifikasi dan/atau pengisian data (*entry data*) *logbook* penangkapan ikan mulai tahun 2011 hingga saat ini.

Pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan menyelenggarakan “Sosialisasi Penerapan *E-Logbook* Penangkapan Ikan di Benoa” bertempat di Ruang Rapat Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Pelabuhan Umum Benoa, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Sosialisasi ini diikuti sebanyak 50 peserta yang terdiri dari instansi terkait, nakhoda dan pengurus kapal di Benoa.



Gambar 10. Sosialisasi Penerapan *E-Logbook* Penangkapan Ikan di Benoa

Ada 3 (tiga) sub pokok dalam materi sosialisasi ini yaitu: i) Integrasi Data, ii) Pendataan di Pelabuhan Perikanan, dan iii) Peranan syahbandar dalam penerapan logbook. Integrasi data merupakan proses mengkombinasikan dua atau lebih set data agar mempermudah dalam berbagi dan analisis, dalam rangka mendukung manajemen informasi di dalam sebuah lingkungan kerja. Aplikasi logbook penangkapan ikan merupakan basis data/ aplikasi terintegrasi terkait kegiatan operasional kapal penangkap ikan. Salah satu fungsi pelabuhan perikanan adalah pengumpulan dan penyajian data. Data dan informasi di Pelabuhan Perikanan disajikan pada aplikasi PIPP (Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan). Salah satu peran syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah memeriksa logbook penangkapan ikan terkait kesesuaian data.

Persyaratan melakukan aktivasi e-logbook penangkapan ikan antara lain: surat permohonan, fotokopi SIPI yang masih aktif, dan data nomor IMEI dan nomor HP. Persyaratan verifikasi e-logbook penangkapan ikan antara lain: surat permohonan, fotokopi SIPI yang masih aktif, fotokopi SPB in, dan Fotokopi HPK dari PSDKP. Prosedur melakukan aktivasi e-logbook penangkapan ikan yaitu: i) nakhoda/pemilik kapal/ pengurus kapal melaporkan keberangkatan kapal kepada petugas dan mengajukan permohonan aktivasi e-logbook, ii) petugas memeriksa data kapal dan melakukan entry data kapal, nakhoda, nomor HP dan IMEI, iii) verifikator memverifikasi form tanda terima aktivasi e-logbook penangkapan ikan dan mengembalikan kepada petugas, iv) petugas mengentry nomor HP dan password e-logbook penangkapan ikan pada aplikasi e-logbook penangkapan ikan di HP android milik nakhoda/pemilik kapal, dan dilanjutkan dengan sosialisasi cara

penggunaan aplikasinya. Prosedur penerimaan logbook penangkapan ikan yaitu: i) nakhoda/pemilik kapal/ pengurus kapal membawa dan menyerahkan logbook penangkapan ikan yang sudah diisi kepada petugas, ii) petugas memeriksa kevalidan data yang tercantum di dalam logbook penangkapan ikan, iii) verifikator melakukan verifikasi logbook penangkapan ikan dan menambahkan catatan apabila dibutuhkan, iv) Logbook penangkapan ikan yang telah diverifikasi diserahkan kepada nakhoda/ pemilik kapal/ pengurus kapal.



BAB III

PERMASALAHAN

DAN UPAYA

PEMECAHANNYA

BAB III

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA

3.1 Permasalahan

Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa sebagai perpanjangan tangan dari Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan di PU. Benoa memiliki tugas pokok dan fungsi kesyahbandaran dan operasional pelabuhan yang lebih mengutamakan Pelayanan Masyarakat (*Public Service*).

Dalam pelaksanaan tugasnya ada beberapa permasalahan yang dihadapi dan seringkali menjadi penghambat bagi kelancaran kegiatan Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa antara lain :

3.1.1 Kelompok Kesyahbandaran

1. Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan usahanya melalui *logbook* penangkapan ikan masih kurang. Masih ada pelaku usaha yang tidak melaporkan *logbook* penangkapan ikan dan terlambat dalam pelaporannya;
2. Terhadap kapal-kapal yang melakukan bongkar ikan di luar PU. Benoa seperti di PP. Dobo, PU. Penambulai, dan PP. Merauke petugas *logbook* mengalami kesulitan dalam verifikasi sehingga :
 - a. Kualitas validasi datanya kurang.
 - b. Tingkat ketertelusuran datanya kurang.
3. Terdapat beberapa pelayanan seperti: Verifikasi Logbook Penangkapan Ikan, Surat Keterangan Berpangkalan dan Pendaratan Ikan, dan Surat Keterangan Kepatuhan Kapal untuk Pendaftaran Keanggotaan RFMO yang belum dilakukan standar ISO sehingga :
 - a. Kualitas pelayanan belum memenuhi standar baku.
 - b. Pengguna jasa yang ingin menggunakan produk layanan tidak mengetahui secara pasti bagaimana kualitas produk yang kita berikan.
 - c. Tingkat kepercayaan pengguna jasa terhadap pelayanan yang diberikan menjadi kurang.

4. Masih adanya kelemahan dan *error* pada aplikasi *e-logbook* penangkapan ikan dan DSS system untuk penerbitan SHTI.
5. Masih sering ditemukan ketidaksesuaian jumlah hasil tangkapan ikan antara *e-logbook* dengan Laporan Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan dari PSDKP

3.1.2 Kelompok Operasional Pelabuhan

1. Jarak Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa dengan pelabuhan perikanan pengembangan yang cukup jauh kurang lebih 3,5 jam sehingga menyulitkan dalam hal efisiensi dan efektifitas pelayanan serta memerlukan biaya yang sangat tinggi.
2. Aktifitas kapal perikanan di Benoa berada di pelabuhan umum yang merupakan otoritas dari Kementerian Perhubungan sehingga pendataan aktifitas kapal perikanan di Benoa kurang maksimal.
3. Belum sesuai perbandingan jumlah kapal yang mendaratkan Hasil tangkapan dengan jumlah petugas enumerator dan petugas inspeksi sehingga perlu adanya penambahan SDM dari segi kualitas maupun kuantitas.
4. Masih banyak perusahaan melakukan tagging di darat (harusnya dikapal) khusus *Bluefin Tuna*.
5. Masih kurangnya kesadaran dari pemilik kapal/ pengurus kapal untuk mengajukan permohonan penerbitan CPIB di atas kapal.
6. Proses penerbitan Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) dari Direktorat Kapal dan Alat Penangkapan Ikan (KAPI) membutuhkan waktu yang lama
7. Terdapat beberapa pelayanan terkait Inspeksi Pembongkaran Ikan, penerbitan CDS CCSBT, penerbitan IOTC Bigeye Document, dan penerbitan ICCAT Swordfish Document yang belum dilakukan standar ISO sehingga :
 - a. Kualitas pelayanan belum memenuhi standar baku.
 - b. Pengguna jasa yang ingin menggunakan produk layanan tidak mengetahui secara pasti bagaimana kualitas produk yang kita berikan.

- c. Tingkat kepercayaan pengguna jasa terhadap pelayanan yang diberikan menjadi kurang.

3.2 Pemecahan Masalah

3.2.1 Kelompok Kesyahbandaran

1. Perlu adanya pemberian *reward* dan *punishment* terhadap pemilik kapal/nakhoda dalam kepatuhan melaporkan hasil tangkapannya melalui *e-logbook*;
2. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan petugas logbook di PP. Dobo, PU. Penambulai dan PP. Merauke terkait kapal berpangkalan di PU. Benoa yang bongkar di PP. Dobo, PU. Penambulai dan PP. Merauke;
3. Mengajukan permohonan penerapan standar ISO pada beberapa pelayanan seperti Logbook Penangkapan Ikan, dan, Surat Keterangan Kepatuhan Kapal.

3.2.2 Kelompok Operasional Pelabuhan

1. Perlunya dilakukan kajian akademis mengenai perlu atau tidaknya pembentukan satker (satuan kerja) khusus di Pelabuhan Umum Benoa.
2. Perlu adanya kantor pelayanan terpadu yang terdiri atas berbagai instansi pemerintah di Pelabuhan Umum Benoa seperti: KSOP Kelas II Benoa, PPN Pengambengan, PSDKP Benoa, BKIPM Kelas I Denpasar, Loka Riset Perikanan Tuna, BPSPL Denpasar, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bali, Polairud, TNI AL, dan Polsek Kawasan Laut Benoa.
3. Menambah jumlah petugas inspeksi pembongkaran ikan dan enumerator
4. Meningkatkan keterampilan dan keahlian petugas inspeksi pembongkaran ikan dan enumerator melalui pendidikan dan pelatihan (diklat).
5. Melakukan sosialisasi kepada pemilik kapal, unit pengolahan ikan (UPI), nakhoda dan pengurus kapal tentang kepatuhan pelaporan pendaratan

Southern Bluefin Tuna di PU. Bena dan pemasangan *tagging* di atas kapal untuk semua *Southern Bluefin Tuna* yang tertangkap.

6. Melakukan sosialisasi kepada pemilik kapal dan pengurus kapal tentang pentingnya penerapan CPIB di atas kapal.
7. Melakukan pengajuan kepada Direktorat Kapal dan Alat Penangkapan Ikan (KAPI) agar proses penerbitan Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) bisa didelegasikan kepada PPN Pengambengan.
8. Mengajukan permohonan penerapan standar ISO pada beberapa pelayanan seperti Inspeksi Pembongkaran Ikan, Penerbitan CDS CCSBT, penerbitan IOTC *Bigeye Document*, dan penerbitan ICCAT *Swordfish Document*.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Jumlah penerimaan logbook penangkapan ikan pada tahun 2021 sebanyak 917 dokumen dengan jumlah produksi sebanyak 32.034 ton. Berdasarkan data tersebut jumlah penerimaan logbook penangkapan ikan mengalami peningkatan sebesar 4,9% dibandingkan pada tahun 2020. Jumlah produksi mengalami peningkatan sebesar 20,44% dibandingkan pada tahun 2020;
2. Jumlah inspeksi pembongkaran ikan pada tahun 2021 sebanyak 682 kapal dan tidak ada penerbitan dokumen SKH IPI. Berdasarkan data tersebut jumlah inspeksi pembongkaran ikan mengalami peningkatan sebesar 28,56% dibandingkan pada tahun 2020. Jumlah penerbitan sertifikat CPIB pada tahun 2021 sebanyak 135 dokumen. Berdasarkan data tersebut jumlah penerbitan sertifikat CPIB mengalami peningkatan sebesar 43,62% dibandingkan pada tahun 2020;
3. Jumlah penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) pada tahun 2021 antara lain SHTI Lembar Awal sebanyak 704 dokumen, SHTI Lembar Turunan sebanyak 322 dokumen, dan SHTI Lembar Turunan Disederhanakan sebanyak 27 dokumen. Berdasarkan data tersebut jumlah penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) Lembar Awal mengalami peningkatan sebesar 7,40%, SHTI Lembar Turunan mengalami peningkatan sebesar 38,80% dan SHTI Lembar Turunan Disederhanakan mengalami peningkatan sebesar 20% dibandingkan pada tahun 2020;
4. Jumlah penerbitan CDS CCSBT untuk *Catch Tagging Form* (CTF) pada tahun 2021 sebanyak 330 dokumen dengan jumlah *Southern Bluefin Tuna* yang tertangkap sebanyak 892.633 kg. Berdasarkan data tersebut jumlah penerbitan CDS CCSBT mengalami penurunan sebesar 8,59% dibandingkan

- pada tahun 2020. Jumlah produksi *Southern Bluefin Tuna* mengalami penurunan sebesar 18,58% dibandingkan pada tahun 2020;
5. Jumlah penerbitan IOTC *Bigeye Tuna Statistical Document* pada tahun 2021 sebanyak 56 dokumen dengan jumlah produksi *Bigeye Tuna* sebanyak 78.489,67 kg. Berdasarkan data tersebut jumlah penerbitan IOTC *Bigeye Tuna Statistical Document* mengalami penurunan sebesar 7,43% dibandingkan pada tahun 2020. Jumlah produksi *Bigeye Tuna* mengalami penurunan sebesar 4,56% dibandingkan pada tahun 2020;
 6. Jumlah penerbitan ICCAT *Swordfish Statistical Document* pada tahun 2021 sebanyak 457 dokumen dengan jumlah produksi *Swordfish* sebanyak 938.198,13 kg. Berdasarkan data tersebut jumlah penerbitan ICCAT *Swordfish Statistical Document* mengalami peningkatan sebesar 22,68% dibandingkan pada tahun 2020. Jumlah produksi *Swordfish* mengalami peningkatan sebesar 37,78% dibandingkan pada tahun 2020;
 7. Pada tahun 2021 ini tidak ada penerbitan surat keterangan berpangkalan dan pendaratan ikan;
 8. Jumlah penerbitan Surat Keterangan Kepatuhan Kapal untuk pendaftaran RFMO pada tahun 2021 sebanyak 365 dokumen. Berdasarkan data tersebut jumlah penerbitan Surat Keterangan Kepatuhan Kapal untuk pendaftaran RFMO mengalami penurunan sebesar 10,31% dibandingkan pada tahun 2020;
 9. Input data PIPP di PU. Benoa pada tahun 2021 dengan jumlah kapal yang terinput sebanyak 917 kapal. Berdasarkan data tersebut jumlah kapal yang diinput ke dalam PIPP mengalami peningkatan sebesar 9,04% dibandingkan pada tahun 2020. Jumlah produksi ikan yang diinput ke dalam PIPP sebanyak 32.034.109 kg. Berdasarkan data tersebut jumlah produksi ikan yang diinput ke dalam PIPP mengalami peningkatan sebesar 22,69% dibandingkan pada tahun 2020;
 10. Jumlah kegiatan enumerasi sampling tuna IOTC pada tahun 2021 sebanyak 338 kapal dengan jumlah tuna yang disampling sebanyak 153.426 ekor dengan berat 5.012.086 kg. Berdasarkan data tersebut jumlah kegiatan

enumerasi sampling tuna IOTC mengalami peningkatan sebesar 14,2% dibandingkan pada tahun 2020 dan jumlah ekor tuna yang disampling mengalami peningkatan sebesar 41% dibandingkan tahun 2020.

b. Saran

Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2021 kami dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kegiatan yang perlu dilaksanakan ke depannya adalah sebagai berikut:
 - i) peningkatan sosialisasi kepatuhan pelaporan *elogbook* penangkapan ikan dan aktivasi *elogbook* penangkapan ikan untuk kapal di bawah 30 GT;
 - ii) peningkatan sosialisasi kepada *stakeholder* terkait pelaksanaan CPIB di atas kapal;
 - iii) peningkatan pelaporan dan *tagging Southern Bluefin Tuna* yang didaratkan di PU. Benoa;
 - iv) permohonan pengajuan produk layanan yang ada di Pos Pelayanan Kapal Perikanan Benoa sesuai dengan standar ISO.
2. Perlu adanya publikasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Pos Pelayanan Kapal Perikanan Benoa melalui media sosial seperti: *twitter*, *facebook*, *youtube*, dan lain-lain
3. Koordinasi secara intensif dengan KSOP Kelas II Benoa, PSDKP Benoa, BKIPM Kelas I Denpasar dan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bali terkait pendataan kegiatan perikanan di PU. Benoa.



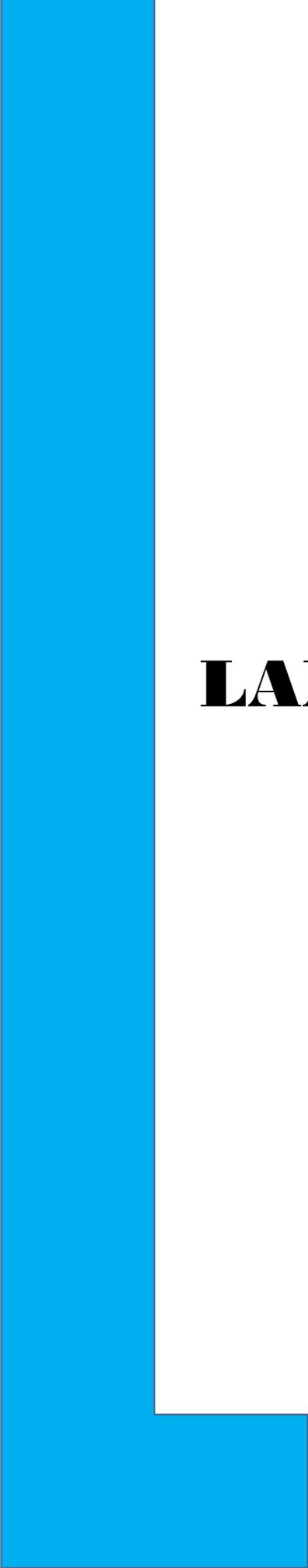
BAB V

PENUTUP

BAB V PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Tahun 2021 Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa ini disusun sebagai bahan informasi, evaluasi dan pertimbangan dalam memberikan petunjuk pelaksanaan tugas serta mengambil kebijakan, pengembangan dan operasional yang lebih baik di waktu yang akan datang.

Harapan kami, melalui Laporan Tahunan Tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan menjadi perhatian dalam mengambil keputusan di tingkat Pusat dan Daerah.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Nama Pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2021

N O	NAMA / NIP TGL LAHIR	JABATAN	PANGKAT	PENDIDIKAN TERTINGGI
1	ANDI MANNOJENGI, S.St.Pi, M.Si 197504172002121002 UJUNG Pandang/17-04-1975	KEPALA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	Pembina (IV/a), 01-04-2017	S2 - Ilmu Kelautan
2	NI KETUT ERLINA EFENDI, S.Pi 198101122005022001 Sepangkelod/12-01-1981	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MUDA	Penata Tk.I (III/d), 01-04-2017	S1 - Manajemen Sumber Daya Perairan
3	DENDY UMBARA HADI, S.P 197802042006041010 Banyuwangi/04-02-1978	ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN MUDA	Penata Tk.I (III/d), 01-04-2018	S1 - Agribisnis
4	AMBAR TRI HARNANTO, A.Pi 197204141999031005 Jakarta/14-04-1972	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MUDA	Penata Tk.I (III/d), 01-04-2018	DIV – Permesinana Perikanan
5	SRI WAHYUNINGSIH, S.E. 197804122007012004 Banyuwangi/12-04-1978	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	Penata Tk.I (III/d), 01-04-2019	S1 - Manajemen
6	BAGUS SUDANANJAYA, S.St.Pi, M.Pi 198211162008011003 Gunung, Tabanan/16-11-1982	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MUDA	Penata Tk.I (III/d), 01-04-2020	S2 - Manajemen Perikanan
7	AKHMAD MARZUKI, S.Kom,M.T. 198105272009011001 Surabaya/27-05-1981	PRANATA KOMP MUDA	Penata (III/c), 01-04-2017	S2 - Teknik Elektro
8	YENNI NURUL KUSTIA, S.Pi 197801072009122001 Malang/07-01-1978	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MUDA	Penata (III/c), 01-04-2018	S1 - Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
9	LUH PUTU ARI WIDIANI, S.Pi 198601212009122002 Singaraja/21-01-1986	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MUDA	Penata (III/c), 01-04-2018	S1 - Teknologi Hasil Perairan
10	LULUK MARIA SYABANA, S.Pi 198106242009122001 Banyuwangi/24-06-1981	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	Penata (III/c), 01-04-2018	S1 - Manajemen Sumber Daya Perairan
11	DIANA SANTIAJI IRAWAN, S.Pi 198004192010121001 Trenngalek/19-04-1980	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MUDA	Penata (III/c), 01-04-2019	S1 - Teknologi Hasil Perikanan
12	SIGIT BERBUDI 197406211995031001 Belawan/21-06-1974	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	Penata Muda Tk.I (III/b), 01-04-2014	
13	LUKMAN HADI, S.St.Pi 198202192005021002 Banyuwangi/19-02-1982	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP PERTAMA	Penata Muda Tk.I (III/b), 01-04-2018	DIV - Penyuluhan Perikanan
14	ELWIDYA BASTIAN, S.Pi 198712162014032001 Tanahdatar/16-12-1987	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP PERTAMA	Penata Muda Tk.I (III/b), 01-04-2018	S1 - Teknologi Dan Manajemen Perikanan Tangkap

15	SIWI CAHYA WIDODO, S.Pi 197912102014031001 KEDIRI/10-12-1979	ANALIS PERENCANAAN	Penata Muda Tk.I (III/b), 01-04-2018	
16	ROISUL MA`ARIF, S.Pi 199003232015031002 MADIUN/23-03-1990	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP PERTAMA	Penata Muda Tk.I (III/b), 01-04-2019	S1 - Teknologi Dan Manajemen Perikanan Tangkap
17	DEVI JUNIATI BR TARIGAN, A.Md, S.Kom 198606272010122002 MUNTE,TANAHKARO/27-06-1986	PRANATA KOMP PERTAMA	Penata Muda Tk.I (III/b), 01-04-2020	S1 - Teknik Informatika
18	MAHAMUDA, S.E 197705182007011003 SAMPANG/18-05-1977	PENGADMINISTRASI UMUM	Penata Muda (III/a), 01-04-2018	S1 - Manajemen
19	RETNO TRIMAHANANI, S.E 198102012007012001 BANYUWANGI/01-02-1981	BENDAHARA	Penata Muda (III/a), 01-04-2018	S1 - Manajemen
20	SUSILAWATI, S.E. 198007172006042020 SELONG/17-07-1980	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	Penata Muda (III/a), 01-04-2019	S1 - Manajemen
21	MIRZA FITHRY NURBAYANIE, S.E. 197809032007012001 BANYUWANGI/03-09-1978	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	Penata Muda (III/a), 01-04-2019	S1 - Manajemen
22	ANGGA PRASETYA, S.Tr.Pi 199311212018011003 SRAGEN/21-11-1993	ANALIS KESYAHBANDARAN	Penata Muda (III/a), 01-04-2019	DIV - Teknologi Penangkapan Ikan
23	ARMAN 198207022009011005 BAWAN,AGAM/02-07-1982	STATISTISI PELAKSANA LANJUTAN	Penata Muda (III/a), 01-10-2019	
24	AISYAH NURULITA ERKA, S.Pi 199602242019022004 BLITAR/24-02-1996	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP PERTAMA	Penata Muda (III/a), 01-03-2020	S1 - Manajemen Sumberdaya Akuatik
25	AHMAD HENDRA SETYAWAN, S.Tr.Pi 199304122019021003 MAGELANG/12-04-1993	ANALIS KESYAHBANDARAN	Penata Muda (III/a), 01-03-2020	DIV - Teknologi Penangkapan Ikan
26	SUMARNI 197905202006042019 PRAYALOMBOKTENGAH/20-05- 1979	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	Pengatur Tk.I (II/d), 01-04-2018	
27	HITLER SUMAH 198709062008011001 SORONG/06-09-1987	PENGAWAS PERIKANAN PELAKSANA	Pengatur Tk.I (II/d), 01-10-2018	
28	RIFFAL ISWAHYUDI 198407212008011003 SINDANGINDRAMAYU/21-07-1984	PENGAWAS PERIKANAN PELAKSANA	Pengatur Tk.I (II/d), 01-10-2018	
29	SUPRIYANTO 197808182007011001 BANYUWANGI/18-08-1978	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	Pengatur (II/c), 01-10-2018	
30	MUJIBURRAHMAN 199502232019021003 BENERMERIAH/23-02-1995	ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP PEMULA	Pengatur Muda (II/a), 01-03-2020	
	NURUL LADY CHOIRUNISA, S.Psi	ANALIS	Penata Muda	S1 - Psikologi

32	199502052020122002 SEMARANG/05-02-1995	KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA	III/a, 01-12-2020	
	ELVANA ANANDHA ADIAN, A.Md, A.B. 199512062020122002 SURABAYA/06-12-1995	ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA	Pengatur II/c, 01-12-2020	D3 - Administrasi perkantoran
33	MELDIANY RAMADHONA, A.Md 199502142020122001 TANAH DATAR/14-02-1995	ARSIPARIS PELAKSANA	Pengatur II/c, 01-12-2020	D3 - Ilmu perpustakaan

Lampiran 2. Daftar Nama Pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021

NO.	PERIHAL	YANG BERANGKAT	TANGGAL KEGIATAN	TEMPAT KEGIATAN
1	Bimtek Penyusun Rencana Kerja Jabatan Fungsional P3T dan AP3T	Yenni Nurul Kustia, S.Pi Diana Santiaji Irawan, S.Pi Roisul Ma'arif, S.Pi Elwidya Bastian, S.Pi Aisyah Nurulita Erka, S.Pi Mujiburrahman Lukman Hadi, S.St.Pi	19 Januari 2021	Daring
2	Model Tata Kelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan: Tantangan dan Peluang Implementasi	Yenni Nurul Kustia, S.Pi Diana Santiaji Irawan, S.Pi Lukman Hadi, S.St.Pi	26 Januari 2021	Daring
3	Budaya Kerja	Nurul Lady Choirunisa	1 s/d 4 Februari 2021	Daring
4	Bimbingan Teknik Tim Penilai Jabfung P3T dan AP3T	Elwidya Bastian, S.Pi	2 s/d 5 Februari 2021	Daring
5	Budaya Kerja Angkatan VI Tahun 2021	Elvana Anandha A., A.Md.A.B. Meldiany Ramadhona, A.Md	2 s/d 4 Maret 2021	Daring
6	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 2021	Siwi Cahya Widodo, S.Pi	8 s/d 13 Maret 2021	Daring
7	CCNA Network Engineer	Akhmad Marzuki, S.Kom., M.T	18 Maret s/d 31 Mei 2021	Daring
8	Validasi Nasional Satu Data Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2020	Aisyah Nurulita Erka, S.Pi	22 s/d 26 Maret 2021	Daring
9	Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI)	Riffal Iswahyudi	25 Maret 2021	Daring
10	Rapat Teknis Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Tahun 2021	Andi Mannoengi, S.St.Pi., M.Si	27 s/d 30 Maret 2021	Daring

11	Bimbingan teknis Pengelolaan Kinerja dan Pemantauan Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2021	Dendy Umbara Hadi, SP Yenni Nurul Kustia, S.Pi Siwi Cahya Widodo, S.Pi Angga Prasetya, S.St.Pi Nurul Lady Choirunisa, S.Psi	14 s/d 16 April 2021	Daring
12	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) dan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (AP3T)	Roisul Ma'arif, S.Pi Angga Prasetya, S.Tr.Pi Supriyanto	20 s/d 23 April 2021	Daring
13	Pelatihan AI Chatbot Development For Non Programmer	Devi Juniati Br Tarigan, A.Md, S.Kom	26 s/d 29 April 2021	Daring
14	Pertemuan Sinergi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pendanaan Usaha Nelayan Tahun Anggaran 2021	Ni Ketut Erlina Efendi, S.Pi Yenni Nurul Kustia, S.Pi Susilawati, SE SUpriyanto	3 s/d 6 Mei 2021	Daring
15	Rapat Teknis Operator dan Enumerator PIPP dalam rangka Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasca Produksi	Andi Mannojengi, S. St.Pi, M.Si Bagus Sudananjaya S.St.Pi., M.Pi Ambar Tri Harnanto, A.Pi	25 s/d 27 Mei 2021	Bandung
16	Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Batch I Tahun 2021	Andi Mannojengi, S. St.Pi, M.Si	15 s/d 18 Juni 2021	Daring
17	Pengantar Kearsipan	Meldian Ramadhona, A.Md	23 Juni 2021	Daring
18	E-Learning Jabatan Fungsional Pranata dan Analis Pengelolaan APBN Angkatan V Tahun 2021	Dendy Umbara Hadi, SP	5 s/d 9 Juli 2021	Daring
19	E-Learning Manajemen Kas Satuan Kerja Angkatan VI tahun 2021	Dendy Umbara Hadi, SP	26 s/d 30 Juli 2021	Daring
20	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Bagus Sudananjaya, S.St.Pi., M.Pi Ni Ketut Erlina Efendi, S.Pi Aisyah Nurulita Erka, S.Pi	6 s/d 9 Juli 2021	Daring
21	Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas dan Tata Cara Menulis yang Baik dan Efektif	Yenni Nurul Kustia, S.Pi Roisul Ma'arif, S.Pi Retno Trimahanani, SE Lukman Hadi, S.St.Pi Elwidya Bastian, S.Pi Aisyah Nurulita Erka, S.Pi	30 Juli 2021	Daring
22	E-Learning Jabatan Fungsional Pranata dan	Mirza Fithry Nurbayanie, SE	26 Juli s/d 6 Agustus 2021	Daring

	Analisis Pengelolaan APBN Angkatan V Tahun 2021			
23	Bimbingan Teknis Administrasi Pengelolaan Hibah	Mahamuda, SE	3 Agustus 2021	
24	E-Learning Manajemen Komitmen Angkatan VI Tahun 2021	Dendy Umbara Hadi, SP	12 s/d 19 Agustus 2021	
25	E-Learning Manajemen Komitmen Angkatan VI Tahun 2021	Retno Trimahanani, SE	30 Agustus s/d 3 September 2021	
25	E-Learning Pelaporan dan Pertanggungjawaban Angkatan VI Tahun 2021	Retno Trimahanani, SE	30 Agustus s/d 3 September 2021	
26	E-Learning Jabatan Fungsional Pranata dan Analisis Pengelolaan APBN Angkatan VII Tahun 2021	Dendy Umbara Hadi, SP	6 s/d 17 September 2021	
27	Pemantauan dan Evaluasi Pelaporan Berbasis Web DJPT	Dendy Umbara Hadi, S.P Siwi Cahya Widodo, S.Pi Ahmad Hendra Setyawan, S.Tr.Pi Elvana Anandha Adian, A.Md.A.B.	21 s/d 23 September 2021	
28	End User Training (EUT) Aplikasi Sakti	Mirza Fithry Nurbayanie, SE Retno Trimahanani, SE	20 s/d 24 September 2021	
29	Virtual Training Budaya Pelayanan Prima bagi Petugas Frontliner KKP	Elwidya Bastian, S.Pi Luh Putu Ari Widiani, S.Pi Yenni Nurul Kustia, S.Pi Arman	21 s/d 22 September 2021	
30	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Pagu Alokasi Anggaran DJPT TA 2022	Andi Mannoengi, S. St.Pi, M.Si Dendy Umbara Hadi, SP Siwi Cahya Widodo, S.Pi	10 s/d 14 Oktober 2021	Bandung
31	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Pagu Alokasi Anggaran DJPT TA 2022	Sumarni	10 s/d 14 Oktober 2021	Daring
32	E-Learning Jabatan Fungsional Pranata dan Analisis Pengelola Keuangan APBN Angkatan IX Tahun 2021	Luluk Maria Syabana, S.Pi	4 s/d 15 Oktober 2021	Daring
33	Bimbingan Teknis Rekonsiliasi Kinerja dan Penilaian Mandiri SAKIP DJPT Tahun 2021	Dendy Umbara Hadi, SP Nurul Lady Choirunisa, S.Psi	1 s/d 4 November 2021	Bandung
34	Verifikasi Data Statistik Perikanan tangkap Tahun 2021 dan Persiapan Pelaksanaan Data Statistik Perikanan Tangkap Tahun 2022	Lukman Hadi, S.St.Pi Sri Wahyuningsi, SE Susilawati, SE Sigit Berbudi Hiler Sumah	6 s/d 8 Desember 2021	Daring

Lampiran 3. Daftar Nama Pegawai PPN Pengambengan Yang Memperoleh Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala Pada Tahun 2021

1. Kenaikan Pangkat

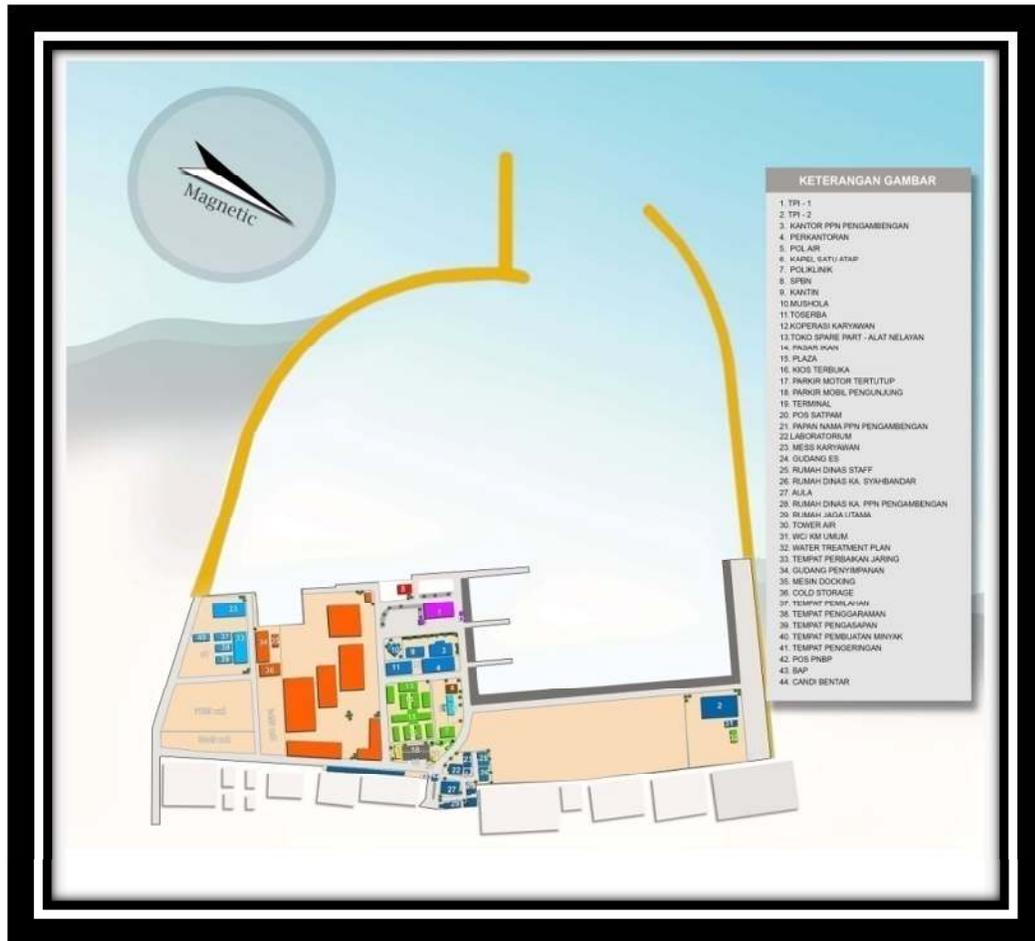
No	KENAIKAN PANGKAT	NAMA	TMT
1	IV/a ke IV/b	Andi Mannojengi, S.St.Pi., M.Si	1 April 2021

2. Kenaikan Gaji Berkala

No	KENAIKAN GAJI BERKALA	NAMA	TMT
1.	III/c 12 thn 0 bln ke III/c 14 thn 0 bln	Diana Santiaji Irawan, S.Pi	1 Januari 2021
2.	III/c 10 thn 0 bln ke III/c 12 thn 0 bln	Akhmad Marzuki, S.Kom, M.T	1 Januari 2021
3.	III/b 10 thn 0 bln ke III/b 12 thn 0 bln	Lukman Hadi, S.St.Pi	1 Januari 2021
4.	II/d 11 thn 0 bln ke II/d 13 thn 0 bln	Hitler Sumah	1 Januari 2021
5.	II/d 11 thn 0 bln ke II/d 13 thn 0 bln	Riffal Iswahyudi	1 Januari 2021
6.	III/d 14 thn 0 bln ke III/d 16 thn 0 bln	Ni Ketut Erlina Efendi, S.Pi	1 Februari 2021
7.	III/a 1 thn 0 bln ke III/a 2 thn 0 bln	Ahmad Hendra Setyawan, S.Tr.Pi	1 Maret 2021
8.	III/a 1 thn 0 bln ke III/a 2 thn 0 bln	Aisyah Nurulita Erka, S.Pi	1 Maret 2021
9.	III/d 16 thn 0 bln ke III/d 18 thn 0 bln	Sri Wahyuningsih, S.E.	1 April 2021
10.	III/c 14 thn 0 bln ke III/c 16 thn 0 bln	Yenni Nurul Kustia, S.Pi	1 April 2021
11.	IV/a 4 thn 0 bln ke IV/a 6 thn 0 bln	Roisul Ma'arif, S.Pi	1 April 2021
12.	III/a 12 thn 0 bln ke III/a 14 thn 0 bln	Retno Trimahanani, S.E	1 April 2021
13.	II/d 19 thn 0 bln ke II/d 21 thn 0 bln	Sumarni	1 April 2021
14.	II/a 13 thn 0 bln ke II/a 15 thn 0 bln	Supriyanto	1 April 2021
15.	III/d 16 thn 0 bln ke III/d 18 thn 0 bln	Abdul Razak, S.St.Pi	1 Mei 2021
16.	III/a 13 thn 9 bln ke III/a 16 thn 0 bln	Susilawati, S.E	1 Juli 2021

17.	III/c 10 thn 0 bln ke III/c 12 thn 0 bln	Luluk Maria Syabana, S.Pi	1 Desember 2021
18.	III/c 10 thn 0 bln ke III/c 12 thn 0 bln	Luh Putu Ari Widiani, S.Pi	1 Desember 2021

Lampiran 4. Lay Out Master Plan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan



Lampiran 5. Gambar Foto Satelit Kawasan PPN Pengambengan



Lampiran 6. Fasilitas Pokok, Fasilitas Fungsional dan Fasilitas Penunjang

Fasilitas Pokok



Break Water



Dermaga



Dermaga TPI Higienis



Kolam Labuh



Jalan Pelabuhan



Drainase Jalan Pelabuhan

Fasilitas Pokok



Drainase TPI Higienis



Groin

Fasilitas Fungsional



Tempat Pelelangan Ikan



TPI Higienis



SPBN



Kantor Pelabuhan

Fasilitas Fungsional



Gedung Bina Mutu



Bangsal perbaikan jaring



Cold Storage



Gedung Pelayanan Terpadu

Fasilitas Penunjang



Mess Operator



Gedung Pertemuan Nelayan



Tempat Parkir Roda 2



Pura



Musholla



Pertokoan

Lampiran 7. Dokumentasi Kegiatan-Kegiatan PPN Pengembangan

Gambar 6.
Kegiatan Apel Pagi



**Gambar 7.
Pelatihan SKPI**



**Gambar 8.
Diseminasi Pelayanan Publik Sistem Digital**



Gambar 9.
Kunjungan MKP di PPN Pengambengan



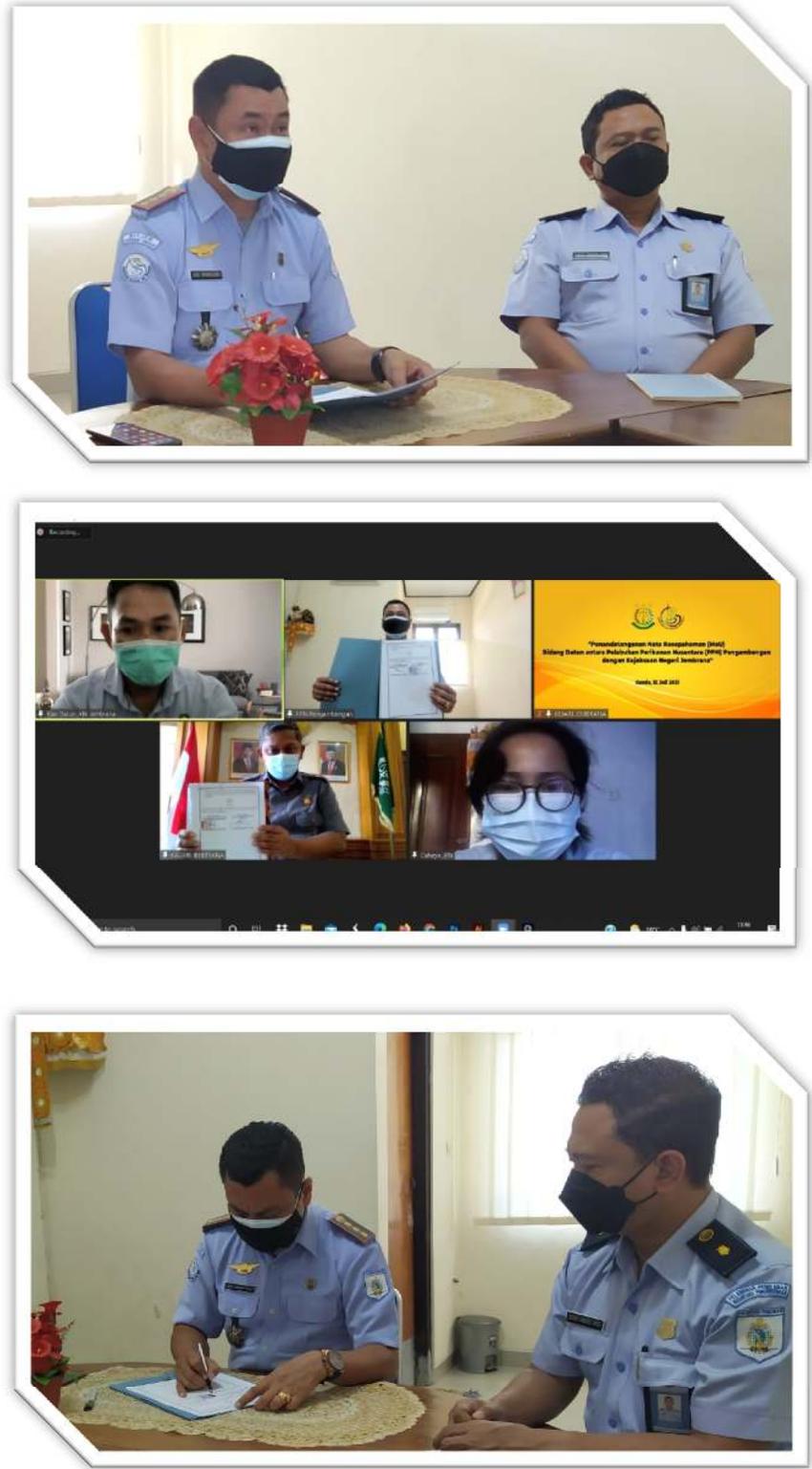
Gambar 10.
Vaksinasi kepada 500 nelayan dan pemberian paket bantuan
dalam rangka bulan bakti nelayan



Gambar 11.
Kunjungan MKP di Pos Pelayanan Kapal Perikanan Bena



Gambar 12.
Penandatanganan MoU dengan Kejaksaan Negeri Jembrana



Gambar 13.
Kunjungan Kerja DPR RI Komisi 4 dalam rangka bulan bakti nelayan



Gambar 14.
Penandatanganan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan



Gambar 15.
Menghadiri Upacara Hari Sumpah Pemuda ke 39 di Perancak



Gambar 16.
Kegiatan Dharma wanita



Gambar 17.
Kegiatan Pameran



Gambar 18.
Rapat Koordinasi Terkait Keselamatan dan Keamanan
Pendistribusian BBM



Gambar 19.
Sosialisasi PP No. 85 Th. 2021 Tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan





Gambar 20.
Rapat Stake Holder





Gambar 21.
Kegiatan Rapat Koordinasi Keamanan Terpadu





Gambar 22
Kegiatan Pelaksanaan Kebersihan
Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan

